



UNIVERSITAS INDONESIA

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KETIDAKSETARAAN GENDER DALAM PENDIDIKAN**

**(Suatu Studi Pada Perempuan di Kecamatan Majalaya
Kabupaten Karawang)**

TESIS

RAHMI FITRIANTI

0906655774

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
KEKHUSUSAN PERENCANAAN & EVALUASI PEMBANGUNAN**

DEPOK

JANUARI 2012



UNIVERSITAS INDONESIA

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KETIDAKSETARAAN GENDER DALAM PENDIDIKAN**

**(Suatu Studi Pada Perempuan di Kecamatan Majalaya
Kabupaten Karawang)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial (M.Kesos)

**RAHMI FITRIANTI
0906655774**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
KEKHUSUSAN PERENCANAAN & EVALUASI PEMBANGUNAN
DEPOK
JANUARI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : RAHMI FITRIANTI

NPM : 0906655774

Tanda Tangan : 

Tanggal : 23 Desember 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Rahmi Fitrianti
NPM : 0906655774
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Judul Tesis : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidaksetaraan Gender Dalam Pendidikan (Suatu Studi Pada Perempuan di Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kesejahteraan Sosial pada Program Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Johanna Debora Imelda, Ph.D

Penguji : Dra. Bunda Sri Sugiri, M.Hum

Penguji : Fentiny Nugroho, Ph.D

Penguji : Dra. Fitriyah, M.Si

Handwritten signatures of the examiners and supervisor, enclosed in parentheses. The signatures are: (Johanna Debora Imelda), (Dra. Bunda Sri Sugiri), (Fentiny Nugroho), and (Dra. Fitriyah).

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 9 Januari 2012

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana atas berkat rahmat, hidayah dan segala petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Topik yang diangkat dalam penulisan tesis ini berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksetaraan gender dalam pendidikan (suatu studi pada perempuan di Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang) dalam hal ini difokuskan bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi ketidaksetaraan gender yang termanifestasi dalam bentuk marjinalisasi, subordinasi, stereotip, beban ganda dan kekerasan.

Dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Berkenaan dengan itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dengan segenap cinta kasihku untuk Suamiku Budi Herdi Nopianto atas kesabaran, doa serta ketulusan cintamu, yang selalu memberikan kepercayaan dan keyakinan "*everything can be handled*". Anakku Budi Haura Revaleezza Khalefa Arunaya atas pengorbanan dan kesabaranmu yang selalu menemani, doaku selalu teriring semoga engkau tumbuh menjadi anak yang soleha, berpengetahuan yang berguna bagi agama, bangsa dan rakyatmu. Tak lupa secara tulus dan ikhlas kepada orang tuaku H. Pudjihadjo dan Hj. Inah Sutinah serta mertuaku Hj. Nonih Sumartini atas doa dan dukungannya, saudara-saudaraku serta keponakan-keponakanku. Terima kasih Allah SWT penulis memiliki mereka semua yang selalu ada dan percaya dengan segala keputusan penulis. Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

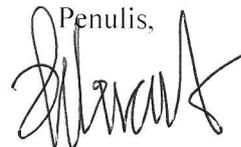
1. Johanna Debora Imelda, Ph.D, selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan secara sabar dan teliti sehingga telah membantu perluasan pemikiran dalam penulisan tesis ini.
2. Dra. Bunda Sri Sugiri, M. Hum, Fentiny Nugroho, Ph.D dan Dra. Fitriyah, M.Si, yang telah bersedia menjadi penguji dalam sidang tesis.
3. Seluruh staf pengajar yang telah memberikan pencerahan dan pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan dan seluruh Staf Sekretariat

program Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial atas dukungan dan kelancaran pelayanan administrasi.

4. Pusdiklat Kesos Kementerian Sosial RI, yang telah memberikan kesempatan tugas belajar dan memberikan dukungan biaya pendidikan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan.
5. Direktur Pemberdayaan Keluarga dan Direktur Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Kementerian Sosial RI, yang telah memberikan izin tugas belajar beserta rekan-rekan semua di Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis khususnya Mba Niken dan Mas Heru yang selalu mau diganggu dengan curhatan atau permintaan tolong.
6. Rekan-rekan seperjuangan di Program Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial UI, atas kebersamaannya selama ini; Mbak Yulia, Dena, Djule, Mbak Dyah, Pak Sunarno dan Mas Habibi atas data-datanya, serta Mas Habib atas kesediaannya untuk selalu diganggu di hari-hari menjelang *dateline* dan Mas Azam "*finally, we can finish it*" serta teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih untuk persahabatan dan kebersamaan selama ini.
7. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah banyak memberikan makna dan pelajaran penting bagi kehidupan penulis.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan maupun ilmu yang dimiliki, sehingga dalam penulisan tesis ini tentunya masih banyak dijumpai kesalahan baik teknis penulisan maupun analisa yang mana kekurangan tersebut tiada lain berasal dari dalam diri penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan tesis ini. Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 23 Desember 2011

Penulis,


RAHMI FITRIANTI

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmi Fitrianti
NPM : 0906655774
Program studi : Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial
Departemen : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidaksetaraan Gender Dalam Pendidikan
(Suatu Studi Pada Perempuan di Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 23 Desember 2011

Yang menyatakan



(Rahmi Fitrianti)

ABSTRAK

Nama : Rahmi Fitrianti
Program Studi : Kekhususan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Program Pascasarjana Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidaksetaraan Gender dalam Pendidikan (Suatu Studi Pada Perempuan di Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang)

Tesis ini membahas tentang ketidaksetaraan gender dalam pendidikan di Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksetaraan gender dalam pendidikan bagi perempuan yang disebabkan oleh pengaruh akses, partisipasi, kontrol, manfaat serta nilai terhadap pendidikan. Faktor penting yang mendorong terciptanya ketidaksetaraan gender dalam pendidikan adalah nilai. Nilai yang ada membentuk stereotip negatif yang menyebabkan terjadinya marginalisasi, subordinasi dan beban kerja pada perempuan di Kecamatan Majalaya.

Kata kunci:

Ketidaksetaraan gender, pendidikan, perempuan

ABSTRACT

Name : Rahmi Fitrianti
Program : Planning and Development Evaluation Specialization of
Graduate Program Social Welfare Science Department
Faculty of Social and Political Science
Title : Factors that influences Gender Inequality in Education (A
Study on Women in Majalaya District, Karawang, West Java)

This thesis discusses gender inequality in education in Majalaya district, Karawang, West Java, by using an explanative qualitative approach. The result of the study shows that there is a gender inequality in women education influenced by the access, participation, control, benefits and value in the community. Value plays as an important influencing factor that creates gender inequality in education. The existing value in Majalaya district forms a negative stereotipe that causes women marginalization, subordination and over-load work.

Keyword:
Gender inequality, education, woman

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Permasalahan	4
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.4.1. Manfaat Praktis	9
1.4.2. Manfaat Akademik	9
1.5. Metode Penelitian	9
1.5.1. Pendekatan Penelitian	9
1.5.2. Jenis Penelitian	10
1.5.3. Lokasi Penelitian	10
1.5.4. Teknik Pemilihan Informan	11
1.5.5. Teknik Pengumpulan Data	13
1.5.6. Teknik untuk Meningkatkan Kualitas penelitian	14
1.5.7. Teknik Pengolahan dan Analisa Data	14
1.6. Sistematika Penulisan Tesis	15
2. TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1. Gender	17
2.2. Ketidaksetaraan Gender	20
2.3. Gender dalam Pendidikan	25
2.3.1. Pendidikan	26
2.3.2. Bias Gender dalam Pendidikan	30
2.3.3. Faktor-faktor Ketidaksetaraan Gender dalam Pendidikan	33
3. GAMBARAN UMUM DAN LOKASI	44
3.1. Gambaran Umum Demografis	44
3.2. Indeks Pembangunan Manusia	45
3.3. Kondisi Pendidikan	46
3.4. Organisasi Pendukung	50
4. HASIL TEMUAN LAPANGAN	52
4.1. Akses	52
4.1.1. Ketersediaan Sekolah	52

4.1.2. Jarak	54
4.1.3. Biaya	55
4.1.4. Hambatan Lain	56
4.2. Partisipasi	58
4.2.1. Faktor yang Mendorong Melanjutkan Sekolah	58
4.2.2. Alasan Terhentinya Sekolah	59
4.2.3. Perlakuan terhadap Saudara yang lain	60
4.2.4. Tanggung Jawab selain Sekolah	61
4.3. Kontrol	62
4.3.1. Pengambilan Keputusan mengenai Pendidikan	63
4.3.2. Pemilihan Jurusan	64
4.4. Manfaat	65
4.4.1. Hasil dari Pendidikan yang Ditempuh	65
4.4.2. Dampak dari Berhenti Sekolah	66
4.5. Nilai	67
4.5.1. Tradisi	67
4.5.2. Perbedaan Peranan Dalam Keluarga	69
4.5.3. Peranan Perempuan Saat ini	70
5. ANALISA	74
5.1. Pengaruh Nilai terhadap Terbentuknya Stereotip Bagi Perempuan....	75
5.2. Hubungan Stereotip terhadap Marjinalisasi Perempuan dalam Pendidikan	79
5.3. Hubungan Stereotip terhadap Pensubordinasian Perempuan dalam Pendidikan	83
5.4. Hubungan Stereotip terhadap Beban Kerja Bagi Perempuan	86
5.5. Hubungan Kekerasan dengan Ketidaksetaraan Gender dalam Pendidikan.....	88
6. KESIMPULAN DAN SARAN	92
6.1. Kesimpulan	92
6.2. Saran	96
DAFTAR REFERENSI	100
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel. 1.1 Karakteristik Informan	13
Tabel. 2.1 Konsep Gender	18
Tabel. 2.2 Definisi Ketidaksetaraan Gender	23
Tabel. 2.3 Penyebab Ketidaksetaraan Gender	25
Tabel. 2.4 Pendidikan	28
Tabel. 2.5 Ketidaksetaraan Gender dalam Pendidikan	33
Tabel. 3.1 Tabel Perkembangan IPM	45



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur Pikir	43
Gambar 3.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Karawang	44
Gambar 3.2 Perbandingan Usia menurut jenjang pendidikan	46
Gambar 3.3 Kemampuan Membaca dan Menulis Penduduk 10 tahun ke atas	47



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Karakteristik Informan
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 Taksonomi Data
- Lampiran 4 Dokumentasi



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara dan untuk itu setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Salah satu tujuan dari negara ini pun adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut Tillar (2005) "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara" (h.20).

Pendidikan tidak bisa dilepaskan dengan pembangunan karena keberhasilan pembangunan merupakan kontribusi pendidikan yang berkualitas termasuk didalamnya kesetaraan gender dalam pendidikan. Ketidaksetaraan pada sektor pendidikan telah menjadi faktor utama yang paling berpengaruh terhadap ketidaksetaraan gender secara menyeluruh. Sesuai yang diungkapkan Suryadi & Idris (2004) latar belakang pendidikan yang belum setara antara laki-laki dan perempuan menjadi faktor penyebab ketidaksetaraan gender dalam semua sektor seperti lapangan pekerjaan, jabatan, peran di masyarakat, sampai pada masalah menyuarakan pendapat (h.17).

Masalah kesetaraan gender pada bidang pendidikan sudah menjadi tuntutan yang sifatnya universal. Deklarasi dunia HAM menyatakan bahwa pendidikan adalah hak setiap orang, untuk itu orang harus mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan dengan tanpa membedakan jenis kelamin. Pada tataran internasional, telah disepakati kebijakan *education for all* di Dakar Senegal, dengan salah satu komponennya adalah kesetaraan gender bidang pendidikan (Nurhaeni, 2009b) :

1. Menjamin bahwa menjelang tahun 2015 semua anak, khususnya anak perempuan, anak-anak dalam keadaan sulit dan mereka yang termasuk

minoritas etnik mempunyai akses dalam menyelesaikan pendidikan dasar yang bebas dan wajib dengan kualitas yang baik.

2. Mencapai perbaikan 50 % pada tingkat *literacy* orang dewasa menjelang tahun 2015, terutama bagi kaum perempuan dan akses yang adil pada pendidikan dasar dan berkelanjutan bagi semua orang dewasa.
3. Menghapus disparitas gender di pendidikan dasar dan menengah menjelang tahun 2005 dan mencapai persamaan pendidikan menjelang tahun 2015 dengan suatu fokus jaminan bagi perempuan atas akses penuh dan prestasi yang sama dalam pendidikan dasar yang berkualitas baik.
4. Melaksanakan strategi-strategi terpadu untuk persamaan gender dalam pendidikan yang mengakui perlunya perubahan sikap, nilai dan praktek (h.1-2).

Untuk mencapai pendidikan dasar yang universal dan mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dituangkan pada MDGs tujuan 2 dan 3 yaitu pendidikan dasar untuk semua, mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (Suryasaputra, 2007, h.3).

Di dalam UUD 1945 pun telah mengamanatkan, bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pembangunan, termasuk pembangunan di bidang pendidikan. Dalam Undang-undang nomor 39 tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia yang memuat pasal-pasal yang mendukung kesetaraan pendidikan yang menjamin hak perempuan untuk memperoleh pendidikan, dalam pasal 48 : “wanita berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan”.

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa sistem pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Sejalan dengan itu Pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pasal 5 ayat 1

menetapkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pasal 6 ayat 1 menetapkan bahwa setiap warga negara berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

Untuk menyukseskan pembangunan, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, diperlukan pendidikan yang tinggi pula. Mengikutsertakan laki-laki dan perempuan dalam pembangunan, berarti memanfaatkan sumber daya insani yang potensial dalam pembangunan dan merupakan tindakan yang efisien dan efektif. Apalagi didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi di bawah latar belakang pendidikan yang tinggi pula. Sumber daya manusia yang berkualitas rendah akan merupakan beban bagi pembangunan. Oleh karena itu, pendidikan mempunyai arti yang sangat penting. Dengan meningkatnya pendidikan diharapkan kualitas sumber daya perempuan akan semakin meningkat, sehingga perempuan mampu memanfaatkan berbagai kesempatan dan peluang yang ada dengan sebaik-baiknya serta mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya seoptimal mungkin (Kintamani, 2008, h.1071).

Pendidikan yang rendah pada perempuan sangat berpengaruh pada akses terhadap sumber-sumber produksi di mana mereka lebih banyak terkonsentrasi pada pekerjaan informal yang berupah rendah (Dzuhayatin, 2002, h.45). Selain itu pengaruh pendidikan memperlihatkan kecenderungan semakin rendah tingkat pendidikan semakin besar ketidaksetaraan gender dalam sistem pengupahan (Suryadi & Idris, 2004, h.40-42). Selanjutnya menurut Suryadi (2001) rendahnya tingkat pendidikan penduduk perempuan akan menyebabkan perempuan belum bisa berperan lebih besar dalam pembangunan (h.11).

Peningkatan taraf pendidikan dan hilangnya diskriminasi gender dapat memberikan ruang bagi perempuan untuk berperan dalam pembangunan dan ikut menentukan kebijakan dibidang ekonomi, sosial dan politik (Suryadi, 2001, h.17-18). “Diskriminasi gender dalam pendidikan ialah perbedaan kesempatan atau perlakuan yang terjadi dalam sistem pendidikan, bukan karena kompetensi dan aspirasi yang dimilikinya namun semata-mata karena jenis kelaminnya” (Nurhaeni, 2009a, h. 26). Selain itu, perempuan harus memiliki akses yang adil

terhadap kesempatan pendidikan. “Melek huruf bagi perempuan merupakan kunci untuk meningkatkan kesehatan, gizi, dan pendidikan, dan untuk memberdayakan perempuan agar bisa berpartisipasi penuh dalam pembuatan keputusan dalam masyarakat “(Asian Development Bank, 2005, h.1).

Semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan diharapkan akan semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia. Perempuan yang berpendidikan lebih mampu membuat keluarganya lebih sehat dan memberikan pendidikan yang lebih bermutu pada anaknya, Selain itu perempuan berpendidikan lebih memiliki peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sebaliknya, perempuan yang pendidikannya kurang akan lebih rentan terhadap tindak kekerasan (fisik maupun non fisik), dan memiliki tingkat kesehatan dan ekonomi yang cenderung lebih rendah (Supiandi, 2001, h.56-58).

1.2 Rumusan Permasalahan

Sebagaimana latar belakang tersebut di atas, bahwa pendidikan merupakan hal yang penting di dalam upaya peningkatan pembangunan manusia. Pendidikan merupakan syarat utama membangun kapabilitas dasar manusia. Melalui pendidikan, khususnya pendidikan formal, seseorang dapat meningkatkan pengetahuannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai seseorang, semakin berpotensi dalam pengembangan diri untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik (Biro Pusat Statistik dan Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan, 2007, h. 3). Suryadi dan Idris (2004) menyatakan bahwa “kesetaraan gender dalam bidang pendidikan sangat penting karena sektor pendidikan merupakan sektor yang mempengaruhi kesetaraan gender secara menyeluruh” (h.17).

Salah satu aspek dalam menentukan peran serta perempuan dalam pembangunan adalah dengan meningkatkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi sehingga perempuan dapat ikut mempengaruhi pembangunan manusia. Dengan tingkat pendidikan perempuan yang lebih baik, perempuan diharapkan mampu menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya guna untuk kepentingan dirinya sendiri dan keluarga. Lebih lanjut, bila kelak berkeluarga diharapkan perempuan berkualitas juga akan melahirkan generasi-generasi yang

lebih berkualitas dan mampu berkontribusi terhadap pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara.

Pendidikan pada perempuan memiliki arti penting bagi peningkatan kualitas hidup manusia, hal itu telah mendorong banyak penelitian mengenai gender. Moser (1993, h.40-56) menyatakan ketidaksetaraan gender disebabkan karena akses, partisipasi dan kontrol yang tidak seimbang antara perempuan dan laki-laki terhadap sumber daya. Menurut Suleeman (1995) alasan ketimpangan gender dalam pendidikan disebabkan ketersediaan fasilitas, mahal biaya sekolah, dan investasi dalam pendidikan (h.229-244). Van Bemmelen (2003) menemukan bahwa ketimpangan gender meliputi akses perempuan dalam pendidikan, nilai gender yang dianut oleh masyarakat, nilai dan peran gender yang terdapat dalam buku ajar, nilai gender yang ditanamkan oleh guru dan kebijakan yang bias gender (h.4-10). Suryadi dan Idris (2004) mengategorikan faktor-faktor kesenjangan gender bidang pendidikan ke dalam 4 aspek yaitu akses, partisipasi, kontrol dan manfaat (h.158-164).

Namun dari banyaknya penelitian mengenai gender tersebut, belum banyak yang mencoba untuk menghubungkan pengaruh faktor-faktor ketidaksetaraan gender tersebut dengan ketidaksetaraan gender yang termanifestasikan dalam bentuk marjinalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan dan beban kerja ganda terhadap perempuan (Fakih, 2008, h. 13).

Penelitian ini mencoba menghubungkan faktor-faktor ketidaksetaraan gender dalam pendidikan yakni akses, partisipasi, kontrol, manfaat dan nilai mempengaruhi terciptanya ketidaksetaraan gender dalam pendidikan. Untuk mencoba menganalisa faktor-faktor tersebut mempengaruhi ketidaksetaraan gender, diambil Kabupaten Karawang di mana masih ditemukan ketidaksetaraan gender dalam bidang pendidikan. Berdasarkan data diketahui bahwa kemampuan membaca dan atau menulis huruf latin dan huruf lainnya penduduk usia diatas 10 tahun mencapai 90,76 persen dan sisanya sebanyak 9,24 persen masih buta huruf, dalam arti tidak memiliki kemampuan untuk membaca dan atau menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Sekitar 13,60 persen penduduk perempuan masih buta huruf dan penduduk laki-laki mengalami buta huruf hanya mencapai 5,08 persen. Hal terlihat bahwa peluang dan akses bagi

penduduk perempuan masih jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki, hal ini memperlihatkan masih adanya kesenjangan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan dalam mengakses pendidikan (Badan Perencanaan Daerah dan Biro Pusat Statistik Kabupaten Karawang, 2009)

Sebagian besar penduduk usia 10 tahun ke atas di Kabupaten Karawang berpendidikan kurang atau sama dengan SD sebanyak 63,57 persen, dan 27,84 persen diantaranya tidak memiliki ijazah dan 35,73 persen memiliki ijazah SD. Penduduk yang memiliki ijazah SMP sebanyak 18,88 persen, ijazah SLTA 10,10 persen, SMK 5,05 persen, dan sisanya sebanyak 2,40 persen memiliki ijazah dari perguruan tinggi. Rata-rata lama sekolah masyarakat di Kabupaten Karawang pada tahun 2009 adalah 6,78 tahun atau lulus sekolah Dasar (SD). Relatif rendahnya peningkatan pencapaian rata-rata lama sekolah dimungkinkan karena masih cukup besarnya penduduk dewasa di Kabupaten Karawang yang tingkat pendidikannya tidak tamat pendidikan dasar (Badan Perencanaan Daerah dan Biro Pusat Statistik Kabupaten Karawang, 2009).

Selain dari indikator di atas, ukuran dalam bidang pendidikan dapat dilihat dari banyaknya penduduk menurut jenjang pendidikan yang pernah diduduki, semakin tinggi persentase penduduk yang berpendidikan SD ke bawah menandakan kurang optimalnya program wajib belajar, sebaliknya semakin sedikit penduduk yang berpendidikan SD kebawah menandakan optimalnya program wajib belajar (Badan Perencanaan Daerah dan Biro Pusat Statistik Kabupaten Karawang, 2009). Hasil survei menunjukkan sebagian besar penduduk usia 15 tahun keatas di Kabupaten Karawang yang tidak mempunyai ijazah minimal SD yaitu sebanyak 30,21 persen (454.842 jiwa), dari jumlah tersebut kebanyakan perempuan yaitu 56,94 persen dibandingkan laki-laki yang 43,06 persen. Selain itu menurut data hanya sebesar 37,63 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menamatkan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Hanya sekitar 17,41 persen diantaranya penduduk yang mempunyai ijazah SMA keatas (Biro Pusat Statistik Kabupaten Karawang, 2010).

Keberadaan sarana pendidikan seperti sekolah di suatu daerah merupakan salah satu faktor penting yang dapat menyebabkan terhentinya seorang anak dalam mengenyam pendidikan (jenjang pendidikan SMP keatas) sehingga akan

menentukan besaran angka partisipasi sekolah anak usia SMP ke atas (13-24 tahun). Perbedaan jenis kelamin masih menjadi suatu alasan para orang tua dalam menyekolahkan anaknya. Kecenderungannya orang tua lebih berani menyekolahkan anak laki-laki dibandingkan perempuan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan tempat yang relatif jauh dengan harapan kelak mereka dapat membantu perekonomian keluarga di masa datang (Suleeman, 1995, h.229-240).

Pada tahun 2008 hasil pendataan menunjukkan bahwa di Kabupaten Karawang ada kurang lebih 167 desa tidak mempunyai sarana pendidikan SMP, dan 72 desa diantaranya, bila penduduknya yang ingin bersekolah ke SMP terdekat harus menempuh perjalanan lebih dari 3 km. Untuk jenjang pendidikan lebih tinggi ada kurang lebih 266 desa tidak mempunyai sarana pendidikan SMA, bila penduduknya ingin bersekolah ke SMA terdekat, sebanyak 68 desa harus menempuh 1-3 km, penduduk di 64 desa menempuh 3 - 5 km, penduduk di 99 desa menempuh 5 - 10 km dan penduduk di 45 desa harus menempuh lebih dari 10 km untuk sampai di sekolah. Hal ini bisa menjadi penyebab daya serap pendidikan di beberapa kecamatan kurang optimal karena setiap anak sekolah harus mengeluarkan biaya transport yang membebani sebagian biaya pendidikan, mungkin bila jarak yang ditempuh lebih dari 5 km, bahkan diatas 10 km akan menyebabkan biaya transport lebih tinggi dari biaya pokok pendidikannya itu sendiri (Badan Perencanaan Daerah dan Biro Pusat Statistik Kabupaten Karawang, 2009, h. 30).

Perlu dipahami juga persoalan pendidikan bukan sekedar sarana saja, tetapi kemampuan masyarakat yang terbatas untuk menyekolahkan anaknya, terutama masyarakat miskin. Akses untuk menempuh jenjang pendidikan SMP akan terasa sulit bilamana, lokasi atau jarak sarana yang ada sulit untuk dicapai dalam arti mengeluarkan biaya cukup mahal untuk transportasi yang sangat dihindari oleh penduduk miskin (Puspita, Herawati dan Hasrani, 2007, h.88).

Selain sarana prasarana sekolah sebagai media pendidikan, yang lebih penting adalah membuat sadar masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya paling tidak sampai SMP.

Ketidakpedulian orang tua dari keluarga miskin terhadap kebutuhan pendidikan anak-anaknya masih terasa kental, bahkan anak dipaksa untuk

bekerja agar dapat menambah penghasilan orang tua guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Pembangunan *human capital* yang memiliki arti dalam menaikkan kualitas pendidikan turut juga ditentukan oleh visi ke depan para orang tua di masyarakat kita. Tingkat kesadaran akan pentingnya pendidikan relatif masih rendah di beberapa kalangan masyarakat, khususnya pada golongan ekonomi menengah ke bawah. Selain itu masih terlihat cukup banyak "*kesalahan*" masyarakat dalam menentukan skala prioritas alokasi pola pengeluaran dalam kondisi ekonomi yang serba terbatas. Contohnya, secara umum masyarakat kita cenderung lebih konsumtif dalam membelanjakan uang untuk barang tahan lama. Budaya atau kebiasaan untuk menyelenggarakan perayaan pesta pernikahan atau khitanan secara besar-besaran di luar kemampuan ekonomi juga masih tampak. Mereka rela berhutang atau menjual harta benda untuk melakukan acara tersebut, karena menurut mereka semua itu merupakan representasi kebanggaan dan harga diri. Berbeda halnya ketika mereka harus menyisihkan untuk membeli keperluan sekolah atau buku-buku guna mendukung pendidikan. Hal ini sangat berat untuk dilaksanakan. Mereka mengeluh dengan argumen klasik yaitu "*tidak punya uang*" (Badan Perencanaan Daerah dan Biro Pusat Statistik Kabupaten Karawang, 2009, h.38).

Keadaan seperti ini memang tidak akan tuntas dalam waktu dekat, tetapi jika dibiarkan akan menjadi permasalahan pendidikan yang lebih serius dikemudian hari. Minimnya pendidikan di Kabupaten Karawang juga membawa dampak lebih buruk terhadap anak perempuan. Orang tua pasti lebih memilih anak laki-laki daripada perempuan. Apalagi untuk di daerah pedesaan, selain akses jarak, yang lebih sulit adalah budaya yang masih kuat yaitu kebanggaan orang tua untuk menikahkan anak perempuan di usia muda (Murni, 2010, h.324).

Oleh karenanya berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan ketidaksetaraan gender dalam bidang pendidikan bagi perempuan di Kabupaten Karawang?
2. Bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi ketidaksetaraan gender dalam bidang pendidikan di Kabupaten Karawang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menggambarkan faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksetaraan gender dalam bidang pendidikan bagi perempuan di Kabupaten Karawang.
2. Menganalisa faktor-faktor tersebut mempengaruhi ketidaksetaraan gender dalam bidang pendidikan di Kabupaten Karawang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Melalui hasil penelitian mengenai pengaruh faktor-faktor ketidaksetaraan gender terhadap ketidaksetaraan gender bagi perempuan, diharapkan dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan gender kabupaten Karawang untuk meminimalisir faktor-faktor tersebut sehingga terciptanya kesetaraan gender dalam bidang pendidikan.

1.4.2 Manfaat Akademik

1. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap kegiatan pengembangan kesetaraan gender khususnya dalam bidang pendidikan.
2. Menjadi bahan informasi, referensi dan kajian bagi para pemerhati, akademisi dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk mengetahui bagaimana akses, partisipasi, kontrol, manfaat dan nilai terhadap peluang/kesempatan bagi perempuan mempengaruhi ketidaksetaraan gender di bidang pendidikan

1.5 Metode Penelitian

1.5.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk bisa menangkap dan mengungkapkan ketidaksetaraan gender dalam pendidikan. Oleh karena itu diperlukan pendekatan penelitian yang mampu menjelaskan secara lengkap fenomena-fenomena tersebut. Pendekatan penelitian yang tepat digunakan untuk mendeskripsikan tujuan diatas adalah pendekatan kualitatif. Babbie dan Rubin (2008) mengatakan "... metode penelitian kualitatif berusaha untuk memanfaatkan makna yang lebih dalam dari

pengalaman manusia dan dimaksudkan untuk menghasilkan data kualitatif...” (h. 62).

Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan yang tepat pada penelitian ini karena membutuhkan data yang lebih mendalam mengenai ketidaksetaraan gender dalam bidang pendidikan. Data mengenai ketidaksetaraan gender dalam bidang pendidikan ini didapat melalui melalui pengalaman informan mengenai keadaannya saat menempuh pendidikan, sehingga akan terlihat bagaimana akses, partisipasi, kontrol, manfaat dan nilai terhadap pendidikan. Selain itu melalui suami informan akan digali lebih mendalam mengenai pengalaman/perasaan mereka terhadap nilai dalam keluarga.

1.5.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat eksplanatif. Alasan penggunaan jenis penelitian ini adalah untuk mengumpulkan informasi mengenai topik dan memiliki gambaran yang lebih jelas. Penelitian eksplanatif menurut Neuman (2006), yaitu “penelitian di mana tujuan utamanya adalah untuk menjelaskan, yang terjadi dan membangun, memperluas, atau menguji teori” (h. 35). Selain itu menurut Ritchie dan Lewis (2003) “salah satu klasifikasi dalam penelitian kualitatif dalam mengkaji fenomena sosial dapat menggunakan eksplanatif (*explanatory research*), yang ditujukan untuk mengkaji alasan, ataupun keterhubungan diantara fenomena yang dikaji” (h.27-28).

Dalam penelitian ini menjelaskan ketidaksetaraan gender dalam pendidikan bagi perempuan berdasarkan studi kasus terhadap informan, sehingga tergambar akses, partisipasi, kontrol, manfaat dan nilai terhadap kesempatannya saat menempuh pendidikan. Selanjutnya menjelaskan bagaimana faktor akses, partisipasi, kontrol, manfaat dan nilai mempengaruhi ketidaksetaraan gender dalam bentuk marjinalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan dan beban kerja ganda.

1.5.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Pertimbangan pemilihan Kabupaten Karawang menjadi lokasi penelitian karena

kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten yang ditemukan ketidaksetaraan gender dalam pendidikan dengan keadaan posisi laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan dengan ketidaksetaraan gender yang semakin meningkat dengan semakin tingginya jenjang sekolah hal itu sangat berbeda kontras dengan daerah yang menjadi perbatasan dengan Karawang. Selain itu Kabupaten Karawang juga dekat dari Jakarta sebagai ibu kota yang memiliki kesetaraan gender yang baik dalam pendidikan. Untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai ketidaksetaraan gender di Kabupaten Karawang maka dipilihlah kecamatan Majalaya.

Kecamatan Majalaya salah satu kecamatan dari 30 kecamatan yang ada di Kabupaten Karawang yang mempunyai 7 desa yaitu desa Pasir Jengkol, Majalaya, Ciranggon, Sarijaya, Benge, Lemah Mulya dan Pasir Mulya. Luas wilayah kecamatan Majalaya adalah 30,09 km² dengan jumlah penduduk sebesar 43.966 jiwa yang terdiri dari 22.698 laki dan 21.268 jiwa perempuan serta mempunyai kepadatan penduduk 1.461,15 jiwa/km². Mata pencaharian utama penduduk Kecamatan Majalaya. Kondisinya kepemilikan lahan hanya dimiliki oleh beberapa orang saja sedangkan yang lain hanya bekerja sebagai buruh tani.

Kecamatan Majalaya belum tersedia Taman Kanak-Kanak dan SLTA sehingga jika anak yang mau sekolah TK dan SLTA harus ke kecamatan lain. Pada tingkat SD tersedia 17 unit Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah murid sebanyak 4.021 orang, 2 unit Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP) dengan jumlah murid sebanyak 1.053 orang. Pelayanan kesehatan di Kecamatan Majalaya tersedia adalah sebanyak 1 unit Puskesmas, 1 unit Puskesmas Pembantu, dan 16 unit Balai Pengobatan. Pengamatan dan wawancara mendalam dilakukan pada bulan Oktober – Nopember 2011.

1.5.4. Teknik Pemilihan Informan

Dalam penelitian kualitatif ini, memilih informan atau situasi sosial tertentu dilakukan secara *purposive* yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pemilihan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, sesuai dengan yang dijelaskan oleh Alston & Bowles (2003), yaitu :

Teknik sampling ini memperbolehkan kita untuk memilih sampel sesuai tujuan penelitian. Kita mungkin telah mengetahui sebelumnya kelompok mana saja yang akan berguna untuk penelitian kita atau kita pilih subyek-subyek tersebut yang kita anggap sebagai contoh yang sesuai dengan isu yang kita akan pelajari (h.89).

Pada penelitian ini menggunakan informan yang terpilih benar-benar menguasai permasalahan, yakni dapat menceritakan pengalaman mengenai akses, partisipasi, kontrol, manfaat dan nilai saat menempuh pendidikan, sehingga diperoleh data unsur akses, partisipasi, kontrol, manfaat dan nilai mempengaruhi ketidaksetaraan gender di bidang pendidikan. Berdasarkan data yang ada dipilihlah Desa Majalaya, kemudian dari data tersebut disesuaikan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, sebagai awalan perlu dirancang siapa saja yang cocok untuk menjadi informan dengan membuat karakteristik informan. Pada penelitian ini kriteria informan yang dipakai yaitu :

- Perempuan, karena selama ini yang banyak mengalami ketidaksetaraan gender dalam pendidikan adalah perempuan.
- Berusia 30 – 40 tahun, karena untuk usia tersebut ketika menjalani pendidikan dasar pemerintah sudah mulai menggalakan program wajib belajar (Wajar) 9 tahun.
- Menikah dan memiliki anak, untuk melihat nilai yang dianut dalam keluarganya pada saat ini.
- Mempunyai saudara laki-laki, untuk melihat apakah adanya perbedaan perlakuan orang tua dalam partisipasi pendidikan di sekolah formal

Selanjutnya Informan dibagi berdasarkan peluang/kesempatan mereka terhadap pendidikan yang dapat diselesaikannya yaitu kesempatan/peluang tinggi yaitu informan yang telah menyelesaikan pendidikan minimal SLTA, kesempatan/peluang sedang yaitu informan yang telah menyelesaikan pendidikan wajib belajar 9 tahun (SMP) dan kesempatan/peluang rendah yaitu informan yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan wajib belajar. Selain itu akan diambil data mengenai nilai yang dianut dalam keluarga informan saat ini melalui suami informan.

Tabel. 1.1 Karakteristik Informan

No	Informasi Yang Dicari	Informan	Kriteria Informan	Jumlah
1.	Gambaran pengaruh akses, partisipasi, kontrol, manfaat dan nilai terhadap pendidikan bagi perempuan terhadap ketidaksetaraan gender	Perempuan berusia 30-40 tahun, menikah, Berdomisili di Karawang, mempunyai saudara laki-laki.	Pendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	3
2.	Gambaran mengenai nilai yang dianut dalam keluarga	Suami	Pendidikan minimal lulus wajib belajar (WAJAR)	3
3.			Pendidikan tidak lulus wajib belajar (WAJAR)	3
4.			Berdomisi di Karawang;	9

Sumber: Olahan Peneliti

1.5.5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

- Studi literatur, dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan referensi yang berkaitan dengan pendidikan berdasarkan gender. Buku, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya merupakan sumber untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan tema tesis dan bermanfaat untuk memperoleh kerangka pemikiran dan analisa data yang diperoleh. Selain itu penelusuran terhadap dokumen atau arsip-arsip yang berkaitan dengan permasalahan penelitian seperti brosur, pedoman umum, profil daerah untuk mendukung data terkait sesuai dengan tema penelitian.
- *In-depth Interview* yaitu wawancara mendalam tidak terstruktur yang dilakukan secara individu. Pertanyaan yang dilontarkan untuk menggali data, informasi dan pengalaman partisipan adalah pertanyaan terbuka berkaitan dengan kondisi yang dialami oleh informan. Teknik pengumpulan data

dengan wawancara mendalam ini menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur.

- Observasi, terhadap situasi, kondisi, sumber informasi dan perilaku informan selama proses penelitian dengan teknik observasi non-partisipan. Observasi dilakukan langsung oleh peneliti saat turun ke lapangan yang bertujuan untuk mengamati faktor-faktor ketidaksetaraan gender.

1.5.6. Teknik Untuk Meningkatkan Kualitas Penelitian

Sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas penelitian kualitatif maka digunakan beberapa teknik antara lain dengan melakukan triangulasi. Menurut Krefting (1991) "triangulasi adalah salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas penelitian kualitatif, khususnya apabila dilihat dari kriteria kredibilitasnya, di mana dalam meningkatkan kualitas penelitian ini dengan cara mencari atau mengumpulkan informasi dari beberapa sumber atau informan" (h.219). Informasi atau data tersebut dapat dibandingkan antara satu dengan yang lainnya. Triangulasi dilakukan dengan cara mengecek antara data yang satu dengan data yang lainnya. Data yang dimaksudkan antara lain berasal dari observasi dalam penelitian serta informasi yang didapat dari berbagai informan seperti suami untuk mendukung data pendidikan serta nilai yang berhubungan dengan peran gender. Dengan kata lain, triangulasi ini digunakan untuk mendapatkan kepastian data yang didapat atau untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai data dan informasi.

1.5.7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, buku, jurnal, hasil penelitian dan sebagainya. Setelah itu dilakukan reduksi data yaitu merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Kemudian dilakukan penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Setelah selesai tahap selanjutnya adalah penafsiran data dalam mengolah hasil sementara menjadi teori substantif.

Menurut Miles & Huberman (1984) aktivitas dalam pengolahan data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas tersebut adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2010, h. 246).

Analisis data disajikan dengan menggunakan kutipan verbatim dari informan sebagai data. Selain kutipan verbatim yang dimaksud data adalah transkrip interview, observasi, jurnal, dokumen literature, foto, website, email dan sebagainya. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Menurut Nasution, analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian (Sugiyono, 2010, h. 245). Oleh karena itu dalam penelitian ini maka analisis data dilakukan sejak sebelum, selama dan setelah selesai penelitian lapangan.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN TESIS

Secara garis besar rencana sistematika penulisan tesis ini dapat dijabarkan dalam enam bab. Bab 1, menyajikan pendahuluan yang memuat latar belakang, permasalahan mengenai ketidaksetaraan gender dalam bidang pendidikan, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian.

Bab 2 menyajikan uraian mengenai konsep-konsep yang terkait dengan tema penelitian yaitu permasalahan ketidaksetaraan gender dalam bidang pendidikan.

Bab 3 mendeskripsikan wilayah, penduduk, dan pendidikan di Kabupaten Karawang.

Bab 4 merupakan bab yang memuat temuan lapangan dan pembahasan. Pada bab ini dijelaskan secara rinci hasil temuan lapangan sesuai dengan tujuan penelitian.

Bab 5 merupakan pembahasan terhadap hasil temuan lapangan menggunakan kerangka pemikiran pada bab 2 sebagai alat analisis, dengan tujuan untuk memperoleh hasil pembahasan yang tajam, dalam dan menyeluruh sehingga dapat menjawab semua pertanyaan penelitian

Bab 6 memuat tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan. Bab ini adalah merupakan bab terakhir yang memuat jawaban terhadap permasalahan utama penelitian ini, serta rekomendasi yang akan diajukan kepada berbagai pihak yang berkepentingan dan berminat dengan hasil penelitian ini.



BAB 2

KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini merupakan bab yang menguraikan hasil kajian dari berbagai literatur yang mendukung untuk membangun kerangka pemikiran dari sebuah penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksetaraan gender dalam pendidikan.

2.1 Gender

Untuk memahami gender, perlu dibedakan dengan jenis kelamin agar tidak terjadi kerancuan mengenai pengertian gender. Secara umum gender mengidentifikasi laki-laki dan perempuan berdasarkan perbedaan sosial budaya sehingga membentuk peran yang diberikan kepada atau dilakukan oleh perempuan dan laki-laki dalam suatu masyarakat tertentu dan dapat berubah. Sedangkan jenis kelamin merupakan pembagian yang ditentukan secara biologis.

Unger dan Crawford (1992), memisahkan antara jenis kelamin dengan gender, dengan pemahaman bahwa gender merupakan konstruksi sosial, sedangkan jenis kelamin didefinisikan sebagai perbedaan biologis dalam komposisi genetik, fungsi dan anatomi reproduksi (h.15-20). Hal yang senada juga diungkapkan Moser (1989) yang menyatakan “gender adalah peran sosial yang terbentuk dalam masyarakat, bagaimana laki-laki dan perempuan memainkan peranan yang berbeda dalam masyarakat. Perbedaan peran gender ini terbentuk oleh faktor-faktor ideologis, sejarah, etnis, ekonomi dan kebudayaan” (h. 1801). Grewal & Kaplan (2002) menegaskan bahwa “perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan bukan secara biologis, melainkan terbentuk melalui proses sosial dan kultural. Oleh karena itu gender berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat bahkan dari kelas ke kelas, sementara jenis kelamin biologis (sex) akan tetap tidak berubah” (h. 10).

Menurut Mosse (2007) secara mendasar gender berbeda dari jenis kelamin. Jenis kelamin secara biologis merupakan pemberian, dilahirkan sebagai seorang laki-laki atau perempuan, sedangkan gender adalah seperangkat peran sosial yang menyebabkan seseorang itu maskulin atau feminin, yang mencakup penampilan,

pakaian, sikap, kepribadian, bekerja di dalam atau di luar rumah tangga, tanggung jawab keluarga dan sebagainya secara bersama membentuk peran gender. Peran gender ini berubah seiring waktu dan berbeda antara satu kultur dengan kultur lainnya, yang dipengaruhi oleh kelas sosial, usia dan latar belakang etnis. Gender menentukan berbagai pengalaman hidup, yang dapat menentukan akses terhadap pendidikan, kerja, alat-alat dan sumber daya yang diperlukan untuk industri dan keterampilan (h.2-6).

Ostergaard (1997) menyatakan gender mengacu pada karakter kualitatif dan saling bergantung sesuai posisi perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Relasi gender dibentuk dalam hubungan kekuasaan dan dominasi struktur kesempatan hidup perempuan dan laki-laki, pembagian gender tidak tetap secara biologis tetapi merupakan suatu aspek dari pembagian kerja sosial yang lebih luas dan pada gilirannya berakar pada kondisi produksi dan reproduksi yang diperkuat oleh sistem budaya, agama dan ideologi yang berlaku dalam masyarakat (h. 5).

Bradley (2007) melengkapi bahwa gender adalah suatu konstruksi sosial yang mengkategorikan perempuan dan laki-laki berdasarkan persepsi dan perasaan. Gender bukanlah sesuatu yang tetap tetapi sesuatu yang bervariasi berdasarkan waktu, tempat, budaya serta pengalaman hidup (h. 3).

Tabel. 2.1 Konsep Gender

Unger & Crawford (1992)	Gender merupakan perbedaan antara perempuan dan laki yang dikonstruksi secara sosial bukan berdasarkan perbedaan biologis semata.
Moser (1989)	Gender adalah peran sosial yang terbentuk dalam masyarakat, Perbedaan peran gender ini terbentuk oleh faktor-faktor ideologis, sejarah, etnis, ekonomi dan kebudayaan.
Grewal & Kaplan (2002)	Gender adalah perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan bukan secara biologis, melainkan terbentuk melalui proses sosial dan kultural. Gender dapat berubah sementara jenis kelamin biologis akan tetap tidak berubah.

(sambungan)

Mosse (2007)	Gender merupakan seperangkat peran yang diberikan kepada perempuan dan laki-laki, bukan secara biologis dan peran ini dapat berubah sesuai dengan budaya, kelas sosial, usia dan latar belakang etnis. Gender menentukan berbagai pengalaman hidup, yang dapat menentukan akses terhadap pendidikan, kerja, alat-alat dan sumber daya.
Ostergaard (1997)	Gender berkaitan dengan kualitas dan relasi yang dibentuk dalam hubungan kekuasaan dan dominasi dalam struktur kesempatan hidup perempuan dan laki-laki, pembagian kerja yang lebih luas dan pada gilirannya berakar pada kondisi produksi dan reproduksi yang diperkuat oleh sistem budaya, agama dan ideologi yang berlaku dalam masyarakat.
Bradley (2007)	Gender adalah suatu konstruksi sosial yang mengkategorikan perempuan dan laki-laki berdasarkan persepsi dan perasaan. Gender bervariasi berdasarkan waktu, tempat, budaya serta pengalaman hidup.

Sumber: Olahan Peneliti

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut diatas, dapat dibedakan secara jelas pengertian gender dan jenis kelamin beserta implikasi yang ditimbulkannya. Jenis kelamin adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki, berlaku secara umum, tidak dapat berubah, dan merupakan kodrat dari Tuhan. Sedangkan gender lebih berhubungan dengan perbedaan perempuan dan laki-laki sebagai hasil konstruksi sosial, budaya dan psikologis.

Sifat perempuan dibedakan dengan sifat laki-laki, yang dikenal dengan sifat feminin yang dilekatkan pada perempuan dan sifat maskulin yang dilekatkan sebagai sifat laki-laki. Perbedaan tersebut menyebabkan pembagian peran di dalam masyarakat yang telah dikonstruksi secara sosial budaya.

2.2 Ketidaksetaraan Gender

Pembagian peran, tidak akan menjadi masalah selama perempuan dan laki-laki diperlakukan secara adil, sesuai kebutuhannya dan tidak merugikan salah satu jenis kelamin. Namun apabila pengklasifikasian *feminim* dan *maskulin* digunakan sebagai dasar untuk memperlakukan kedua jenis kelamin secara berbeda dan merugikan salah satu jenis kelamin, maka telah terjadi ketidaksetaraan gender.

Dengan kata lain, ketika masyarakat memperlakukan perempuan dan laki-laki secara diskriminatif bukan karena kompetensinya, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan tetapi semata-mata karena jenis kelamin, maka bisa dikatakan telah terjadi ketidaksetaraan gender (Nurhaeni, 2009b, h.25-27). Selanjutnya menurut Chafetz (1991) ketidaksetaraan berdasarkan gender mengacu pada ketidakseimbangan akses sumber-sumber yang langka dalam masyarakat. Sumber-sumber yang penting itu meliputi kekuasaan barang-barang material, jasa yang diberikan orang lain, prestise, perawatan medis, otonomi pribadi, kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan, serta kebebasan dari paksaan atau siksaan fisik (h.233-256).

Ketidaksetaraan gender merupakan sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki atau perempuan menjadi korban dari sistem tersebut (Fakih, 2008, h.12). Perwujudan ketidaksetaraan tersebut saling berkaitan, berhubungan dan saling mempengaruhi secara dialektis. Namun, yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidaksetaraan, terutama terhadap kaum perempuan. Untuk memahami bagaimana perbedaan gender menyebabkan ketidaksetaraan gender, Fakih (2008, h.13-16) membagi manifestasi ketidaksetaraan gender:

a. Gender dan Marjinalisasi

Marjinalisasi adalah suatu proses penyisihan yang mengakibatkan kemiskinan yang menimpa kaum laki-laki dan perempuan. Marjinalisasi bisa disebabkan karena bencana alam, proses eksploitasi atau kebijakan pembangunan. Marjinalisasi bagi perempuan sering terjadi karena keyakinan gender. Contoh adanya indikasi marjinalisasi antara lain promosi jabatan/diklat lebih diprioritaskan untuk laki-laki karena keyakinan pimpinan perusahaan atau pendidikan perempuan umumnya

lebih rendah sehingga hanya mampu memasuki sektor pekerjaan subsistem dengan upah yang rendah (Nurhaeni, 2009a, h.28). Dalam bidang pendidikan apabila keuangan terbatas, pilihan yang harus sekolah terlebih dahulu adalah anak laki-laki dengan asumsi anak laki-laki yang akan menjadi pencari nafkah keluarga, walaupun anak perempuannya lebih pandai (Noerdin, Aripurnami & Hodijah, 2005, h.59). Marjinalisasi kaum perempuan dapat terjadi dalam rumah tangga, masyarakat, atau kultur, dan bahkan negara yang diperkuat oleh adat istiadat maupun tafsir keagamaan.

b. Gender dan Subordinasi

Subordinasi adalah sikap atau tindakan masyarakat yang menempatkan satu jenis kelamin lebih rendah dari jenis kelamin yang lain. Subordinasi ini didasari adanya keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Hal ini bisa menimbulkan subordinasi terhadap kaum perempuan. Anggapan bahwa perempuan itu irrasional dan emosional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin, berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting. Subordinasi karena gender tersebut terjadi dalam segala macam bentuk yang berbeda dari tempat ke tempat dan dari waktu ke waktu. Dalam rumah tangga masih sering terdengar jika keuangan keluarga sangat terbatas, dan harus mengambil keputusan untuk menyekolahkan anak-anaknya, maka anak laki-laki akan mendapat prioritas utama. Pandangan yang sifatnya subordinasi mengakibatkan perempuan tidak mempunyai kewenangan untuk mengontrol dirinya sehingga pada akhirnya perempuan tidak dapat memperoleh manfaat yang setara dalam pembangunan dibandingkan laki-laki. "Selain itu dalam bidang pendidikan anak laki-laki didahulukan dari perempuan, karena anggapan perempuan setelah menikah tidak bekerja lagi dan lebih banyak menjadi ibu rumah tangga serta bertanggung jawab dalam kerja reproduktif" (Noerdin, Aripurnami & Hodijah, 2005, h.58).

c. Gender dan Stereotip

Secara umum stereotip adalah pelabelan atau penandaan pada suatu kelompok tertentu. Stereotip yang merugikan menimbulkan ketidakadilan

terhadap jenis kelamin tertentu, yang umumnya perempuan. Misalnya penandaan yang asalnya dari asumsi bahwa perempuan bersolek merupakan upaya memancing lawan jenisnya, maka setiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan stereotip ini. Bahkan jika ada pemerkosaan yang dialami perempuan, masyarakat cenderung menyalahkan korbannya. Masyarakat memiliki anggapan bahwa tugas utama kaum perempuan adalah melayani suami, stereotip ini menjadi wajar sekali jika pendidikan kaum perempuan dinomorduakan.

d. Gender dan Kekerasan (*violence*).

Gender dan kekerasan adalah serangan atau invasi atas fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender ini disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat.

Kekerasan terhadap sesama manusia berasal dari berbagai sumber, namun kekerasan terhadap salah satu jenis kelamin tertentu diakibatkan oleh anggapan gender. Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender ini disebut *gender relative violence*. Nurhaeni (2009a) mengklasifikasikan bentuk-bentuk kekerasan menjadi :

- Kekerasan fisik (menampar, memukul, menarik rambut, menyulut dengan rokok, melukai dengan senjata dan mengabaikan kesehatan istri).
- Kekerasan psikologis atau emosional (penghinaan, komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan atau melukai harga diri pihak lain).
- Kekerasan seksual (pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya, pemaksaan hubungan seksual, pemerkosaan, menyentuh bagian tubuh perempuan atau anak-anak).
- Kekerasan ekonomi (tidak memberi nafkah pada istri, memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomi untuk mengontrol kehidupan istri dan lain-lain) (h.31-32).

e. Gender dan Beban Kerja

Beban kerja adalah pembagian tugas/tanggung jawab yang memberatkan. Anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin,

serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, mengakibatkan semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab perempuan. Konsekuensinya, banyak kaum perempuan yang harus bekerja keras dalam waktu lama untuk menjaga kebersihan dan kerapian rumah tangganya, mulai dari membersihkan mengepel lantai, memasak, mencuci, hingga mengurus anak. Di kalangan keluarga miskin, beban yang sangat berat ini harus ditanggung oleh kaum perempuan sendiri. Terlebih jika perempuan tersebut harus bekerja, maka harus memikul beban kerja ganda. Bias gender yang mengakibatkan beban kerja tersebut sering kali diperkuat dan disebabkan oleh adanya pandangan atau keyakinan di masyarakat bahwa jenis pekerjaan perempuan seperti semua pekerjaan domestik dianggap dan dinilai lebih rendah dibandingkan dengan pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan laki-laki, serta dikategorikan sebagai tidak produktif sehingga tidak diperhitungkan dalam statistik ekonomi negara. Sementara itu kaum perempuan, karena anggapan gender ini sejak dini telah disosialisasikan untuk menekuni peran gender mereka. Di lain pihak kaum lelaki tidak diwajibkan secara kultural untuk menekuni pekerjaan domestik itu. Kesemuanya ini telah memperkuat pelanggaran secara struktural dan kultural beban kerja kaum perempuan.

Tabel. 2.2 Definisi Ketidaksetaraan Gender

Nurhaeni (2009a)	Ketidaksetaraan gender adalah perlakuan diskriminatif/berbeda yang diterima perempuan atau laki-laki. Perlakuan ini diberikan bukan berdasarkan atas kompetensi, aspirasi dan keinginannya sehingga merugikan salah satu jenis kelamin.
Fakih (2008)	Ketidaksetaraan gender adalah ketidakadilan bagi perempuan atau pun laki-laki berdasarkan sistem dan struktur yang ada. Manifestasi yaitu marjinalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan dan beban kerja.

Sumber: Olahan Peneliti

Selain definisi dan manifestasi ketimpangan gender yang telah dijelaskan, penyebab ketidaksetaraan gender diungkapkan oleh Overholt (1986) yang menyatakan ketidaksetaraan gender dipengaruhi oleh:

- a. Akses, siapa yang mempunyai akses terhadap sumber daya produktif termasuk sumber daya alam seperti tanah, hutan, peralatan, pekerja, kapital atau kredit, pendidikan atau pelatihan
- b. Kontrol adalah kemampuan dalam mengambil keputusan atau mengontrol penggunaan sumber daya yang berupa ekonomi, politis, sosial dan waktu.
- c. Manfaat yaitu apa yang diperoleh dari melakukan aktivitas/kegiatan (Handayani, 2001, h.155).

Sedangkan menurut Moser (1993) lebih menekankan pada faktor penyebab ketidaksetaraan gender yaitu:

- a. Akses, kesenjangan gender disini terlihat dari adanya perbedaan akses antara laki-laki dan perempuan terhadap sumber daya seperti kepemilikan tanah. Lebih rendahnya akses mereka terhadap sumber daya menyebabkan produktivitas perempuan cenderung lebih rendah dari laki-laki. Selain itu dalam banyak komunitas, perempuan diberi tanggung jawab melaksanakan hampir semua pekerjaan domestik sehingga tidak mempunyai cukup waktu untuk mengurus dan meningkatkan kemampuan dirinya.
- b. Partisipasi adalah pelibatan atau keterwakilan yang sama antara perempuan dan laki-laki, namun partisipasi perempuan dalam angkatan kerja terhambat oleh komitmen rangkap tiga mereka yakni reproduktif, produktif dan kerja komunitas.
- c. Kontrol adalah kekuasaan untuk memutuskan bagaimana menggunakan sumber daya dan siapa yang memiliki akses terhadap penggunaan sumber daya tersebut. Perempuan seringkali memiliki akses tetapi tidak memiliki kontrol terhadap sumber daya. Posisi perempuan dalam pengambilan keputusan harus diperhatikan agar keputusan tersebut dapat mewakili kebutuhan dan kepentingan perempuan tersebut (h.40-56).

Tabel. 2.3 Penyebab Ketidaksetaraan Gender

Chafetz (1991)	Ketidaksetaraan gender yang disebabkan oleh ketidakseimbangan akses yang dimiliki oleh perempuan atau laki-laki dalam mendapatkan perawatan, kesempatan pendidikan dan kebebasan.
Overholt (1986)	Ketidaksetaraan gender dipengaruhi oleh akses, kontrol dan manfaat terhadap sumber daya produktif.
Moser (1993)	Ketidaksetaraan gender disebabkan oleh akses, partisipasi dan kontrol yang tidak seimbang bagi perempuan dalam mencapai sumber daya.

Sumber: Olahan Peneliti

Manifestasi ketidaksetaraan gender dalam bentuk marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan dan beban kerja telah terjadi di berbagai tingkatan, bidang dan mengakar dari mulai keyakinan di setiap masing-masing orang, keluarga, hingga tingkat negara yang bersifat global. Salah satu ketidaksetaraan gender yang berkembang dalam masyarakat adalah bidang pendidikan. Untuk melihat bagaimana terciptanya ketidaksetaraan gender dalam pendidikan, perlu dilihat faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksetaraan tersebut.

2.3 Gender dalam Pendidikan

Ketidaksetaraan gender bidang pendidikan banyak merugikan perempuan, hal tersebut dapat dilihat, Anak perempuan merupakan pihak yang paling rentan terhadap kecenderungan putus sekolah apabila keuangan keluarga tidak mencukupi, hal ini disebabkan oleh pandangan kultural yang mengutamakan anak laki-laki, baik sebagai penerus keluarga maupun sebagai pencari nafkah (Murni, 2010, h.320-322), senada hal tersebut Noerdin, Agustini, Pakasi, Aripurnami dan Hodijah (2006) menyatakan “anak perempuan yang tidak menamatkan sekolahnya, salah satu alasannya kultural, yaitu masih kuatnya budaya kawin muda dan perempuan harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan rumah tangga” (h.18). Pendidikan yang rendah pada perempuan sangat berpengaruh pada akses

terhadap sumber-sumber produksi dimana mereka lebih banyak terkonsentrasi pada pekerjaan informal yang berupah rendah (Dzuhayatin, 2002, h.45). Selain itu pengaruh pendidikan memperlihatkan kecenderungan semakin rendah tingkat pendidikan semakin besar ketidaksetaraan gender dalam sistem pengupahan (Suryadi & Idris, 2004, h.40-42).

Bidang pendidikan dipandang sangat penting karena sektor pendidikan merupakan sektor yang paling strategis untuk memperjuangkan kesetaraan gender. Sebelum memahami gender dalam pendidikan, perlu dipahami dahulu mulai dari pendidikan itu sendiri.

2.3.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (*life skills*) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional .

Pendidikan berkenaan dengan perkembangan dan perubahan kelakuan anak didik. Pendidikan bertalian dengan transmisi pengetahuan, sikap, kepercayaan, keterampilan dan aspek-aspek kelakuan lainnya kepada generasi muda. Pendidikan adalah proses mengajar dan belajar pola-pola kelakuan manusia menurut apa yang diharapkan oleh masyarakat. Pendidikan dimulai dengan interaksi pertama individu itu dengan anggota masyarakat lainnya. Dalam definisi ini tidak diadakan perbedaan antara orang tua dengan anak, antara guru dengan murid. Yang diutamakan ialah adanya hubungan yang erat antara individu dengan masyarakat. Belajar adalah sosialisasi yang kontinu. Setiap individu dapat menjadi murid dan menjadi guru. Individu belajar dari lingkungan sosialnya dan juga mengajar dan mempengaruhi orang lain (Nasution, 2010, h.10).

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan seluruh aspek yang ada di dalam kehidupan kita, baik orang terdekat, masyarakat ataupun lembaga-lembaga yang ada, baik yang terjadi secara formal maupun nonformal dengan tujuan untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan tidak baik menjadi kebiasaan baik yang terjadi selama kita hidup untuk memperbaiki kualitas diri menjadi lebih baik dan mampu menjawab tantangan di masa depan yang bertalian dengan transmisi pengetahuan, sikap, kepercayaan, keterampilan dan aspek-aspek kelakuan lainnya.

Pendidikan formal merupakan salah satu bagian dari sistem pendidikan. Hal ini baik ditinjau dari aspek formal maupun aspek lingkungan meliputi pendidikan di lingkungan keluarga, pendidikan di lingkungan masyarakat dan pendidikan di lingkungan sekolah. Pendidikan di lingkungan sekolah inilah yang sering disebut dengan pendidikan formal, sedang pendidikan di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat disebut pendidikan luar sekolah.

Apabila dilihat perbedaannya terletak pada persyaratan secara formal, antara lain bahwa pendidikan formal mempunyai persyaratan berjenjang dan pendidikan luar sekolah tidak mempersyaratkan perjenjangan. Pendidikan formal terstandarisir didalam jenjangnya, lama belajarnya, kurikulum, persyaratan unsur-unsur pengelolaannya, persyaratan usia dan tingkat pengetahuan/kemampuan, prosedur evaluasi hasil belajarnya, konsekuensi penyajian materi dan latihannya dan bahkan pada persyaratan presensi, waktu liburan serta dana sumbangan pendidikannya (Faisal, 1991, h. 48).

Tugas pendidikan formal yang utama adalah mengajarkan bagaimana cara belajar, menanamkan motivasi yang kuat dalam diri anak didik untuk belajar terus sepanjang hidupnya, memberikan keterampilan anak didik untuk secara lincah dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat yang berubah begitu cepat dan mengembangkan daya adaptabilitas yang besar dalam diri anak didik (Joesoef, 1979, h.26).

Nasution (2010) menyatakan pendidikan mempunyai andil yang cukup besar terhadap berbagai kehidupan. Ditinjau dari bidang ekonomi, pendidikan memungkinkan untuk :

- Memelihara dan mengembangkan sumber-sumber alam yang dimiliki.

- Memungkinkan mereka hidup dalam lingkungan yang lebih menyenangkan dan sehat.
- Menguasai kebiasaan dan prinsip hidup pribadi dan lingkungan yang sehat.
- Memiliki motivasi dalam mengasuh dan mendidik anak secara tepat, sehingga peranan pendidikan keluarga menjadi sangat besar dan penting
- Meningkatkan produktivitas. (h. 30-31).

Adapun keluaran pendidikan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia ditandai dengan meningkatnya produktivitas masing-masing individu yang selanjutnya mendorong pada produktivitas secara umum.

Menurut Suryadi (1997), pendidikan sebagai salah satu bentuk kegiatan pengembangan SDM pada dasarnya memiliki 3 peran yaitu

- Pendidikan sebagai bentuk konsumsi, yaitu barang dan jasa yang dibutuhkan secara langsung serta dapat meningkatkan kesejahteraan manusia yang dapat dinikmati saat ini.
- Pendidikan sebagai sarana investasi yang akan membantu meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan keahlian tenaga kerja sebagai modal untuk bekerja secara lebih produktif sehingga dapat meningkatkan penghasilan di masa datang.
- Pendidikan sebagai sarana mewujudkan keadilan dan pemerataan, diharapkan dapat terwujud karena adanya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan.

Tabel 2.4 Konsep Pendidikan

Nasution (2010)	Pendidikan adalah interaksi individu dengan anggota masyarakat, yang berkaitan dengan perubahan dan perkembangan yang berhubungan dengan pengetahuan, sikap, kepercayaan dan keterampilan.
Faisal (1991)	Pendidikan formal adalah pendidikan yang telah distandarisasi dalam jenjang, kurikulum, materi pembelajaran, evaluasi dan dana yang dikeluarkan.
Joesoef (1979)	Pendidikan berkaitan dengan pendidikan formal, yang mengajarkan cara belajar, pemberian motivasi, dan keterampilan sehingga dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat.

(sambungan)

Suryadi (1997)	Pendidikan adalah salah bentuk kegiatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki 3 peran yakni : pendidikan sebagai bentuk konsumsi, pendidikan sebagai investasi dan pendidikan sebagai sarana mewujudkan keadilan dan pemerataan.
---------------------------	--

Sumber: Olahan Peneliti

Dapat dikatakan bahwa Pendidikan berfungsi untuk meneruskan nilai dari pendidik (guru atau dosen) kepada anak didik (siswa atau mahasiswa). Dalam kaitannya dengan pendidikan, dapat dibedakan sebagai berikut. (1) Pendidikan formal, yakni pendidikan melalui bangku sekolah, direncanakan, dilembagakan dan bertata tingkat, seperti TK, SD dan seterusnya sampai perguruan tinggi. (2) Pendidikan non formal, yakni pendidikan di luar bangku sekolah, tetapi direncanakan, seperti penyuluhan, kursus-kursus, penataran dan lainnya. (3) Pendidikan informal, yakni pendidikan di luar bangku sekolah yang tidak direncanakan, tetapi berlangsung seumur hidup, seperti membaca surat kabar dan media cetak lainnya, mengikuti teladan dari orang tua, mengikuti perilaku dari sahabat atau kerabat, dan lain-lainnya.

Melihat pentingnya pendidikan dan memiliki andil dalam relasi gender, pemerintah juga mengaturnya dalam Undang-undang.

Berdasarkan UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal dan informal. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan menengah yang berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat (Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Statistik Pendidikan, 2010).

Konstitusi Indonesia menjamin hak warga Negara untuk mendapatkan pendidikan tanpa membedakan jenis kelamin. Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 mengamanatkan bahwa “semua warga negara berhak mendapat pengajaran” dan pasal 28b ayat 2 dari UUD 1945 mengatakan bahwa “setiap anak berhak atas

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal ini dikuatkan oleh pasal 28c ayat 1 yang berbunyi : “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat”.

Selain dijamin dalam konstitusi, ternyata komitmen internasional yang dituangkan dalam dokumen Deklarasi Dakar tentang Pendidikan menyatakan bahwa “..... pada 2015 semua anak telah mendapat pendidikan dasar Sembilan tahun, termasuk anak-anak perempuan” (Departemen Pendidikan Nasional, 2005a, h.5). Salah satu bagian dari deklarasi tersebut menyatakan akan:

... menghapus disparitas gender dalam pendidikan dasar dan menengah menjelang tahun 2005 dan mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan menjelang tahun 2015 dengan fokus pada kepastian akses anak perempuan terhadap pendidikan dasar yang bermutu (Departemen Pendidikan Nasional, 2005a, h.5) .

Terkait dengan hal tersebut , sesungguhnya ketika pendidikan bukan hanya dianggap dan dinyatakan sebagai sebuah unsur utama dalam upaya pencerdasan bangsa melainkan juga sebagai produk atau konstruksi sosial, seperti juga gender yang merupakan konstruksi sosial maka dengan demikian pendidikan juga memiliki andil bagi terbentuknya relasi gender di masyarakat.

2.3.2 Bias Gender dalam Pendidikan

Pendidikan memiliki arti penting dalam terbentuknya relasi gender di masyarakat, namun diasumsikan pendidikan dapat memunculkan bias gender. Diantara aspek yang menunjukkan adanya bias gender dalam pendidikan dapat dilihat pada perumusan kurikulum dan juga rendahnya kualitas pendidikan. Implementasi kurikulum pendidikan sendiri terdapat dalam buku ajar yang digunakan di sekolah-sekolah. Realitas yang ada, dalam kurikulum pendidikan (agama ataupun umum) masih terdapat banyak hal yang menonjolkan laki-laki berada pada sektor publik sementara perempuan berada pada sektor domestik.

Bias gender tersebut menyebabkan ketidaksetaraan gender di masyarakat. Ketidaksetaraan gender dalam pendidikan yaitu kondisi di mana perempuan dan laki-laki tidak dapat memiliki status dan kondisi yang setara untuk mewujudkan secara penuh hak-hak dasarnya dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan akibat dari sistem dan struktur sosial.

Menteri Negara Peranan Wanita (1998) menyatakan “ketimpangan gender di bidang pendidikan dapat diartikan sebagai suatu kesenjangan antara kondisi gender sebagaimana yang dicita-citakan (kondisi normatif) dengan kondisi gender sebagaimana adanya (kondisi objektif) di bidang pendidikan” (Sudarta, 2004, h. 3). Lebih lanjut kondisi normatif contohnya, kesempatan mengikuti pendidikan formal bagi laki-laki (pria) dan perempuan (wanita) sama. Sedangkan kondisi objektif contohnya, semakin tinggi jenjang pendidikan (SMP ke atas), jumlah perempuan yang mengikuti pendidikan formal lebih sedikit daripada laki-laki. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksetaraan gender dalam pendidikan, padahal ketidaksetaraan gender dalam pendidikan berpengaruh di segala bidang.

Ketidaksetaraan pada sektor pendidikan telah menjadi faktor utama yang paling berpengaruh terhadap ketidaksetaraan gender secara menyeluruh. Hampir pada semua sektor, seperti lapangan pekerjaan, jabatan, peran di masyarakat, sampai pada masalah menyuarakan pendapat, antara laki-laki dan perempuan yang menjadi faktor penyebab terjadinya kesenjangan gender adalah karena latar belakang pendidikan yang belum setara. Dengan lebih rendahnya tingkat pendidikan penduduk perempuan akan menyebabkan perempuan belum bisa berperan lebih besar (Suryadi & Idris, 2004, h.17).

“Gambaran kesenjangan Gender dikelompokkan ke dalam tiga permasalahan dasar pendidikan, yaitu pemerataan kesempatan belajar pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan, kurikulum dalam proses pendidikan serta penjurusan dan program studi pendidikan nasional” (Suryadi & Idris, 2004, h.154).

Suleman (1995) menyatakan ketidaksetaraan gender adalah perbedaan dalam hak, kewajiban dan kegiatan antara pria dan wanita ditemukan dalam berbagai bidang. Berdasarkan UUD 45 pasal 31 ayat 1 dinyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”. Meskipun pernyataan itu

mengandung arti baik pria maupun wanita masing-masing mempunyai hak yang sama dalam mengecap pendidikan formal, namun dalam kenyataannya masih ada yang menghambat wanita untuk mengikuti pendidikan formal (h. 272).

Van Bemmelen (2003) mengemukakan ketimpangan gender di bidang pendidikan dapat dilihat dari indikator kuantitatif sebagai berikut:

a. Angka melek huruf

Melek huruf merupakan syarat utama untuk berpartisipasi dalam kehidupan modern dan pengembangan kualitas sumber daya manusia.

b. Angka partisipasi sekolah (APS)

Angka partisipasi adalah jumlah siswa usia menurut jenjang pendidikan dibandingkan dengan jumlah penduduk sesuai dengan kelompok usia menurut jenjang pendidikan. Di Indonesia, semakin tinggi tingkat pendidikan formal, semakin sedikit proporsi anak perempuan bersekolah.

c. Pilihan bidang studi

Ketimpangan gender terlihat juga dalam pilihan bidang studi. Hal ini dibuktikan pada sekolah kejuruan, misalnya Sekolah Teknik Menengah (STM) umumnya anak laki-laki, jurusan tata boga atau sekretaris umumnya anak perempuan dan sebagainya. Dalam penjurusan di tingkat SMU, umumnya anak perempuan lebih banyak mengisi jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), sedangkan anak laki-laki lebih banyak mengisi jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Pemilihan jurusan ini mungkin tidak terlepas dari stereotip gender, anak perempuan lebih banyak membantu di rumah dengan waktu belajar yang lebih sedikit daripada anak laki-laki. Sedangkan anak laki-laki lebih banyak dipacu belajar dan dibebaskan dari tugas yang berkaitan dengan pekerjaan urusan rumah tangga.

d. Komposisi staf pengajar dan kepala sekolah

Ketimpangan gender dapat pula diketahui di kalangan staf pengajar dan kepala sekolah. Misalnya untuk Sekolah Taman Kanak-kanak didominasi oleh tenaga pengajar perempuan. Sedangkan untuk SD sampai dengan jenjang pendidikan di Perguruan Tinggi, tenaga pengajar laki-laki lebih dominan daripada tenaga

pengajar perempuan. Kecenderungan yang serupa juga terlihat di kalangan kepala sekolah dan pimpinan universitas (h.10).

Tabel 2.5 Ketidaksetaraan Gender dalam Pendidikan

Suryadi & Idris (2004)	Ketidaksetaraan gender secara menyeluruh adalah akibat dari latar belakang pendidikan yang belum setara. Ada 3 hal permasalahan yakni : kesempatan, jenjang dan kurikulum.
Suleeman (1995)	Ketidaksetaraan gender dalam pendidikan adalah perbedaan dalam hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki dalam mengecap pendidikan formal.
Van Bemmelen (2003)	Ketidaksetaraan gender dalam pendidikan dapat dilihat dari indikator kuantitatif yakni angka melek huruf, angka partisipasi sekolah, pilihan bidang studi, dan komposisi staf pengajar dan kepala sekolah.
Menteri Negara PP (1998)	Ketidaksetaraan gender dalam pendidikan yaitu kondisi tidak seimbang antara yang dicita-citakan dengan kenyataannya.

Sumber: Olahan Peneliti

2.3.3 Faktor-Faktor Ketidaksetaraan Gender dalam Pendidikan

Bias gender ini tidak hanya berlangsung dan disosialisasikan melalui proses serta sistem pembelajaran di sekolah, tetapi juga melalui pendidikan dalam lingkungan keluarga. Stereotip gender yang berkembang di masyarakat telah mengkotakkotakkan peran apa yang pantas bagi perempuan dan laki-laki. Hal ini disebabkan oleh nilai dan sikap yang dipengaruhi faktor-faktor sosial budaya masyarakat yang secara melembaga telah memisahkan gender ke dalam peran-peran sosial yang berlainan.

Faktor yang menjadi alasan pokok yang penyebab ketidaksetaraan gender menurut Suleeman (1995) yaitu :

- a. Semakin tinggi tingkat pendidikan formal semakin terbatas jumlah sekolah yang tersedia. Karena SD terdapat hampir semua desa di Indonesia, maka seorang murid SD tidak perlu keluar desa untuk pergi ke sekolah. Tetapi seorang murid harus menempuh perjalanan yang lebih jauh bila ia bersekolah di SMP, karena SMP umumnya masih terkonsentrasi di kota. Masih banyak

orang tua yang enggan bila anak perempuan mereka pergi ke sekolah yang jauh.

- b. Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin mahal biaya untuk bersekolah. Tingginya biaya ini menjadi hambatan untuk melanjutkan sekolah, terutama untuk mereka miskin. Di keluarga miskin, orang tua lebih memilih untuk menyekolahkan anak laki-laki daripada anak perempuan.
- c. Keinginan orang tua untuk menyekolahkan anak perempuan berkaitan dengan keinginan untuk memperbaiki hidup mereka mendapatkan suami untuk anak perempuan mereka yang berpendidikan juga. Tetapi seringkali orang tua tidak bisa merasakan investasi dalam pendidikan anak perempuan karena anak perempuan menjadi anggota keluarga suami setelah mereka menikah (h.227-244).

Sedangkan faktor-faktor penentu ketidaksetaraan gender di bidang pendidikan menurut Van Bemmelen (2003) meliputi:

- a. Akses perempuan dalam pendidikan

Sejak dulu angka partisipasi sekolah anak perempuan lebih rendah daripada laki-laki dan terfokus pada jenis pendidikan tertentu. Memang dilihat dari latar belakang sejarah, sejak dulu dari masa ke masa atau dari generasi ke generasi, perempuan selalu lebih sulit mendapatkan akses ke dalam pendidikan formal.
- b. Nilai gender yang dianut oleh masyarakat

Berkaitan dengan pendidikan formal, ada dua nilai gender yang menonjol yang masih berlaku di masyarakat, terutama di masyarakat pedesaan. “Untuk apa anak perempuan disekolahkan (tinggi-tinggi), nanti dia ke dapur juga”. “Untuk apa perempuan disekolahkan (tinggi-tinggi), nanti dia akan menjadi milik orang lain juga”.

Pada masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, nilai gender tersebut tampak lebih menonjol. Pada masyarakat tersebut, lebih mengutamakan hubungan keluarga dengan garis laki-laki (ayah) daripada hubungan keluarga dengan garis perempuan (ibu). Dengan demikian, cenderung lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan di dalam memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal.

c. Nilai dan peran gender yang terdapat dalam buku ajar

Contoh yang klasik mengenai sosialisasi gender melalui buku ajar di antaranya sebagai berikut. “Ibu memasak di dapur, Bapak membaca koran”. Ibu berbelanja ke pasar, Bapak mencangkul di sawah”. Bentuk seksisme lain; gambar-gambar lebih sering menampilkan anak laki-laki jika dibandingkan dengan anak perempuan dan dalam kegiatan yang lebih bervariasi.

d. Nilai gender yang ditanamkan oleh guru

Guru merupakan “role model” yang sangat penting di luar lingkungan keluarga anak. Disadari atau tidak, setiap orang termasuk guru mempunyai persepsi tentang peran gender yang pantas. Persepsi itu akan disampaikan secara langsung atau tidak langsung kepada murid . Berikut ini dikemukakan beberapa contoh yang membedakan:

- Dalam hal-hal tertentu guru lebih banyak berinteraksi dengan anak laki-laki, tetapi dalam hal-hal tertentu lainnya guru lebih banyak berinteraksi dengan anak perempuan.
- Dalam memberikan mainan di Taman Kanak-kanak; anak laki-laki diberikan mainan mobil, sedangkan anak perempuan diberikan mainan boneka.
- Dalam memberikan pujian; anak laki-laki dipuji karena kemampuan intelektualnya, sedangkan anak perempuan dipuji karena kerapiannya.
- Anak perempuan lebih sering disuruh untuk menjalankan peran membersihkan sesuatu atau meladeni sesuatu daripada anak laki-laki.
- Guru lebih sering memberikan pujian atau teguran kepada anak laki-laki daripada anak perempuan. Ini artinya, anak laki-laki lebih banyak mendapat perhatian daripada anak perempuan.

e. Kebijakan yang bias gender

Terutama di tingkat SLTA (SMU, SMK), terdapat kebijakan yang bias gender seperti (a) anak perempuan yang hamil (karena kecelakaan) dikeluarkan dari sekolah, sedangkan anak laki-laki yang menghamilinya tidak kena sanksi apapun, (b) tidak dibenarkan anak perempuan yang sudah menikah untuk mengikuti atau melanjutkan pendidikan di tingkat SMP atau SLTA.

Kebijakan pengangkatan guru atau kepala sekolah khususnya di tingkat SD, SMP dan SLTA yang lebih berorientasi kepada laki-laki dan kebijakan pengangkatan guru dan kepala TK di TK yang lebih berorientasi kepada perempuan, juga merupakan kebijakan yang bias gender. Kebijakan itu merupakan pemicu ketimpangan gender, karena berimplikasi kepada komposisi pengajar dan kepala sekolah (h.4-10).

Berkaitan dengan faktor penentu ketimpangan gender, selain faktor penentu yang telah diuraikan tersebut, penting pula diperhatikan keluarga yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas dan kurangnya fasilitas pendidikan. Bagi keluarga yang berlatar belakang ekonomi lemah, cenderung tidak memberikan anak perempuan untuk memanfaatkan kesempatan yang sama dengan anak laki-laki. Anak perempuan dinomor duakan dalam mengikuti atau melanjutkan pendidikan formal.

Apabila terjadi hal yang demikian, maka pemerintah yang memiliki komitmen terhadap peraturan wajib belajar, berkewajiban untuk mengimbangnya dengan kebijakan yang tepat. Di desa-desa atau daerah-daerah terpencil khususnya, fasilitas pendidikan masih kurang. Keadaan ini berpengaruh buruk terhadap akses anak desa untuk mengikuti pendidikan formal. Jika pada suatu desa tidak ada SD atau SMP umpamanya, maka anak-anak terpaksa mengikuti pendidikan formal di luar desa, yakni di desa lain atau di kota terdekat yang membutuhkan waktu dan biaya transportasi khusus. Dalam keadaan seperti itu, orang tua cenderung tidak mengizinkan anak perempuan bersekolah, apalagi sekolah terdekat berjarak jauh. Hal ini terutama terjadi di kalangan keluarga yang tidak mampu secara ekonomis.

Suryadi dan Idris (2004) mengategorikan faktor-faktor kesenjangan gender bidang pendidikan ke dalam 4 aspek yaitu (h. 158-164):

- a. Akses adalah peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu. Fasilitas pendidikan yang sulit dicapai salah satu yang mempengaruhi perempuan, misalnya banyak sekolah dasar di tiap-tiap kecamatan namun untuk jenjang pendidikan selanjutnya seperti SMP dan SMA tidak banyak, hingga banyak siswa yang harus menempuh perjalanan jauh untuk mencapainya. Di lingkungan masyarakat yang masih

tradisional, umumnya orang tua segan mengirimkan anak perempuannya ke sekolah yang jauh karena mengkhawatirkan kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu banyak anak perempuan yang 'terpaksa' tinggal di rumah. Akumulasi dari faktor-faktor ini membuat anak perempuan banyak yang cepat meninggalkan bangku sekolah.

- b. Partisipasi adalah keikutsertaan atau peran seseorang/kelompok dalam suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan. Faktor ini banyak dipengaruhi sosial budaya antara lain yang berkaitan dengan fungsi dan peran jenis kelamin. Masyarakat juga beranggapan laki-laki adalah penopang ekonomi keluarga oleh karena itu lebih penting untuk memperoleh pendidikan daripada anak perempuan yang dianggap lebih berperan di arena domestik sehingga seringkali anak perempuan agak terhambat untuk memperoleh kesempatan yang luas untuk menjalani pendidikan formal. Jika ketersediaan biaya sekolah yang terbatas, sedangkan ada dua orang anak yaitu laki-laki dan perempuan, maka sebagian keluarga akan lebih memilih anak laki-laki untuk menempati prioritas untuk bersekolah daripada anak perempuan.
- c. Kontrol adalah penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan. Dalam keluarga, ayah berfungsi sebagai kepala keluarga. Nilai, sikap, pandangan dan perilaku ayah sebagai kepala keluarga berpengaruh di dalam proses pengambilan keputusan keluarga, khususnya untuk keputusan melanjutkan sekolah, memilih jurusan atau keahlian untuk anak-anak. Misalnya perempuan yang dianggap sebagai pemeran fungsi domestik, lebih diarahkan untuk memilih jurusan yang dianggap orang tua sesuai dengan peran jenisnya. Kontrol terhadap kebijakan pendidikan lebih didominasi oleh laki-laki, keadaan ini dapat mempengaruhi kebijakan pendidikan yang kurang sensitif gender yang selanjutnya membawa dampak yang kurang menguntungkan bagi perempuan.
- d. Manfaat adalah kegunaan sumber yang dapat dinikmati secara optimal. Akibat dari ketidaksetaraan gender dalam bidang pendidikan, serta pemilihan jurusan keahlian, maka laki-laki memiliki kesempatan memperoleh keahlian dan status profesional yang tinggi, sehingga rata-rata

penghasilan laki-laki lebih tinggi dibandingkan rata-rata penghasilan perempuan.

Namun Suryadi dan Idris (2004) menambahkan “tidak semua aspek tersebut dapat dipaksakan untuk menjelaskan masing-masing ketidaksetaraan gender yang terjadi secara empiris dalam sektor pendidikan” (h. 158). Namun demikian perjuangan kesetaraan gender jangan terlepas dari tujuannya yaitu untuk kesejahteraan manusia, sehingga penting adanya pengertian bersama antara kaum laki-laki dan kaum perempuan untuk saling menghormati dan saling menghargai dalam hak dan kewajibannya, walaupun masih ada perbedaan pandangan tentang gender. Konsep yang paling mendasar adalah tidak ada perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan perlindungan hukum, sehingga memiliki peluang dan kesempatan yang sama dalam mengakses lapangan pekerjaan dan melakukan peran sosialnya dalam pembangunan. Adapun peluang yang sama tersebut digunakan atau tidak akan terpulang kepada kebutuhan masing-masing.

Manusia tidak hanya dilihat sebagai tujuan atau objek utama pembangunan tetapi juga sekaligus menjadi aktor sentral yang peran dan kontribusinya menentukan masa depan pembangunan itu sendiri. Dengan cara pandang seperti itu, kapasitas manusia mendapat prioritas utama, dan oleh karenanya dijadikan semacam *moral benchmark*. Artinya, kinerja pembangunan hanya akan dinilai baik atau buruk sejauh dapat meningkatkan kapasitas manusia atau mengeliminasinya. Hal itu sejalan dengan pemikiran pembangunan kontemporer dimana pembangunan dilihat sebagai proses pengembangan kapasitas personal dan institusional untuk dapat memobilisasi dan mengelola sumberdaya yang dimiliki guna meningkatkan kualitas hidup yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Cara pandang inilah yang dipromosikan oleh para pendukung paradigma *People-Centered Development* yang muncul selama beberapa dekade terakhir ini.

Dalam pembangunan ini mengidentifikasi kebutuhan praktis dan strategis melalui pemberdayaan atau penguatan diri masyarakat. Oleh karena itu penting melakukan kategorisasi kebutuhan praktis dan strategis masyarakat untuk menghindari waktu sebagai determinan perubahan, karena perubahan jangka

pendek belum menjamin transformasi jangka panjang, dan pemenuhan kebutuhan praktis masyarakat tidak secara otomatis berarti terpenuhinya kebutuhan strategis masyarakat.

Kebutuhan praktis yang dimaksud yaitu berbagai kebutuhan dasar manusia. Sementara itu, kebutuhan strategis mencakup kemampuan dasar untuk mengakses fasilitas pelayanan sosial dan pemenuhan hak-hak individu, kelompok dan masyarakat dalam mencapai kualitas hidup dan kesejahteraan sosial. Usaha untuk memenuhi kebutuhan strategis tersebut adalah arena pekerjaan sosial yang selama ini diyakini sebagai suatu profesi yang memiliki kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi rakyat, tetapi juga harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya, terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat. Pemberdayaan sebagai konsep sosial budaya yang implementatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat, tidak saja menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomis, tetapi juga nilai tambah sosial dan nilai tambah budaya.

Kajian strategis pemberdayaan masyarakat, baik ekonomi, sosial, budaya dan politik menjadi penting sebagai input untuk reformulasi pembangunan yang berpusat pada rakyat, yang memberikan peluang bagi masyarakat untuk membangun secara partisipatif. Dalam pembangunan partisipatif, pemberdayaan merupakan salah satu strategi yang dianggap tepat jika faktor-faktor determinan dikondisikan sedemikian rupa agar esensi pemberdayaan tidak menjadi terdistorsi.

Bagi Indonesia yang sedang giat melaksanakan pembangunan, wacana diatas sangat menarik dan telah direspons secara positif dalam berbagai paket pembangunan dan kebijakan publik secara umum. Pemberdayaan menjadi “*trademark*” atapun jargon yang dapat dicontohkan pada agenda dan kegiatan apa saja. Kondisi ini, dalam batas-batas tertentu, telah menyebabkan reduksi makna pemberdayaan sekaligus membelokkan pemberdayaan dari orientasi awalnya. Dengan kata lain, pemberdayaan telah semakin kehilangan makna substantifnya bersamaan digunakannya konsep tersebut untuk berbagai situasi dan kondisi (Ife dan Tesoriero, 2008, h.56). Kecenderungan itu dapat dilihat dari beberapa paket pembangunan berisi pemberdayaan yang dijalankan selama ini, terutama oleh

pemerintah pusat. Betapa banyak program pemberdayaan yang dijalankan namun berakhir dengan kegagalan. Atau pada kondisi lain, misi pemberdayaan yang diemban program-program tersebut justru bermuara pada semakin tidak berdayanya kelompok masyarakat yang seharusnya diberdayakan.

Permasalahan mendasar dalam pembangunan pemberdayaan perempuan yang terjadi selama ini adalah rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, di samping masih adanya berbagai bentuk praktek diskriminasi terhadap perempuan. Permasalahan mendasar lainnya adalah masih terdapatnya kesenjangan partisipasi kaum perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur sosio-kultural masyarakat. Dalam konteks sosial, kesenjangan ini mencerminkan masih terbatasnya akses sebagian besar perempuan terhadap layanan kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang lebih luas.

Penerapan paradigma *people centered development* ini juga memberikan pengaruh kepada pemberdayaan perempuan di Indonesia. Perjuangan kaum perempuan untuk mewujudkan kesetaraan mulai diterapkan perubahan paradigma pembangunan yakni dari pendekatan dan keamanan (*security approach*) ke pendekatan kesejahteraan dan keadilan (*prosperity*) atau dari pendekatan produksi ke pendekatan ke pendekatan kemanusiaan (*people centered development*) (Tjokrowinoto, 1996, h.19). Pemberdayaan perempuan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial perempuan, melalui peningkatan kemampuan fisik, mental, sosial dan ekonomi perempuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar (Departemen Sosial RI, 2007, h.6).

Pada tahun 1975, di Meksiko City, PBB menyelenggarakan *World Conference International Year of Women*. Pertemuan di atas juga menghasilkan konsep WID (*Women in Development*). Konsep WID (perempuan dalam pembangunan) secara umum bertujuan untuk mengintegrasikan perempuan dalam pembangunan. Artinya, WID lebih menekankan pada partisipasi (keikutsertaan) perempuan dalam pembangunan. Setelah itu, beberapa kali terjadi pertemuan internasional yang memperhatikan tentang pemberdayaan perempuan. Sampai akhirnya sekitar tahun 1980-an, berbagai studi menunjukkan bahwa kualitas

kesetaraan lebih penting daripada sekedar kuantitas, perempuan tidak cukup hanya partisipasi, tetapi juga harus memperlihatkan keberdayaan dan kemampuannya sehingga tema WID diubah menjadi *Women and Development* (WAD). Studi Anderson (1992) dan Moser (1993) memberikan rekomendasi bahwa tanpa kerelaan, kerjasama, dan keterlibatan kaum laki-laki maka program pemberdayaan perempuan tidak akan berhasil dengan baik. Dengan alasan tersebut dipergunakan pendekatan yang dikenal dengan *Gender and Development* (GAD) yang menekankan prinsip hubungan kemitraan dan keharmonisan antara perempuan dan laki-laki (Noerdin, Aripurnami, Hodijah, 2005, h.46-48).

Pada tahun 2000 konferensi PBB menghasilkan '*The Millenium Development Goals*' (MDGs) yang mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai cara efektif untuk memerangi kemiskinan, kelaparan, dan penyakit serta menstimulasi pembangunan yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan.

Paradigma tersebut mendorong dan mendesak penerapan kepentingan kesetaraan gender ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Selama ini, perempuan identik dengan urusan-urusan domestik atau rumah tangga. Dengan adanya pemberdayaan diharapkan ketidaksetaraan dapat tertanggulangi, sehingga secara kemitraan sejajar serta dengan berbagi peran dalam keluarga yang sejahtera. Langkah-langkah untuk merealisasikan hak perempuan ialah dengan menghapus adanya perbedaan, disparitas/kesenjangan atau keadaan yang merugikan perempuan misalkan: keharusan adanya perubahan pola pikir dan tingkah laku sosial budaya terhadap perempuan, menghapuskan prasangka serta kebiasaan dan praktek yang bersifat diskriminatif.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketidaksetaraan gender dalam pendidikan antara lain nilai, akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Nilai yang berkembang dalam masyarakat yang mengkotak-kotakan peran laki-laki dan perempuan dapat mempengaruhi stereotip gender. Nilai adalah gambaran mengenai apa yang diinginkan, yang pantas, berharga, dan dapat mempengaruhi perilaku sosial seorang individu seperti tradisi, peran gender. Menurut Kuperman (1983) nilai adalah patokan normatif yang mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya diantara cara-cara tindakan

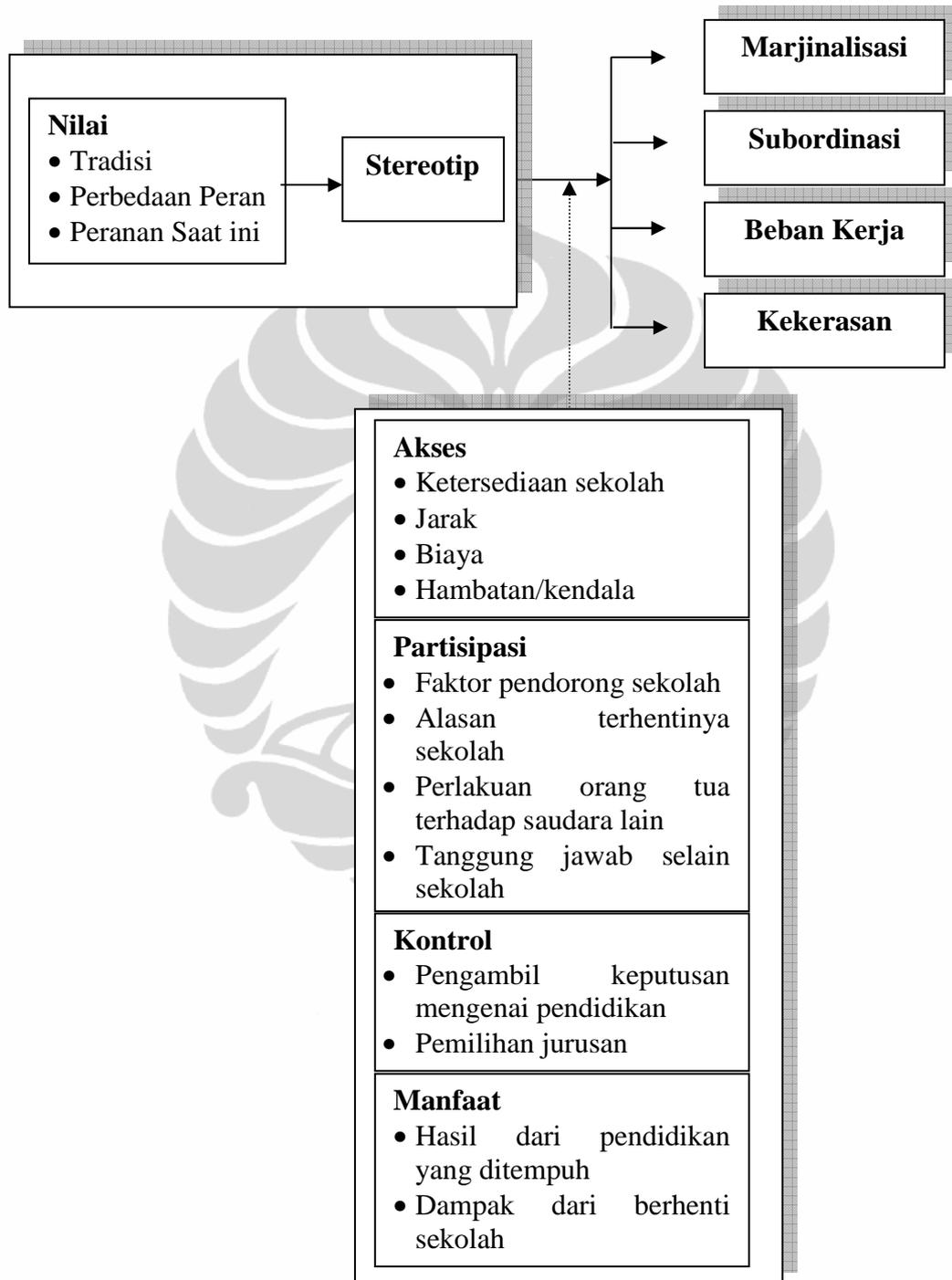
alternatif (Mulyana, 2004, h.9). Sedangkan Kluckhohn & Brameld (1957) menyatakan nilai berkembang menjadi konsepsi (tersurat atau tersirat, yang sifatnya membedakan individu atau ciri-ciri kelompok) dari apa yang diinginkan, yang mempengaruhi tindakan pilihan terhadap cara, tujuan antara dan tujuan akhir (Mulyana, 2004, h.9).

Dalam masyarakat kita di Indonesia, di mana terdapat sejumlah nilai budaya tradisional yang meletakkan tugas utama perempuan di arena domestik, seringkali anak perempuan agak terhambat untuk memperoleh kesempatan yang luas untuk menjalani pendidikan formal. Sudah sering dikeluhkan bahwa jika sumber-sumber pendanaan keluarga terbatas, maka yang harus didahulukan untuk sekolah adalah anak-anak laki-laki. Hal ini umumnya dikaitkan dengan tugas pria kelak apabila sudah dewasa dan berumah-tangga, yaitu bahwa ia harus menjadi kepala rumah tangga dan pencari nafkah. Selain itu studi yang dilakukan Suryadi (2001) menemukan bahwa pilihan keluarga yang kurang beruntung memberikan prioritas bagi anak laki-laki untuk sekolah dengan alasan biaya, bukan hanya dilandasi oleh pikiran kolot dan tradisional semata, tetapi juga dilandasi dengan pengalaman empirik bahwa tingkat balikan (*rate of return*) terhadap pendidikan perempuan yang lebih rendah. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa rata-rata penghasilan pekerja perempuan secara empirik memang lebih rendah dibandingkan penghasilan pekerja laki-laki.

Nilai yang berkembang tersebut, serta pengaruh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan terhadap pendidikan menyebabkan ketidaksetaraan gender dalam bidang pendidikan.

Akses adalah kesempatan untuk memperoleh pendidikan seperti ketersediaan sekolah, jarak sekolah, biaya, dukungan/hambatan; Partisipasi adalah keikutsertaannya dalam pendidikan seperti alasan yang mendorong untuk melanjutkan/berhenti sekolah, tanggung jawab selain sekolah; Kontrol adalah penguasaan dalam mengambil keputusan mengenai pendidikan seperti keputusan untuk sekolah, pemilihan jurusan; Manfaat adalah kegunaan dari pendidikan seperti hasil dari pendidikan, akibat dari berhenti sekolah. Pada penelitian ini tidak akan melihat mengenai kebijakan dalam pendidikan, karena untuk kebijakan ada studinya sendiri yaitu studi kebijakan. Setelah itu, penelitian ini akan

menganalisis bagaimana faktor-faktor tersebut menyebabkan marjinalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan dan beban kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan bagi perempuan. Hal ini dapat terlihat pada alur pikir dibawah ini.



Gambar 1.1 Alur Pikir

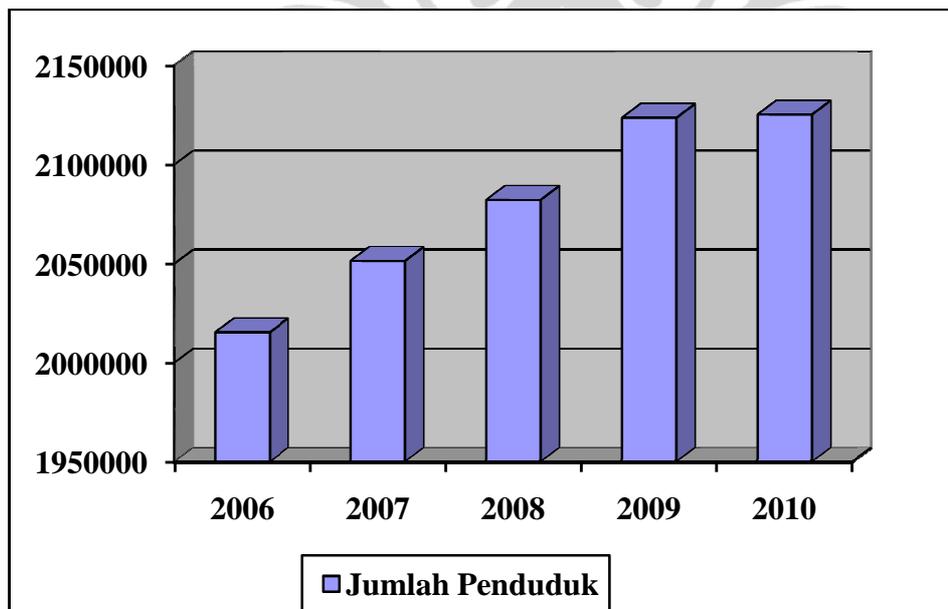
Sumber : Olahan Peneliti

BAB 3

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

3.1 Kondisi Demografis

Kabupaten Karawang memiliki luas wilayah 1.753,27 km² atau 3,73 persen dari luas Provinsi Jawa Barat, terdiri dari 30 kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 297 desa dan 12 kelurahan. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 Kabupaten Karawang dihuni oleh 2.125.234 jiwa. Dengan penduduk laki-laki berjumlah 1.095.202 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 1.030.032 jiwa. Sehingga sex ratio penduduk Kabupaten Karawang adalah 106 yang artinya penduduk laki-laki hampir sebanding dengan penduduk perempuan (BPS Karawang, 2010). Apabila dibanding dengan jumlah penduduk pada tahun 2007 yang berjumlah 2.051.303 jiwa, maka terdapat kenaikan jumlah penduduk sebanyak 73.931 jiwa. Berarti terjadi pertumbuhan penduduk sebesar 3,60 persen dibanding dengan tahun 2007 (BPS Karawang, 2010). Pertumbuhan penduduk tersebut disebabkan oleh masih tingginya angka kelahiran dan kedatangan penduduk dari daerah lain. Kedatangan penduduk dari daerah lain disebabkan karena di Kabupaten Karawang terdapat beberapa kawasan industri yang menjadi daya tarik pendatang untuk mencari penghidupan di Kabupaten Karawang.



Gambar 3.1 Penduduk Kabupaten Karawang Tahun 2006-2010

Sumber: Survei IPM Tahun 2006-2010

Komposisi penduduk laki-laki sebanyak (51,53%) dan penduduk perempuan sebanyak (48,47%). *Sex ratio* yaitu perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan pada tahun adalah sebesar 105,00 yang berarti bahwa setiap 1.000 penduduk perempuan berbanding dengan 1.050 laki-laki. Dengan luas wilayah seluas 1.753,27 km² maka kepadatan penduduk di Kabupaten Karawang adalah 1.212,14 jiwa/km².

3.2 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Karawang dapat memberikan gambaran tentang tiga dimensi pembangunan manusia, yaitu : panjang umur dan menjalani hidup sehat (diukur dari usia harapan hidup), terdidik (diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan dan tinggi) dan memiliki standar hidup yang layak (diukur dari paritas daya beli/ PPP, penghasilan).

Pencapaian pembangunan manusia yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan daya beli masyarakat di Kabupaten Karawang menunjukkan adanya perubahan ke arah yang lebih baik dari tahun 2006 - 2009. Pencapaian IPM Kabupaten Karawang pada tahun 2006 sebesar 66,95 dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2009 ini, menjadi 69,60. Selama kurun waktu 2006 - 2009 IPM Kabupaten Karawang meningkat sebesar 2,64 poin. peningkatan ini tidak lepas dari adanya peningkatan dari indeks komponen penyusun IPM, yaitu indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks paritas daya beli.

Tabel 3.1 Perkembangan IPM dan Komponen Penyusunnya Di Kabupaten Karawang

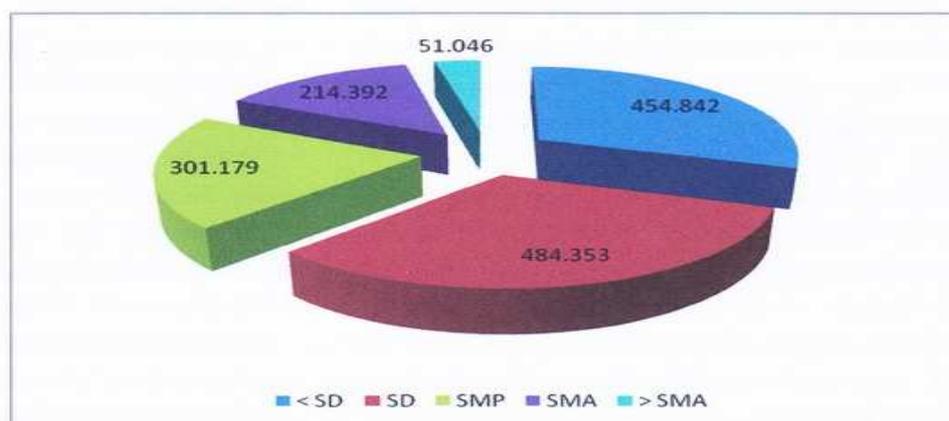
	2006	2007	2008	2009
Kesehatan	67,50	67,83	68,50	69,29
Pendidikan	73,25	76,88	76,88	77,15
Daya Beli	60,09	60,64	61,80	62,37
IPM	66,95	68,45	69,06	69,60

Sumber : Survei IPM 2009 Kabupaten Karawang

3.3 Kondisi Pendidikan

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset penting suatu daerah, semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat suatu daerah semakin tinggi kualitas SDM di wilayah tersebut. Dengan tingginya tingkat pendidikan seseorang semakin luas kesempatan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan dan penghasilan lebih baik dibanding mereka yang berpendidikan rendah. Mutu sumber daya manusia itu sendiri dapat tercermin dari tingkat pendidikan yang ditamatkannya. Keberhasilan bidang pendidikan dari banyaknya penduduk menurut jenjang pendidikan yang pernah diduduki, semakin tinggi persentase penduduk yang berpendidikan SD ke bawah menandakan kurang optimalnya program wajib belajar, sebaliknya semakin sedikit penduduk yang berpendidikan SD ke bawah menandakan optimalnya program wajib belajar.

Berdasarkan hasil survei sebagian besar penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Karawang yang tidak mempunyai ijazah minimal SD yaitu sebanyak 30,21 persen (454.842 jiwa). Dari jumlah tersebut kebanyakan perempuan yaitu mencapai 56,94 persen dibandingkan laki-laki yang mencapai 43,06 persen. Dan dari data tersebut juga terlihat hanya sebesar 37,63 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah bisa menamatkan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Dan hanya sekitar 17,41 persen diantaranya penduduk yang mempunyai ijazah SMA ke atas.

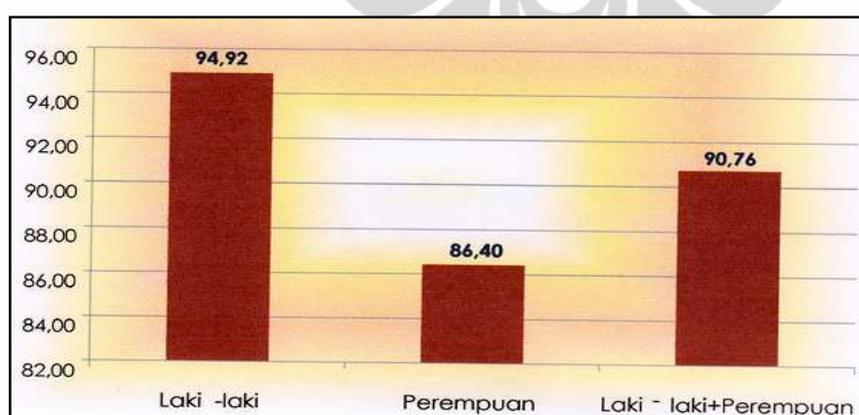


Gambar 3.2 Perbandingan Usia 15 tahun ke atas menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan

Sumber : Buku IPM Kabupaten Karawang Tahun 2009

Kemampuan baca tulis erat kaitannya dengan tingkat pendidikan. Kemampuan membaca dan menulis disamping memberi peluang penduduk dalam menyerap maupun menyampaikan informasi, juga membantu kemudahan dalam berkomunikasi. Rendahnya tingkat pendidikan dan ketidakmampuan membaca dan menulis memberi andil terhadap keterbelakangan dan meningkatnya penduduk miskin. Mereka tidak bisa bersaing dalam mencari lapangan kerja serta pilihan pekerjaan yang sangat terbatas. Menurunnya angka buta huruf atau meningkatnya kemampuan membaca dan menulis di Kabupaten Karawang mengidentifikasi adanya keberhasilan program dalam bidang pendidikan.

Kemampuan membaca dan atau menulis huruf latin dan huruf lainnya penduduk 10 tahun ke atas di Kabupaten Karawang pada tahun 2009 mencapai 90,76 persen. Hal ini berarti bahwa sekitar 90,76 persen penduduk yang berumur 10 tahun ke atas sudah mampu membaca dan atau menulis, sedangkan sisanya sebanyak 9,24 persen masih buta huruf, dalam arti tidak memiliki kemampuan untuk membaca dan atau menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Jika dirinci menurut jenis kelamin akan terlihat bahwa tingkat buta huruf penduduk perempuan lebih tinggi daripada penduduk laki-laki. Penduduk perempuan yang mampu membaca dan atau menulis huruf latin dan atau huruf lainnya sebanyak 86,40 persen, atau sekitar 13,60 persen penduduk perempuan (berumur 10 tahun ke atas) masih buta huruf. Adapun penduduk laki-laki berumur 10 tahun mengalami buta huruf hanya mencapai 5,08 persen.



Gambar 3.3 Penduduk 10 tahun ke atas Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis Huruf latin di Kabupaten Karawang

Sumber : Buku IPM 2010

Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat partisipasi dan peluang masyarakat untuk mengakses pendidikan khususnya dalam meningkatkan kemampuan baca tulis sudah cukup tinggi yaitu mencapai 90,76 persen. Namun jika dirinci berdasarkan jenis kelamin terlihat bahwa peluang dan akses bagi penduduk perempuan masih jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki, hal ini memperlihatkan masih adanya kesenjangan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan dalam mengakses pendidikan.

Pencapaian rata-rata lama sekolah (RLS) juga mengalami peningkatan, walaupun peningkatannya relatif kecil yaitu sebesar 0,28 poin (4,23 persen) pada tahun 2009 (6,78 tahun) jika dibandingkan dengan capaian tahun 2006 (6,50 tahun). Berdasarkan angka ini maka rata-rata lama sekolah masyarakat di Kabupaten Karawang pada tahun 2009 adalah 6,78 tahun atau lulus Sekolah Dasar (SD). Relatif rendahnya peningkatan pencapaian rata-rata lama sekolah dimungkinkan karena masih cukup besarnya penduduk dewasa di Kabupaten Karawang yang tingkat pendidikannya tidak tamat pendidikan dasar, sehingga meskipun partisipasi sekolah penduduk usia muda sudah sedemikian dipacu peningkatannya namun belum terasa hasilnya secara nyata. Perlu kiranya disusun intervensi strategis dalam upaya menaikkan kualitas sumber daya manusia dari sisi pendidikan, khususnya bagi mereka yang telah putus sekolah sejak kurun waktu 5-10 tahun yang lalu. Program pendidikan dasar 9 tahun seyogyanya juga diupayakan lebih serius bagi penduduk putus sekolah yang belum mengenyam pendidikan dasar maupun menengah pertama meskipun usianya telah beranjak dewasa. Salah satu jalan keluarnya adalah dengan lebih mengoptimalkan pemanfaatan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) seperti, program Paket A, B dan C dan keaksaraan fungsional.

Keberadaan sarana sekolah di suatu daerah merupakan salah satu faktor penting yang dapat menyebabkan terhentinya seorang anak dalam mengenyam pendidikan (jenjang pendidikan SMP keatas) sehingga akan menentukan besaran angka partisipasi sekolah anak usia SMP ke atas (13-24 tahun). Perbedaan jenis kelamin masih menjadi suatu alasan para orang tua dalam menyekolahkan anaknya. Kecenderungannya orang tua lebih berani menyekolahkan anak laki-laki dibandingkan perempuan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan tempat

yang relatif jauh dengan harapan kelak mereka dapat membantu perekonomian keluarga di masa datang.

Berdasarkan hasil pendataan Pada tahun 2008 menunjukkan bahwa di Kabupaten Karawang ada kurang lebih 167 desa tidak mempunyai sarana pendidikan SMP, dan sejumlah,72 desa diantaranya, bila penduduknya yang ingin bersekolah ke SMP terdekat harus menempuh perjalanan lebih dari 3 km. Untuk jenjang pendidikan lebih tinggi ada kurang lebih 266 desa tidak mempunyai sarana pendidikan SMA, bila penduduknya ingin bersekolah ke SMA terdekat, sebanyak 68 desa harus menempuh 1-3 km, penduduk di 64 desa menempuh 3 - 5 km, penduduk di 99 desa menempuh 5 - 10 dan penduduk di 45 desa harus menempuh lebih dari 10 km untuk sampai di sekolah (Badan Perencanaan Daerah dan Biro Pusat Statistik Kabupaten Karawang, 2009, h. 30).

Hal ini bisa menjadi penyebab daya serap pendidikan di beberapa kecamatan kurang optimal karena setiap anak sekolah harus mengeluarkan biaya transport yang membebani sebagian biaya pendidikan, mungkin bila jarak yang ditempuh lebih dari 5 km, bahkan diatas 10 km akan menyebabkan biaya transport lebih tinggi dari biaya pokok pendidikanya itu sendiri.

Ada 2 aspek yang harus dicermati yaitu pertumbuhan penduduk usia sekolah sebagai sisi permintaan dan pertumbuhan jumlah sekolah sebagai sisi penyediaan. Keseimbangan percepatan pertumbuhan keduanya harus terjaga, selain pertumbuhan penduduk alami antara lain kelahiran dan kematian juga perlu diamati pertumbuhan penduduk karena migrasi, karena banyaknya pembangunan industri di Karawang akan mendorong penduduk dari daerah lain untuk bermigrasi ke Karawang. Pertumbuhan sarana pendidikan selayaknya bisa melampaui permintaan, agar bisa menyerap anak usia sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Distribusi sarana sekolah SMP di beberapa kecamatan masih terasa kurang, bila dibandingkan dengan penambahan penduduk usia sekolah yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Untuk tahun 2007, sesuai pemetaan dari pemerintah pusat, Kabupaten Karawang mendapatkan alokasi pembangunan 11 unit Sekolah Baru (USB) SMF, yang lokasinya diarahkan pada kecamatan-kecamatan yang angka APM-nya

rendah. Oleh Pemerintah Kabupaten Karawang, lokasi USB SMP tersebut diarahkan pada kecamatan-kecamatan yang jauh jarak tempuhnya kepada SMP yang sudah ada. Dengan kebijakan ini, diharapkan dapat mengurangi biaya transport yang dikeluarkan siswa untuk sekolah. Program ini pada akhirnya diharapkan dapat mengurangi angka *drop out* siswa yang sekolah dengan alasan jarak atau biaya transportasi yang mahal.

Perlu dipahami juga persoalan pendidikan bukan hanya sekedar sarana atau prasarana saja, tetapi disisi lain kemampuan masyarakat yang terbatas untuk menyekolahkan anaknya, terutama masyarakat miskin. Akses untuk menempuh jenjang pendidikan SMP akan terasa sulit bilamana, lokasi atau jarak sarana yang ada sulit untuk dicapai dalam arti mengeluarkan biaya cukup mahal untuk transportasi yang sangat dihindari oleh penduduk miskin. Apalagi ditambah dengan ketidakpedulian orang tua dari keluarga miskin terhadap kebutuhan pendidikan anak-anaknya masih terasa kental, bahkan anak dipaksa untuk berhenti sekolah dan disuruh bekerja untuk dapat menambah penghasilan orang tua guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

3.4 Organisasi Pendukung

Dengan keluarnya PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Kabupaten Karawang melakukan reorganisasi Kelembagaan Perangkat Daerah, melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk tersebut, maka dibuat Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

Untuk menunjang dalam mengatasi permasalahan ketidaksetaraan gender diperlukanlah jaringan kerja antar instansi seperti :

1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi
2. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
3. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga
4. Dinas Kesehatan
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

6. Dinas Sosial
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
9. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
10. Kantor Pendidikan dan Latihan
11. Lembaga Swadaya Masyarakat.



BAB 4

HASIL TEMUAN LAPANGAN

Pada bab ini peneliti menggambarkan hasil temuan lapangan berdasarkan hasil wawancara dengan para informan mengenai ketidaksetaraan gender dalam pendidikan di Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Dari data lapangan ditemui bahwa faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi ketidaksetaraan gender dalam pendidikan adalah akses, partisipasi, kontrol, manfaat dan nilai.

4.1. Akses

Akses adalah peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu. Dalam bidang pendidikan kesetaraan terhadap akses yakni ketersediaan sekolah, jarak yang harus ditempuh, biaya serta hambatan di lapangan, menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesamaan peluang antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses peran-peran dalam kehidupan bermasyarakat.

4.1.1. Ketersediaan Sekolah

Ketersediaan sarana dan fasilitas pendidikan merupakan kondisi yang dihadapi oleh warga Kecamatan Majalaya dalam menyekolahkan anak-anak mereka, serta untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini dikemukakan oleh salah seorang informan yakni “Ada SD jauh juga kalau saya jalan kaki sekitar setengah jam mah ada, SMP nya jauh ya beda desa, SMA lebih jauh lagi itu mah” (Zu, Nopember 2011).

Pendapat yang sama mengenai ketersediaan sekolah dikemukakan oleh informan-informan berikut:

Ada, SD ada, SMP ada tapi beda desa, kalau SMA ga ada, tapi sampai sekarang yang di kecamatan ini juga ga ada. Kalau dari rumah saya ke SD sekitar 15 menit kalau naik sepeda, kalau SMP sekitar setengah jam yah lumayan cape (Oy, Nopember 2011).

Wah si ibu mah, nanya jaman dulu ya, di kampung saya ada SD, terus SMP juga sudah ada tapi rada jauh beda desalah, tapi kalau SMA belum ada. Kampung saya mah pelosok banget ga, kalau sama sekarang sih sudah lumayan beda sekarang (Su, Nopember 2011).

Dari beberapa informan di atas fakta bahwa semenjak mereka masih sekolah dulu sampai dengan sekarang, sarana dan prasarana sekolah masih menjadi kendala di Kecamatan Majalaya. Beberapa informan lain juga mengemukakan pendapat yang sama mengenai ketersediaan sarana sekolah di desa tempat tinggal mereka. Berikut penjelasan lebih lanjut:

Sekolah mah ada, SD ada, deket itu mah, kalau untuk SMP lumayan jauh, tapi saya naik sepeda sekitar 15 menitlah cuma kalau SMA emang beda kecamatan kali yah, di karawang, sampai sekarang juga ga ada SMA kalau disini mah (Sa, Nopember 2011).

Kalau sekolah mah SD sudah ada, yah jalannya lumayan tapi tidak terlalu jauh, kalau SMP mah udah beda desa lumayan jauhlah. Kalau ga punya uang untuk naik angkutan saya jalan kaki, kalau SMA bukan beda kampung lagi itu mah beda kecamatan jauh. Ga ada biaya saya sampai SMA mah, mahal, udah sekolahnya mahal, ongkosnya mahal juga eta mah (As, Nopember 2011).

Penjelasan lain disampaikan oleh informan berikut yang menyatakan bahwa ketersediaan sarana sekolah di wilayah desa-desa Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang. "...SD ada dekat rumahlah, satu desa, kalau untuk SMP.. Ehm lumayan setengah jamlah, kalau untuk SMA di Kerawang SMA mah jauh. Kalau ke SMA mah naik mobil angkot maksudnya..." (Ri, 13 Nopember 2011)

Ketersediaan sarana sekolah mempengaruhi minat para warga desa di Kecamatan Majalaya untuk bersekolah sekitar tahun 1980 sampai dengan 1990-an. Pada masa tersebut, di setiap desa atau kampung hanya terdapat SD. Adapun SMP tidak dimiliki oleh setiap desa, hanya desa tertentu yang memiliki SMP. Dengan demikian, jika penduduk desa setelah lulus SD ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP, harus mendaftar ke SMP yang terdapat di desa lain. Perjalanan ke SMP-SMP tersebut membutuhkan waktu antara 30 menit sampai dengan satu jam. Sementara untuk ketersediaan SMA, terdapat di kecamatan yang lain. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan saat ini, yaitu minimnya ketersediaan

sarana sekolah di Kecamatan Majalaya. Meskipun untuk kategori SD jumlahnya mengalami penambahan, namun untuk SMA tetap tidak ada dan hanya ada di kecamatan tertentu. Jadi terdapat ketidaksamaan dalam penyediaan sarana sekolah terutama tingkat SMP dan SMA oleh pemerintah di Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang. Pernyataan-pernyataan dari para informan dapat menggambarkan bahwa memang tidak setiap wilayah memiliki sekolah tingkat SMP dan jenjang yang lebih tinggi, sehingga banyak siswa yang harus menempuh perjalanan jauh dan waktu yang lama untuk mencapainya.

4.1.2. Jarak

Jarak yang harus ditempuh menjadi salah satu kendala yang menyebabkan informan memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah ke tingkat SMP dan SMA. Pendapat ini terutama dikemukakan oleh informan yang hanya bersekolah sampai tingkat SD.

“...dari rumah saya ke sekolah SD rada jauh, wah lewat sawah, lewat hutan deh.. ada kalinya ga dibuat jembatan kalau musim hujan bisa becek malah banjir pokoknya kalo anak SD mau sekolah mah jauh, mungkin kayak dari sini ke mana yah, wah si ibu juga ga tau yah. Saya kan jalan kaki ke sekolah yah, kira-kira setengah jam, apalagi SMP tambah jauh banget, ga tau deh berapa kilonya, saya ga sampe SMP. Pengen sih sekolah SMP tapi ga mampu mau gimana lagi....” (Su, Nopember 2011)

Informan lainnya mengungkapkan hal yang sama mengenai jarak yang harus ditempuh yakni sebagai berikut “...Ya, karena hambatan itu, karena jauh ya, itu karena faktor kalo hujan gitu, itu yang gak punya kendaraan jadi saya suka cape kalau sekolah SMP akhirnya saya berhenti aja deh...” (Zub, Nopember 2011).

Sementara, bagi informan yang lulusan SMP dan SMA, faktor jarak antara tempat tinggal dan lokasi sekolah dinilai bukan sebagai kendala, sebagaimana kutipan pernyataan-pernyataan di bawah ini: “...Ngga ada sih hambatannya, yang paling kerasanya mah cape sama sekolah mahal soalnya sering ga punya uang buat ongkos gitu...” (As, Nopember 2011). “...Deket sih kayak ke SD, 15 menit

ya bu. Kalo untuk ke SMP 2 kilo kalau SMA lebih jauh lagi sih, tapi itu naik sepeda dulu mah tapi kalau ke SMA sudah naik motor... “(Ri, Nopember 2011).

Faktor jarak antara rumah atau tempat tinggal dengan lokasi sekolah mendapatkan tanggapan berbeda dari para informan. Perbedaannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk informan yang bersekolah sampai dengan SD, jarak antara rumah dengan sekolah dirasakan jauh, sehingga menyebabkan mereka enggan untuk berangkat sekolah terutama ketika musim hujan. Apalagi jarak ke SMP yang semakin jauh, menyebabkan mereka memilih untuk tidak melanjutkan sekolah.
2. Informan yang lulusan SMP dan SMA menilai jarak bukanlah kendala, meskipun mengakui mereka perlu waktu yang cukup lama untuk menempuh perjalanan dari rumah ke sekolah. Apalagi kondisi jalan yang dilalui menjadi kendala tambahan di musim hujan. Hal ini terpulang kembali kepada manusianya, bagaimana mereka berusaha untuk mencapai keinginannya dengan mengubah pola pikir dan tingkah lakunya, sehingga meningkatkan kualitas hidupnya kelak.

4.1.3. Biaya

Faktor biaya menjadi pertimbangan utama bagi para informan untuk melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya. Pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas informan, mulai dari yang lulusan SD sampai dengan SMA. Informan yang lulusan SD mengungkapkan bahwa dia memiliki keinginan untuk terus sekolah, namun karena biaya yang mahal, akhirnya berhenti sekolah.

Orang tua sih ngijinin aja lah, setengah jam aja kok, ga papa lah bu buat sekolah. Kalo dulu orang tua saya mampu juga boleh kali ya, cuma karena ga mampu lagi, biaya sekolah kan mahal jadi ga ngelanjutin deh (Su, Nopember 2011).

Orang tua merupakan sumber pembiayaan yang utama bagi para informan ketika bersekolah dulu, sehingga ketika tidak ada dukungan biaya dari orangtua, maka mereka akan berhenti sekolah.

...Ya nggak ada uangnya. Nggak ada biayanya, apalagi pas kelas dua SMP juga bapak meninggal terus mang jaja pindah ke Jakarta ikut kerja sama orang ga ada lagi yang dukung biaya gitu... (As, Nopember 2011).

Biaya sekolah yang semakin mahal sebagai penyebab berhenti sekolah diperkuat oleh pernyataan salah seorang informan yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

...Ya, itu mah biaya sih, kayaknya kalau kuliah mah mahal, ga sanggup mungkin orang tua. Kakak saya juga yang laki-laki aja, kayak saya lulusan SMA gitu. Kalau untuk lanjut mah kayaknya ga ada biaya... (Ri, Nopember 2011)

Namun, ada pendapat berbeda mengenai kendala biaya tersebut. Salah seorang informan menyatakan bahwa biaya bukan merupakan kendala, namun faktor malas untuk melanjutkan sekolah lebih menjadi kendala utama, sehingga memilih untuk berhenti.

...gak ada, semua, kalo yang lain mah semua sampe SMP, SMA semua, saya doang yang SD, males. Ya gak tau, ya apa males aja sih tadinya gak mau belajar, males mikir... (Ku, Nopember 2011).

Mayoritas informan mulai dari yang lulusan SD sampai dengan SMA mengemukakan pendapat yang sama, bahwa biaya merupakan penyebab utama mereka berhenti sekolah. Sumber utama pembiayaan sekolah adalah orang tua, sehingga ketika orang tua tidak sanggup lagi membiayai, maka otomatis mereka akan berhenti sekolah. Apalagi belum dikenal mekanisme pembiayaan lain, seperti beasiswa ataupun bantuan dari pihak keluarga besar. Namun, ada juga informan yang dari sisi ekonomi mampu untuk melanjutkan sekolah, tetapi memutuskan untuk berhenti karena faktor malas. Secara umum, biaya tetap menjadi faktor utama yang menyebabkan informan tidak melanjutkan pendidikan pada masa lalu.

4.1.4. Hambatan Lain

Selain faktor ketersediaan sekolah, jarak dan biaya, ada beberapa faktor lain yang menjadi kendala bagi para informan di masa lalu, sehingga tidak melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi. Salah satu hambatan yang

dihadapai adalah faktor cuaca, sehingga jalan yang ditempuh menjadi becek, dan kondisi tersebut menyebabkan waktu tempuh menjadi lebih lama.

Jarak yang ada, kayaknya ga jadi hambatan kok, yah seneng aja jalan-jalan sama temen-temen namanya juga anak-anak. Anak SMP juga jalan kaki yang lebih jauh, cuma yah itu kalau hujan susah, yah becek, belok sampe banjir, sama cape juga kalau sekolah mesti berangkat pagi, kalau kesiangan yah telat (Su, Nopember 2011).

Kondisi mengenai kendala cuaca ini juga disampaikan oleh informan yang sekolah sampai dengan SMP, yakni sebagai berikut:

...kotor, ya perkampungan sih sawah soalnya, sawah ya jadi kotor, basah lewat apa, kalau hujan banjir becek, orang tua suka khawatir, Kadang – kadang suka dijemput, kadang suka dianterin kalau hujan gede... (Oy, Nopember 2011).

Selain itu, hambatan berikutnya adalah karena terlambat bangun pagi, sehingga informan telat berangkat ke sekolah. Jarak yang cukup jauh antara rumah dengan sekolah, menuntut informan untuk berangkat lebih pagi ke sekolah. Akibatnya, mereka harus bangun lebih pagi. Kondisi ini menurut informan membuat mereka lelah, dan menjadi faktor malas melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

...ngga ada hambatan. Jalannya lancar aja, yah paling belok dikit kalau hujan yah tapi lancar lah. Gak ada sih, gak ada hambatannya mungkin jauh aja kali yah, jadi cape sama kalau sekolah ga boleh telat bangun mesti pagi. Kalau dari orang tua sendiri mah dukung aja sih kayaknya... (Ri, Nopember 2011).

Hambatan-hambatan di atas tidak menjadi hambatan utama, karena informan berangkat sekolah selalu bersama-sama dengan teman-teman. Kebersamaan ini menimbulkan kegembiraan, sehingga mereka tidak terlalu memikirkan kendala yang ditemui di perjalanan. "...1 jam yah, ada hambatan gak sampai sekolah. Gak ada, naik sepeda rame-rame seneng-senang aja..." (Ya, Nopember 2011).

Para informan menyatakan bahwa hambatan lain yang ditemui ketika bersekolah dulu adalah faktor cuaca dan harus selalu bangun pagi supaya tidak telat ke sekolah.

4.2. Partisipasi

Partisipasi adalah keikutsertaan atau peran seseorang/kelompok dalam suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini adalah keikutsertaan perempuan dalam kegiatan pendidikan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendidikan. Perempuan selama ini hanya bergerak di arena domestik dan tugasnya adalah mendidik anak dan menjaga kesejahteraan keluarga. Stereotip gender yang berkembang di masyarakat kita yang telah mengkotak-kotakkan peran apa yang pantas bagi perempuan dan laki-laki, sehingga perempuan kurang dilibatkan untuk berpartisipasi dalam pendidikan.

4.2.1. Faktor yang Mendorong Melanjutkan Sekolah

Secara umum, orang tua para informan mendorong anak-anaknya untuk melanjutkan sekolah. Tetapi karena berbagai faktor, terutama biaya, maka anak-anak di Kecamatan Majalaya pada tahun 1980-an sampai dengan akhir 1990-an, tidak dapat melanjutkan sekolah mereka. Adapun anak-anak yang melanjutkan sampai dengan SMA, selain didukung oleh orang tua, juga didorong oleh faktor internal, yaitu keinginan dari diri sendiri, supaya bisa seperti teman-teman lain yang bersekolah sampai dengan SMA. Berikut pernyataan dari salah seorang informan. "...Ya, mau sendiri sih, pengen sekolah kayak temen-temen yang lain. Ya iya sih, ini yang mendorong..." (Ri, Nopember 2011).

Selain karena dorongan dari diri sendiri, keinginan untuk melanjutkan sampai dengan tingkat SMA karena di keluarga informan, semua anak minimal tingkat pendidikannya sampai dengan SMA. Dengan demikian, informan juga dituntut untuk bersekolah sampai dengan SMA. Pendapat ini disampaikan oleh salah seorang informan "...Ya gimana ya, kalo lulus SMA kan rata-rata minimal. Kalo di saya itu udah lulus SMA gitu..." (Ya, Nopember 2011).

Jadi faktor pendorong anak perempuan di Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang untuk terus melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi (sampai dengan SMA) adalah:

1. Dukungan penuh dari orang tua
2. Keinginan dari dalam diri sendiri, supaya setara dengan teman-teman yang lain, terutama teman pria dalam hal pendidikan

3. Dalam keluarga semua bersekolah sampai dengan SMA, sehingga anak perempuan pun harus sampai dengan tingkat SMA

4.2.2. Alasan terhentinya sekolah

Pada bagian sub bab 4.1. sudah dikemukakan mengenai hambatan atau kendala informan melanjutkan sekolah di Kecamatan Majalaya. Pada sub bab ini, dipaparkan mengenai alasan penyebab berhenti sekolah, selain faktor-faktor yang telah dideskripsikan di atas. Menurut salah seorang informan alasan tidak melanjutkan sekolah pada masa lalu adalah karena harus menikah.

Sebenarnya sempet pernah pengen ngelanjutin, cuman saya nya kurang ini gitu. Pernah pengen di Bandung cuman saya ngga, udah ngga pengen ini. Terus saya kan sudah punya pacar dari dulu masih sekolah, kata orang tua juga di suruh nikah aja lah. Ga enak udah pacaran lama-lama kesana kemari. Yah di nikahin deh. Jadi saya akhirnya mutusin ga lanjut kuliah, orang tua juga kayaknya ngedukung aja kalau saya nikah. Yah mungkin ga enak ama tetangga kali ya haha (Ri, Nopember 2011).

Selain itu juga karena anak perempuan dinilai memiliki kewajiban mengurus rumah tangga membantu ibu. Penjelasan ini dikemukakan oleh informan "...oh iya, bareng-bareng sih, kan ada saudara, kan cewek, ada yang nyuci, bagi-bagi kerjanya. Dari kecil mungkin karena saya perempuan saya udah diajarin urus rumah, beda sama saudara laki-laki saya..." (Ku, Nopember 2011).

Persepsi dan tradisi mengenai posisi anak perempuan yang memiliki posisi dan kewajiban yang berbeda dengan anak laki-laki dalam keluarga, menyebabkan anak perempuan tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Padahal, salah seorang informan memiliki keinginan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, namun disuruh menikah oleh orang tua. Di bagian lain, kewajiban untuk membantu orang tua di rumah, seperti mencuci dan memasak, menyebabkan anak perempuan hanya bersekolah sampai dengan SD. Apalagi bagi mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu, maka prioritas pembiayaan pendidikan diberikan kepada anak laki-laki yang diharapkan nanti dapat menjadi tulang punggung keluarga. Pendapat ini dikemukakan oleh salah seorang informan

“...kalo kakak-kakak yang laki-laki mah sempet lanjut ya. Kan masih ada bapak...” (Ya, Nopember 2011)

Persepsi tentang posisi dan peran anak perempuan dalam keluarga sebagai prioritas kedua setelah anak laki-laki, menyebabkan sebagian anak-anak perempuan di Kecamatan Majalaya, 10 tahun yang lalu banyak yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, meskipun secara pribadi memiliki keinginan untuk terus bersekolah, supaya sama dengan teman-teman yang lain (teman pria).

4.2.3. Perlakuan terhadap Saudara yang Lain

Pada beberapa keluarga di Kecamatan Majalaya, ditemukan fakta bahwa keluarga yang kurang mampu, anak laki-laki juga tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, karena faktor biaya. Berikut petikan hasil wawancara dengan para informan “...sama aja bu sama saya, namanya juga orang tua ga mampu yah, cuma kakak diatas saya aja yang SMP itu juga satu orang. Semuanya juga pengen kali yah lanjut sekolah sih, namanya ga ada lah bu...” (Su, Nopember 2011). “...SMP semua, adik sama kakak saya, beda umurnya sama kakak 1 tahun kalau sama adik 5 tahun kali yah. Iya sama lah faktor biaya, sekolah ke SMA kan mahal sudah gitu ongkosnya juga kan mahal...” (Oy, Nopember 2011).

Namun pada keluarga yang mampu, ditemukan perbedaan perlakuan terhadap anak perempuan sebagaimana dikemukakan oleh informan berikut ini:

...Usia adik, saya beda 3 tahun, 2 tahun gitu mungkin sekarang, 30, sama 28 yang terakhir kembar. Kalau pendidikan SMA mereka, laki-laki semua malah kalau yang nomor empat kuliah sekarang guru TK... (Sa, Nopember 2011).

...Yah, kalau kaka mah lanjut terus. Enaknya sekarang udah jadi PNS kalau saya mau sekolah juga udah jadi orang kantoran kali yah... (Ri, Nopember 2011).

Bahkan pada keluarga salah satu informan, semua anak laki-laki berhasil menjadi sarjana semua, sementara anak yang perempuan hanya sekolah sampai dengan SMA. “...semua S1 yang laki-laki ya..,”(Ya, Nopember 2011)

Dari penggambaran di atas terlihat bahwa ada dua pola perlakuan terhadap anak perempuan pada penduduk di Kecamatan Majalaya yakni sebagai berikut:

1. Ada keluarga yang memperlakukan setara antara anak perempuan dan anak laki-laki dalam pendidikan. Namun, karena faktor biaya, baik anak laki-laki maupun perempuan paling tinggi hanya mengenyam pendidikan setingkat SMP. Jadi meskipun orang tua ingin menyekolahkan semua anak-anak mereka, namun karena kendala biaya terpaksa semua anak baik laki-laki maupun perempuan berhenti sekolah
2. Di sisi lain, ada keluarga yang memiliki kemampuan dalam membiayai pendidikan anak-anaknya, namun lebih memprioritaskan anak laki-laki sampai jenjang sarjana. Sementara anak perempuan hanya sampai dengan SMA, karena diminta untuk segera menikah dengan calon pilihan orang tua

4.2.4. Tanggung Jawab selain Sekolah

Ketika bersekolah dulu, para informan memiliki kewajiban lain yakni membantu para orang tua di rumah dan juga membantu bekerja di sawah. Demikian juga halnya dengan anak laki-laki, juga memiliki kewajiban untuk bekerja membantu orang tua, seperti pernyataan informan berikut ini:

...apa yah tugas saya, yah tanilah kalau sekarang tapi dulu mah bantuin ibu nyuci piring, nyapu, bantuin masak, kalau ibu ke sawah saya nyusul deh ka sawah..." Kalau saudara saya mah lebih nyangkul, trus paling ngasih makan kambing, kambing orang trus nanti kalo kambingnya beranak 2, yang satu buat yang punya yang satu lagi buat yang ngurus kalo ga ngambil kayu buat masak, laki-laki mah kerjaannya diluar semua deh tani tani, kalau di rumah mah yang bantuin ibu mah saya.... (Su, Nopember 2011)

Kewajiban ini berlaku mulai dari tingkat SD sampai dengan SMA, seperti kutipan wawancara berikut ini:

...Di SMP yah, waktu jaman sekolah itu selain sekolah ni ya, sekolah, belajar ya gitu ada kewajiban lain. Saudara yang lain sih sama aja, yang lain juga nyuci sendiri dibiasain sama ibu... (Oy, Nopember 2011).

Jadi, anak perempuan diberikan tanggung jawab untuk mengurus urusan rumah tangga seperti mencuci dan memasak. Sementara, anak laki-laki diberikan pekerjaan lain, bahkan ada yang tidak membantu, hanya bermain-main setiap hari. "...Ya, biasa kita anak pertama harus ini itu masak ini, ini bantuin iya kan tau

anak pertama. Kalau adik-adik yang laki-laki main paling. Ha ha ha...” (Sa, Nopember 2011).

...Ya nyuci, banyak kerjaan dirumah, nyapu gitu, namanya juga saya satu-satunya perempuan, sayalah yang ngerjain bantuin ibu. Kalau saudara saya yang lain kan laki-laki jarang kalau untuk ngerjain pekerjaan di rumah. Tanggung jawabnya perempuan ... (As, Nopember 2011).

Bahkan anak perempuan yang SMA pun tetap harus menjalankan kewajiban membantu ibu mengurus rumah tangga. “Tanggung jawab untuk biaya sekolah mah ga ada, semua dari orang tua, paling kalau di rumah karena saya satu-satunya perempuan yah paling nyuci, nyapu mah begitu bantuin ibu lah” (Rt, Nopember 2011).

Pendapat serupa dikemukakan oleh informan berikut:

Ya paling biasa, pekerjaan apa ya, beres beres rumah, sesapu gitu. Bantuin ibu saya masak. Kalau untuk kakak saya, kalau di rumah engga soalnya dia juga kan jarang ada di rumah paling pulang kalau liburan semesterannya gitu. Paling dia cuma main sama teman-temannya dulu. Jaranglah kalau tanggung jawab urusan rumah (Ri, Nopember 2011).

Anak perempuan di kalangan keluarga di Kecamatan Majalaya, semenjak usai SD sampai dengan SMA telah diberikan kewajiban untuk mengurus urusan rumah tangga seperti mencuci, memasak, mengepel dan sebagainya. Sementara anak laki-laki tidak diberikan kewajiban untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Anak laki-laki hanya membantu orang tua di sawah, kebun, ladang atau bertukang.

4.3. Kontrol

Kontrol adalah penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan dalam bidang pendidikan, antara lain dalam keputusan melanjutkan sekolah dan memilih jurusan bagi anak. Kontrol dalam pendidikan bagi perempuan di Kabupaten Majalaya, masih sangat didominasi oleh laki-laki yaitu bapak.

4.3.1. Pengambilan Keputusan mengenai Pendidikan

Ketika memutuskan untuk berhenti sekolah dulu, mayoritas yang mengambil keputusan untuk berhenti adalah para orang tua informan. Berikut pernyataan dari informan. "...Kalau untuk masalah itu mah, ibu saya, dulu mungkin bapak tapi bapak saya meninggal waktu saya SD kelas 5 terus kakak udah pada beristri semua siapa yang mau bantuin..." (Su, Nopember 2011)."...Ya, orang tua. Ibu sama bapak. Yah faktor utama berhenti sekolah kan karena biaya sekolah mahal ditambah ongkosnya juga mahal... " (Oy, Nopember 2011)

Pendapat yang sama dikemukakan oleh informan berikut melalui kutipan pernyataannya. "...Ya saya, ibu saya. Iya soalnya ya ngga ada uangnya. Ngga ada biayanya, ga punya bapak. Wah kalau bapak masih hidup yah pasti bapak, ibu mah ikut bapak aja. Sampai sekarang akhirnya ibu ikut aja..." (As, Nopember 2011). "...Wah kalau yang mutusin segala sesuatu yang paling dominan bapak kayaknya, ibu sama anak-anaknya tinggal ikutin aja. Kalau ibu lebih dominannya di rumah urus anak-anak gitu ..." (Ri, Nopember 2011).

Selain orang tua, ada juga dari informan sendiri yang memutuskan untuk berhenti sekolah karena berbagai pertimbangan. "Saya yang mutusin. Ya gak, ya gak gimana sih, ya udah lah, kalo itu mah gak ini kata dia, ntar jangan nyesel aja gitu" (Ku, Nopember 2011).

Ada juga yang berhenti atas permintaan orang tua, dan informan juga berkeinginan untuk bekerja supaya bisa membantu keluarga.

Ya, orang tua orang gak ada biaya, suruh cari duit. Makanya saya jadi TKI ke Singapura dan Saudi waktu itu peran bapak yang paling besar. Bapak saya yang mutusin segala sesuatu, kalau ibu mah manut aja, kayak waktu saya jadi TKI itu bapak yang ngurus (Sa, Nopember 2011).

Kalau untuk masalah sekolah mah ibu, yang putusin tapi dari kampung mana-mana juga SD nya di situ bahkan ada yang lebih jauh. Yang mutusin untuk berhenti sekolah ibu dan kakak juga siapa yang mau bantuin orang tinggal ibu doang. Aku sendiri, aku kan pernah kerja di Jakarta (Su, Nopember 2011).

Dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh informan di atas, dapat dideskripsikan pola pengambilan keputusan untuk berhenti sekolah pada masa lalu di Kecamatan Majalaya yakni:

1. Mayoritas orang tua yang menyuruh berhenti sekolah, karena alasan utama tidak memiliki biaya.
2. Kesepakatan antara orang tua dan anak, karena pertimbangan ekonomi. Anak yang berhenti sekolah selanjutnya bekerja di pabrik, menjadi TKW ke luar negeri atau pekerjaan lainnya.
3. Berhenti karena keinginan sendiri, karena malas melanjutkan sekolah yang disebabkan berbagai alasan, antara lain jarak sekolah yang jauh.

4.3.2. Pemilihan Jurusan

Pemilihan jurusan oleh informan yang melanjutkan sampai dengan tingkat SMA dilakukan sendiri, atau dengan kata lain tidak mengikuti kemauan orang tua. Tapi, informan tetap membicarakan dengan orang tua, karena pertimbangan lokasi SMA yang jauh dari desa tempat tinggalnya. Penjelasan ini disampaikan oleh informan yang bersekolah sampai dengan SMA "...Bukan Bapak, tapi saya sendiri. Cuma saat itu bapak saya setuju, makanya didukung sekolah. Padahal jauh juga..." (Ya, Nopember 2011).

Demikian juga dengan pernyataan dari informan lainnya, yang menyatakan bahwa orang tua memberikan kebebasan untuk memilih atau menentukan jurusan di SMA.

Ya gimana ya, kalo lulus SMA kan rata-rata minimal kalo di saya itu udah lulus SMA gitu., kalau jurusan sekolah saya IPS yang mutusin ya dapatnya IPS. Kalau orang tua sih ga terlalu milih IPA atau IPS nya (Rt, Nopember 2011).

Dalam mekanisme penentuan jurusan di SMA dulu, informan diberikan kebebasan sepenuhnya untuk memilih jurusannya. Informan tetap berdiskusi dengan orang tua, apalagi jarak sekolah yang jauh, sehingga tetap dibutuhkan masukan dan pendapat orang tua. Pada sub bab pemilihan jurusan, terlihat bahwa orang tua tidak memaksakan keinginan kepada anak perempuan mereka dalam

memilih jurusan. Semua diserahkan kepada informan dalam pengambilan keputusan, karena dinilai lebih mengetahui dan paham tentang hal tersebut.

4.4. Manfaat

Manfaat adalah kegunaan sumber yang dapat dinikmati secara optimal dari pendidikan yang telah ditempuh oleh para informan ketika mereka bersekolah dulu. Untuk melihat faktor manfaat, pada penelitian ini menelaah dari dua aspek yaitu hasil dari pendidikan yang ditempuh serta akibat dari berhenti sekolah.

4.4.1. Hasil dari Pendidikan yang Ditempuh

Semua informan menyatakan bahwa mereka memperoleh manfaat dari pendidikan yang telah ditempuh, baik yang hanya sampai dengan SD, SMP maupun SMA. Manfaat minimal yang diperoleh adalah memiliki kemampuan membaca, menulisa dan berhitung, seperti kutipan pernyataan berikut ini “...Manfaat ada sih, manfaat apa yah, yah namanya sekolah cuma SD berarti lah, dari pada ga SD ga sekolah, apa ye hahaaa seneng aja, iya bisa baca, nulis, bisa ngitung uang hahaaaa....” (Su, Nopember 2011)

Manfaat selanjutnya yang dapat dirasakan adalah langsung diterima bekerja di pabrik di wilayah Karawang. Dengan bekerja, para informan bisa membantu perekonomian orang tua dan keluarganya, seperti diungkapkan informan berikut “...Manfaatnya.... ada sih, langsung kerja. Mungkin karena ijazah SMP kali ya, saya langsung kerja di pabrik...” (Oy, Nopember 2011).

Pendapat yang sama dikemukakan oleh dua informan lain yaitu “...Ya ada. Bisa kerja di garment gitu lumayan tadi saya bilang bisa nambah penghasilan suami. Kalo ijahahnya SMP mah kan bisa. Kalo SD mah susah. Lumayanlah...” (As, Nopember 2011).

...Ya, bisa kerja sih bisa kerja di pabrik, dulu saya dari sebelum nikah saya kerja pas anak saya lahir umur 3 tahun saya berhenti kerja disuruh suami untuk jagain anak. Jadi saya sekarang di rumah aja. Dulu berhenti kerja soalnya ga ada yang megang anak saya, biasanya yang jagain ibu saya terus ibu saya ga ada. Jadi siapa lagi yang megang anak saya, suami nyuruh saya berhenti kerja deh jagain anak...(Ri, Nopember 2011).

Manfaat lain yang dirasakan oleh informan dari hasil pendidikan yang mereka tempuh adalah bisa mengajarkan anak membaca dan menulis. Selain itu, jika anak ada tugas dari sekolah, mereka bisa menjelaskan atau membantu anak menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Berikut kutipan wawancara dengan beberapa orang informan "...Ya, kita jadi tahu baca, tulis bisa ngajarin buat anak..." (Sa, Nopember 2011). "...Ya SMA ya, minimal mah paling ngga inilah, ngajarin anak apa gitu kan jadi lebih ini gitu. Misalnya anak nanya, gini gini gitu. Bisa ada jawaban gitu. Minimal gitu lah.." (Ri, Nopember 2011).

Apa ya, gak ada hasilnya cuma mungkin kalau untuk ngajarin anak sekolah bisalah. Tapi sekarang pelajarannya juga udah beda, anak SD juga udah susah deh. Anak saya yang pertama sekarang kan kelas 5, wah sudah bikin pusing deh beda ga kayak jaman dulu. Manfaatnya apa yah, kalau kerja yang bagus mah susah juga, tapi yah Alhamdulillah warung kayak gini lumayan bantu nambah penghasilan keluarga (Ya, Nopember 2011).

Dari hasil pendidikan yang diperoleh informan pada masa lalu, dapat memberikan manfaat kepada diri sendiri maupun kepada keluarga yaitu:

1. Untuk informan yang lulusan SD, manfaat yang dirasakan adalah memiliki kemampuan membaca, menulis dan berhitung.
2. Untuk informan yang lulusan SD sampai dengan SMA, memiliki kemampuan untuk mengajar anak-anak mereka membaca dan menulis di rumah.
3. Untuk informan yang lulusan SMP, dengan ijazah SMP yang dimiliki lebih mudah diterima bekerja di pabrik garmen di wilayah Karawang.
4. Untuk informan yang lulusan SMA, lebih mudah diterima bekerja di industri/pabrik, meskipun posisinya tidak bagus. Selain itu, mereka mampu membantu anak-anak di rumah dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah.

4.4.2. Dampak dari Berhenti Sekolah

Semua informan menyepakati bahwa dengan berhenti sekolah di masa lalu, baik SD, SMP maupun SMA menimbulkan akibat yang kurang bagus kepada mereka. Bagi lulusan SD ada perasaan menyesal setelah melihat kondisi saat ini, seperti dikemukakan oleh salah seorang informan "...Nyeselnya sekarang ya, mau lanjut sekolah ga ada..." (Ku, Nopember 2011). "...Yah berhenti sekolah ga bisa

apa-apa namanya juga SD doang, kalau SMP bisa apa tau gimana pasti ada pendidikan yang lebih tinggi...” (Zu, Nopember 2011).

Informan yang lulusan SD merasa bahwa sekarang mereka tidak bisa membantu suami, karena tidak diterima bekerja di berbagai tempat. “...Yang kerasa banget ya masalah inilah kalo perekonomian suami lagi ini ya gitu, kita kan jadi gak bisa ini sendiri gitu, yah yang utamakan penghasilan dari suami. Saya mah di rumah...” (Zu, Nopember 2011).

Para informan yang hanya bersekolah sampai dengan SD, merasa menyesal sekarang karena mereka tidak dapat membantu suami mencari nafkah. Padahal mereka memiliki keinginan untuk bekerja, namun untuk bekerja di kawasan industri seperti buruh pabrik mensyaratkan ijazah minimal SMP. Kalau pun mereka mau bekerja, hanya pekerjaan-pekerjaan kasar yang tersedia, dan itupun lebih mengutamakan laki-laki, seperti di industri mebel dan bengkel. Akibatnya, mereka tetap tidak bisa bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, dan hanya mengandalkan suami sebagai pencari nafkah utama.

4.5. Nilai

Nilai merupakan gambaran mengenai apa yang diinginkan, yang pantas, berharga, dan dapat mempengaruhi perilaku sosial seorang individu. Pada penelitian ini nilai yang dianalisis berkaitan dengan tradisi, perbedaan peranan dan posisi perempuan pada masa sekarang di Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang.

4.5.1. Tradisi

Tradisi menikah pada usia muda bagi perempuan di Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang merupakan faktor yang menjadi pendorong ketidaksetaraan gender dalam pendidikan. Mayoritas orang tua menjodohkan anak perempuan mereka, dan menginginkan supaya anak perempuan menikah secepatnya. Berikut kutipan pernyataan dari salah seorang informan:

Waktu itu saya dijodohin orang tua, disuruh nikah, saya juga baru ketemu 2 kali disuruh nikah biar ga kemana-mana mungkin yah, mau sekolah ga ada biaya dari pada saya ga ngapain-ngapain tiap hari ke sawah yah nanam

jagung nanam padi, orang tua pikir mungkin anak udah ga sekolah yah udah nikahin aja (Su, Nopember 2011).

Sebagian besar anak perempuan menikah pada usia sekolah setingkat SMP dan SMA, bahkan ada yang sedang sekolah SMP disuruh menikah oleh orangtuanya. "...Nikah, 16 ya, itu juga saya yang mau nikah liat temen-temen udah nikah yah jadi ikutan deh..." (Ku, Nopember 2011). "...Nikah? Umur berapa ya? 15 ? Kelas 2 SMP sih, gak lulus..." (Zu, Nopember 2011).

Nikah umur berapa yah 19 tahun, seingat saya, abis keluar SMP saya sempet kerja terus nikah deh. Waktu nikah juga masih kerja tapi pas anak udah dua tahun saya berhenti kerja. Saya juga ketemu sama suami saya karena sama-sama kerja di pabrik (Oy, Nopember 2011).

Selain karena dorongan orang tua, menikah di usia muda juga disebabkan karena anak perempuan tidak mau ketinggalan untuk segera menikah, supaya setara dengan teman-temannya yang telah menikah terlebih dahulu. Kondisi inilah yang menyebabkan menikah pada usia muda menjadi tradisi semenjak dahulu sampai dengan sekarang di desa-desa yang terdapat di Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang. Namun ada juga informan yang telat menikah yakni di usia 20-an tahun, karena bekerja di dalam dan luar negeri.

Saya menikah dulu umur dua puluhan, jadi setelah lulus SMP saya kerja ikut orang gitu terus ketemu sama suami saya. Tapi setelah menikah saya ga kerja tapi sekitar 2 tahun ini saya ditawarkan kerja jait yah lumayanlah buat nambah-nambah (As, Nopember 2011).

...25 tahun, saya telat menikah soalnya saya pernah kerja di Saudi dulu 4 tahun terus di Singapore 2 tahun...(Sa, Nopember 2011).

Bahkan untuk anak perempuan yang mengenyam pendidikan sampai SMA pun, tetap mengikuti tradisi menikah di usia muda. Informan setelah lulus SMA langsung menikah, padahal mereka berkeinginan untuk bekerja dahulu. Berikut pernyataan dari salah seorang informan:

Waktu itu yang mutusin ibu sama bapak saya, kebetulan suami saya itu masih saudara gitu. Umurnya juga ga beda terlalu jauh sama saya. Entah gimana deh, saya juga lupa saya akhirnya disuruh nikah gitu padahal saya juga lagi enak-enak kerja. Yah dijodohinlah, takut kali anaknya sudah kerja tapi belum punya

pacar haha, terus saya nikah deh kosong 3 tahun kalau ga salah terus hamil, berhenti kerja deh (Rt, 13 Nopember 2011).

Jadi menikah di usia muda telah menjadi tradisi di desa-desa Kecamatan Majalaya yang dipicu oleh permintaan orang tua serta perasaan malu pada anak perempuan kalau terlambat menikah. Walaupun ada sebagian anak perempuan yang yang memutuskan untuk tidak menikah muda dan mereka memilih untuk bekerja di luar Kabupaten Karawang untuk membantu menopang kehidupan ekonomi keluarga. Namun, karena ada kekhawatiran orang tua serta tradisi di desa-desa tersebut, mereka memutuskan untuk menikah di usia yang relatif muda sekitar 20-an dan setelah menikah memilih untuk berhenti bekerja.

4.5.2. Perbedaan Peranan dalam Keluarga

Semenjak masa kecil dahulu, para informan mengakui bahwa ada perbedaan peranan yang diterapkan oleh orang tua terhadap anak perempuan di desa-desa yang terdapat di Kecamatan Majalaya. Anak perempuan semenjak kecil telah ditanamkan nilai-nilai dan kewajiban sebagai pihak yang mengurus urusan rumah tangga. Sementara anak laki-laki adalah pihak yang bertugas mencari nafkah. Berikut kutipan pendapat dari salah seorang informan "...Ya ada sih, ya semacam cuci baju gitu ya, bersih-bersih di rumah, ya itu aja lah. Kalo sodara laki-laknya jarang bantu, sering main..." (Zu, Nopember 2011).

Saudara laki-laki dari informan tidak diwajibkan untuk membantu pekerjaan dan kegiatan di rumah, seperti yang diungkapkan oleh dua orang informan berikut ini. "...Wah, itu nggak kali ya, dulu paling waktu adik saya masih kecil bisa disuruh udah gedean dikit juga lebih suka main keluar rumah deh..." (Ri, Nopember 2011).

...Gak ada, namanya juga laki-laki, masa disuruh masak atau ngasuh adik. Kan ga mungkin, kalau dulu sih kakak laki-laki seringnya keluar rumah. Kalau saya, sama teh uju biasanya bantuin ibu yah mulai dari masak, nyuci terus siapin yang mau di jual sama ibu... (Ya, Nopember 2011).

Dari pernyataan di atas terlihat bahwa pola pengasuhan yang diterapkan oleh para orang tua telah memperkenalkan ketidaksetaraan gender bagi anak perempuan. Dengan mengajarkan bahwa anak perempuan bertanggung jawab

untuk urusan dalam rumah tangga, maka membentuk persepsi dan berkembang menjadi tradisi bahwa setiap perempuan tempat beraktivitasnya adalah di rumah. Sementara laki-laki memiliki kebebasan, karena semenjak kecil telah diberikan kebebasan oleh orang tua untuk bermain di luar rumah. Kondisi inilah yang mempengaruhi munculnya ketidaksetaraan gender dalam pendidikan bagi penduduk di Kecamatan Majalayan Kabupaten Karawang dari dahulu sampai dengan sekarang.

4.5.3. Peranan Perempuan Saat Ini

Pada sub bab ini, peneliti akan memaparkan hasil temuan lapangan mengenai peranan dan posisi informan dalam keluarga saat ini. Menurut para informan, saat ini mereka selain mengurus urusan rumah tangga, juga terlibat dalam beberapa kegiatan sosial di desa masing-masing, seperti arisan, pengajian dan ikut perkreditan.

Ada kegiatannya yah arisan sama ngobrol, udah ga ada yang diurusin lagi paling cucu yah mau ngapain lagi, kalau ada pengajian yah pengajian kalau ada yah ikutan deh yah arisan apa aja kali yah (Zu, Nopember 2011).

Tadi saya bilang ibu rumah tangga aja, ngurus anak, yah kalau keluar mah pengajian sama arisan aja. Tapi itu juga ga tentu, suami mah kerja, kadang pulang kerja terima orderan service atau ga ngapainlah. Kadang suka kumpul sama teman-teman kantornya ga tentulah, kalau lelaki mah kan langkahnya panjang ga kayak kita perempuan mau kemana-mana inget rumah, inget anak (Sa, Nopember 2011).

...Aktif maksudnya terlibat, wah apa yah. Saya mah jarang ikut kegiatan. Paling saya urus kreditan saya aja. Yang aktif mah suami saya deh suka kumpul-kumpul sama warga di sini..."(Ri, Nopember 2011).

Ada juga informan yang tetap bekerja walaupun sudah menikah dan punya anak, dengan tujuan untuk membantu perekonomian keluarga.

Kegiatan saya, yah paling kerja di konveksi itu juga dari pagi sampai sore, sampai rumah kan banyak aja yang harus diberesin dan diurusin yah rumahlah, anak-anak. Sebelum berangkat saya harus urus makan buat di rumah. Saya kan perempuan satu-satunya jadi ibu ikut saya, mungkin lebih

anak kali yah kalau ikut anak perempuannya. Jadi saya mah jarang kemana-mana, kalau ada undangan pengajian baru saya ikut itu juga kalau bisa lagi ga masuk kerja, kalau pengajian mingguan saya mah ga ikut (As, Nopember 2011).

Adapun untuk kegiatan pengurusan anak dan rumah tangga, tetap menjadi tugas perempuan, seperti dikemukakan oleh informan berikut.

Wah kalau itu kayaknya paling banyak saya deh mulai dari yang jagain, mandiin, ngurusin, bapaknya mah tau beres, pulang kantor anaknya sudah rapih, PR nya yang ngajarin saya. Dari awal juga saya, mulai hamil sampe imunisasi itu mah tugas saya deh, nah kalau minta uang yang besar-besar buat sekolah biasanya anak-anak ke bapaknya deh. Kalau untuk ambil rapot juga saya, kadang kalau pergi yang jauh-jauh mau kemana ama bapaknya deh. Saya mah ga terlalu hafal jalan (Ya, Nopember 2011).

Pendapat yang sama mengenai pola pengurusan rumah tangga disampaikan oleh informan berikut:

Kalau untuk yang paling berperan sama mungkin yah, atau saya kali yah. Saya yang tanggung jawab di rumah. Mulai dari beres-beres rumah, urusan anak dan lain-lain. Untuk pengelolaan keuangan juga saya. Jadi suami saya kan kerja gajinya satu bulan sekali gitu, kalau gajian biasanya uangnya langsung dikasih sama saya, setelah dipotong untuk ongkosnya suami. Setelah itu saya rencanain deh untuk biaya listrik, makan, sekolah anak. Dari kreditan saya juga lumayan buat bantu rumah tangga. Yah buat jajan dan keperluan lain. Kalau peran suami mah pasti setuju aja sama keputusan saya. Karena dia mah sudah sibuk kerja kali yah. Kalau untuk kesehatan anak, saya yang bawa ke dokter atau puskesmas kalau anak sakit gitu. Saya juga yang nemenin anak-anak kalau belajar. Kalau untuk urusan rumah yah saya paling sama anak saya yang perempuan, dian bantu saya, kalau anak saya yang laki-laki lagi seneng-senengnya main (Sa, Nopember 2011).

Peran istri untuk pendidikan, yah semuanya istri yang atur kan dia juga saya suruh berhenti kerja biar jagain anak soalnya ga ada lagi yang jagain anak setelah mertua meninggal, yah udah saya suruh berhenti kerja aja. Uang gaji

saya dicukup-cukupinlah untuk bayar kebutuhan mulai dari masak, sekolah dan lainnya (Rt, Nopember 2011).

Demikian juga halnya dengan pola pengambilan keputusan tidak berbeda jauh dengan ketika para informan masih sekolah dulu. Dalam rumah tangga, suami tetap menjadi pihak utama pengambil keputusan, seperti disampaikan oleh informan berikut ini.

Kalo keputusan, kebanyakan sih suami. Saya mah kebanyakan ikut aja, nanti kalau ga sreg saya, ya paling saya suka marah-marah. Paling saya bisa ambil keputusan banyak yang berhubungan dengan rumah. Ya maksudnya kalau untuk urusan rumah saya yang bertanggung jawab mulai dari masak, bersih-bersih makan ama urusan belajar anak. Kalau bapaknya yang ngambil keputusan kalau mau beli barang apa itu dia yang mutusin mungkin karena dia kerja kan uangnya lebih jelas (Ri, Nopember 2011).

Kalau urusan rumah itu saya, suami saya amah taunya beres aja yah kadang suka bantu sih kalau saya udah cape kan marah-marah tuh, anak saya juga laki-laki susah deh kalau disuruh urusan rumah. Semua urusan rumah mah tanggung jawab saya, mulai dari beresin rumah, masak, nyuci, belanja, kalau suami mah kasih uang gaji trus saya yang atur. Kalau rencanain mah selalu, tapi kurang terus jadi suka malas hehee (Rt, Nopember 2011).

Jika suami bekerja di luar kota, istri berperan mengabil keputusan, namun tetap harus berdiskusi dengan suami. "...Saya biasanya, bapaknya nugi kan jauh terus kerjanya. Tapi tetep didiskusiin sih. Atau saya kasih tau gitu setelahnya...." (As, Nopember 2011).

Pada intinya, terdapat kesamaan perlakuan terhadap perempuan, antara masa ketika para informan bersekolah dulu dengan masa sekarang ketika mereka telah menjadi ibu rumah tangga, cara pandangan terhadap posisi dan kedudukan perempuan dalam keluarga dan masyarakat masih menyebabkan terjadinya ketidaksetaraan gender di Kecamatan Majalaya. Secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Suami masih tetap menjadi aktor utama dalam rumah tangga yakni dalam hal sebagai pencari nafkah dan pengambil keputusan.

2. Urusan pengasuhan anak dan perencanaan pendidikan diserahkan kepada istri, karena menurut persepsi suami masalah tersebut adalah urusan perempuan sebagai ibu rumah tangga, termasuk keberlanjutan pendidikan anak-anak.
3. Saat ini kegiatan tambahan perempuan di luar rumah adalah mengikuti kegiatan sosial seperti pengajian, arisan dan perkreditan. Namun ada juga yang bekerja di pabrik untuk membantu perekonomian keluarga. Tetapi mayoritas suami, tetap menginginkan istri berada di rumah untuk mengurus rumah tangga.



BAB 5

PEMBAHASAN

Perbedaan gender berpotensi mendorong munculnya ketidaksetaraan gender dalam masyarakat. Peran gender ini berubah seiring waktu dan berbeda antara satu kultur dengan kultur lainnya, yang dipengaruhi oleh kelas sosial, usia dan latar belakang etnis. Dalam prakteknya ketidaksetaraan gender lebih banyak merugikan kaum perempuan yang termanifestasikan dalam bentuk marginalisasi, subordinasi, pembentukan stereotip, kekerasan, dan beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (Bab 2, h. 20). Perwujudan ketidaksetaraan gender tersebut saling berkaitan dan berhubungan, saling mempengaruhi secara dialektis (Bab 2, h. 20). Maksudnya ketidaksetaraan gender saling berhubungan satu dengan yang lainnya dengan tidak ada yang lebih penting, dapat kontradiktif atau pun dapat melengkapi. Manifestasi ketidaksetaraan gender terjadi di berbagai tingkatan dan sudah mengakar dari setiap masing-masing orang, keluarga, hingga tingkat negara yang bersifat global.

Dalam bidang pendidikan, sering ditemukan ketidaksetaraan gender dalam keluarga, terutama pada keluarga miskin. Ketidaksetaraan gender dalam pendidikan yaitu kondisi di mana perempuan dan laki-laki tidak dapat memiliki status dan kondisi yang setara untuk mewujudkan secara penuh hak-hak dasarnya dan potensinya dalam pendidikan. Secara umum, faktor-faktor kesenjangan gender dalam pendidikan dikategorikan ke dalam empat aspek yaitu akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Namun tidak semua aspek tersebut dapat dipaksakan untuk menjelaskan masing-masing ketidaksetaraan gender yang terjadi secara empiris dalam sektor pendidikan (Bab 2, h.38).

Dari pemaparan di atas terlihat bahwa akses, partisipasi, kontrol dan manfaat merupakan faktor utama dan dominan yang memicu munculnya ketidaksetaraan gender yang berimplikasi pada ketidakadilan gender. Dalam penelitian ini ditemukan satu faktor penting yang mendorong terciptanya ketidaksetaraan gender dalam pendidikan di Kecamatan Majalaya, yaitu nilai. Nilai yang diwariskan secara turun temurun tersebut, dan masih diterapkan sampai dengan saat ini telah membentuk stereotip negatif yang merugikan anak

perempuan. Pandangan gender yang masih keliru karena pengaruh nilai menciptakan stereotip bagi anak perempuan di Kecamatan Majalaya.

Selain itu, penelitian ini juga melihat nilai yang membentuk stereotip negatif tersebut dihubungkan dengan keterbatasan akses, partisipasi yang rendah dalam pendidikan, kontrol dominan laki-laki dalam keluarga, serta manfaat yang belum dapat dinikmati secara optimal oleh perempuan, menyebabkan terjadinya marginalisasi, subordinasi, kekerasan, dan beban ganda semakin menciptakan ruang ketidaksetaraan bagi perempuan dalam pendidikan.

Selanjutnya pada bab ini, akan dipaparkan guna menjawab pertanyaan penelitian yakni bagaimana faktor akses, partisipasi, kontrol, manfaat dan nilai, mempengaruhi munculnya ketidaksetaraan gender bagi perempuan di Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang. Penjelasan mengenai ketidaksetaraan gender ini akan diawali dengan pembahasan mengenai hubungan nilai yang berkembang di masyarakat Kecamatan Majalaya terhadap terbentuknya stereotip bagi perempuan. Kemudian melihat hubungan stereotip yang terbentuk tersebut menyebabkan marginalisasi, subordinasi, beban kerja serta kekerasan yang disebabkan oleh pengaruh minimnya akses, partisipasi yang rendah terhadap pendidikan, kontrol yang merugikan dan manfaat yang belum optimal bagi perempuan di Kecamatan Majalaya.

5.1. Hubungan Nilai terhadap Terbentuknya Stereotip Bagi Perempuan

Nilai menurut adalah patokan normatif yang mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya diantara cara-cara tindakan alternatif (Bab 2, h. 41). Penekanan utama definisi ini pada faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku manusia. Penegakan norma sebagai tekanan utama dan terpenting dalam kehidupan sosial akan membuat seseorang menjadi tenang dan membebaskan dirinya dari tuduhan yang tidak baik. nilai berkembang menjadi konsepsi (tersurat atau tersirat, yang sifatnya membedakan individu atau ciri-ciri kelompok) dari apa yang diinginkan, yang mempengaruhi tindakan pilihan terhadap cara, tujuan antara dan tujuan akhir (Bab 2, h.41). Definisi yang dikemukakan ini berimplikasi terhadap pemaknaan nilai-nilai budaya, termasuk landasan-landasan budaya pendidikan.

Nilai yang berkembang di masyarakat merupakan gambaran mengenai apa yang diinginkan, yang pantas, berharga, dan dapat mempengaruhi perilaku sosial seorang individu. Semenjak dulu sampai dengan sekarang, berkembang nilai yang dianut secara turun temurun oleh masyarakat. Nilai yang berkembang dalam masyarakat itu akhirnya menciptakan stereotip. Stereotip ini terbentuk sebagai generalisasi kesan yang dibentuk mengenai karakter psikologis atau sifat kepribadian. Secara umum stereotip adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu (Bab 2, h.21). Stereotip diwariskan dari generasi ke generasi melalui bahasa verbal, tanpa pernah melakukan klarifikasi secara obyektif terhadap objek dari stereotip tersebut. Stereotip berfungsi menggambarkan realitas antar kelompok, mendefinisikan kelompok dalam kontras dengan yang lain, membentuk citra kelompok tertentu, merasionalisasi, dan menjustifikasi hubungan antar kelompok dan perilaku orang pada masa lalu, sekarang, dan akan datang di dalam hubungan tersebut. Melalui stereotip masyarakat bertindak menurut apa yang sekiranya sesuai terhadap kelompok lain. Sebagai sebuah generalisasi kesan, stereotip kadang-kadang tepat dan kadang-kadang tidak.

Beberapa nilai tersebut dalam perkembangannya, terus dipertahankan, dan menciptakan struktur sosial yang tidak berpihak kepada perempuan. Nilai-nilai yang pada akhirnya menciptakan stereotip negatif bagi perempuan yakni pemberian citra baku atau label/cap kepada kaum perempuan didasarkan pada suatu anggapan yang salah atau sesat. Stereotip yang telah berkembang puluhan tahun tersebut, dalam kehidupan sehari-hari seringkali digunakan sebagai alasan untuk membenarkan suatu tindakan terhadap perempuan, terutama anak perempuan. Pelabelan tersebut menunjukkan adanya relasi kekuasaan yang timpang atau tidak seimbang dilakukan atas dasar anggapan gender.

Seperti halnya stereotip terhadap perempuan secara umum, masyarakat di Kecamatan Majalaya mencitrakan kesan bahwa perempuan adalah kaum yang lemah, tidak rasional, emosional, tidak bisa mengambil keputusan penting, bertugas di dapur dan mengurus urusan rumah tangga serta anak. Sebaliknya, laki-laki dipersepsikan sebagai kaum yang kuat dalam semua aspek, pencari nafkah utama, prioritas dalam melanjutkan pendidikan, bekerja di luar rumah dan

merupakan pemimpin dalam rumah tangga. Kondisi ini disebabkan oleh nilai yang berkembang semenjak dulu dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Majalaya yakni sebagai berikut:

1. Perbedaan peranan telah diterapkan semenjak kecil terhadap anak laki-laki dan perempuan di masyarakat Kecamatan Majalaya. Anak perempuan telah dibiasakan untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, membersihkan rumah, mencuci dan membantu tugas ibu yang lain. Orang tua telah memperkenalkan pembagian kerja berdasarkan gender. Anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, mengakibatkan semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab perempuan. Konsekuensinya, anak perempuan harus bekerja keras dalam waktu lama untuk menjaga kebersihan dan kerapian rumah tangganya, mulai dari membersihkan mengepel lantai, memasak, mencuci, hingga mengurus anak. Pandangan inilah yang akhirnya membentuk dan memperkuat stereotip bahwa perempuan usia berapa pun identik dengan urusan rumah tangga atau urusan domestik dalam masyarakat. Sementara anak laki-laki diberikan kebebasan oleh para orang tua dalam kesehariannya.
2. Dampak dari pencitraan di atas adalah, masyarakat memiliki anggapan bahwa tugas utama kaum perempuan adalah melayani suami, sehingga ketika secara biologis sudah layak menikah, maka anak perempuan yang masih usia sekolah akan disuruh menikah oleh orang tuanya. Menikah di usia muda telah menjadi tradisi turun temurun yang didukung oleh tuntutan orang tua serta perasaan malu pada anak perempuan kalau tidak menikah di usia muda. Meskipun, ada sebagian anak perempuan yang menikah terlambat, karena mereka memilih untuk bekerja di luar Kabupaten Karawang, namun karena adanya stereotip negatif tentang perempuan yang menikah terlambat, maka mereka akhirnya memutuskan untuk menikah pada usia 25 – 27 tahun. Setelah menikah sebagian memilih untuk berhenti bekerja, dan menjadi ibu rumah tangga
3. Tradisi menikah muda ini berkaitan erat dengan stereotip yang berkembang di masyarakat perdesaan yakni: “Untuk apa anak perempuan disekolahkan (tinggi-tinggi), nanti dia ke dapur juga”. “Untuk apa perempuan disekolahkan

(tinggi-tinggi), nanti dia akan menjadi milik orang lain juga”. Akibatnya, dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, selalu memprioritaskan anak laki-laki. Jika ada keinginan orang tua untuk menyekolahkan anak perempuan tidak terlepas dari motif dan keinginan untuk memperbaiki hidup, karena diharapkan akan mendapatkan suami yang berpendidikan juga, sehingga akan memperbaiki kehidupan keluarga.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa salah satu jenis sumber utama terciptanya stereotip adalah nilai yang terbentuk berdasarkan tradisi dan pandangan gender. Banyak sekali ketidakadilan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan yang bersumber pada stereotip yang dilekatkan pada mereka. Perbedaan identitas berdasarkan gender tersebut telah ada jauh sebelum seseorang itu lahir. Sehingga ketika pada akhirnya dilahirkan ke dunia ini, sudah langsung masuk ke dalam satu lingkungan yang menyambutnya dengan serangkaian tuntutan peran gender. Sehingga seseorang terpaksa menerima identitas gender yang sudah disiapkan untuknya dan menerimanya sebagai sesuatu hal yang benar, yang alami dan yang baik. Akibatnya jika terjadi penyimpangan terhadap peran gender yang sudah menjadi bagian dari landasan kultural masyarakat dimana dia hidup, maka masyarakat pun lantas menilai hal tersebut sebagai sesuatu yang negatif bahkan mungkin sebagai penentang terhadap budaya yang selama ini sudah mapan. Dan sampai sejauh ini yang sering menjadi korban adalah kaum perempuan.

Semua stereotip mengenai perempuan tersebut, pada akhirnya menciptakan ketidakadilan gender, terutama dalam bidang pendidikan. Anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, karena akhirnya juga akan ke dapur, menyebabkan ketika harus mengambil keputusan untuk menyekolahkan anak-anak, maka anak laki-laki akan mendapatkan prioritas utama. Salah satu penyebab ketimpangan gender itu adalah pandangan terhadap laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh masyarakat maupun keluarga, di Kecamatan Majalaya. Pengaruh stereotip ini begitu besar dan kuat, sehingga tidak mudah untuk diubah, bahkan sudah dianggap sebagai kebenaran umum. Bias gender dimulai dari keluarga, orang tua sudah mulai membeda-bedakan

pembagian sifat, peran, kedudukan, dan tugas laki-laki dan perempuan berdasarkan norma, adat kebiasaan, dan kepercayaan.

Bias gender akibat stereotip sering kali diperkuat dan disebabkan oleh adanya pandangan atau keyakinan di masyarakat bahwa jenis pekerjaan perempuan seperti pekerjaan domestik dianggap dan dinilai lebih rendah dibandingkan dengan pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan laki-laki, serta dikategorikan sebagai tidak produktif. Sementara itu kaum perempuan, karena anggapan gender ini sejak dini telah disosialisasikan untuk menekuni peran gender mereka. Di lain pihak kaum lelaki tidak diwajibkan secara kultural untuk menekuni pekerjaan domestik itu. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa rata-rata penghasilan pekerja perempuan secara empirik memang lebih rendah dibandingkan penghasilan pekerja laki-laki (Bab 2, h.42).

Pandangan kultural yang mengutamakan anak laki-laki, baik sebagai penerus keluarga maupun sebagai pencari nafkah. Ketidaksetaraan ini muncul juga karena dipengaruhi oleh pemikiran bahwa tingkat pengembalian investasi pendidikan pada anak laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan anak perempuan, sehingga anak laki-laki selalu diberikan prioritas untuk melanjutkan pendidikan, termasuk di Kecamatan Majalaya. Stereotip inilah yang memicu terjadinya ketidaksetaraan gender dalam pendidikan di Kecamatan Majalaya.

5.2. Hubungan Stereotip terhadap Marjinalisasi Perempuan dalam Pendidikan

Proses marjinalisasi, yang merupakan proses pemiskinan terhadap perempuan, terjadi sejak di dalam rumah tangga dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga laki-laki dengan anggota keluarga perempuan. Salah satu bentuk pamarjinalan atau pemiskinan terhadap perempuan disebabkan oleh faktor stereotip gender (Bab 2, h.20). Marjinalisasi terhadap kaum perempuan sudah terjadi sejak di rumah tangga sampai dengan masyarakat dan negara. Marjinalisasi juga diperkuat oleh adat istiadat maupun tradisi.

Demikian juga dengan kesempatan dalam memperoleh pendidikan dan pekerjaan, berbeda antara laki-laki dan perempuan, yang akibatnya juga melahirkan ketidaksetaraan gender dalam pendidikan dan pekerjaan. Seorang

perempuan yang bekerja sepanjang hari di dalam rumah, tidaklah dianggap bekerja karena pekerjaan yang dilakukannya, seberapa banyak, dianggap tidak produktif secara ekonomis. Namun seandainya seorang perempuan bekerja pun (dalam arti di sektor publik) maka penghasilannya hanya dapat dikategorikan sebagai penghasilan tambahan saja sebagai penghasilan seorang suami tetap yang utama, sehingga dari segi nominal pun perempuan lebih sering mendapatkan jumlah yang lebih kecil daripada kaum laki-laki. Dalam bidang pendidikan apabila keuangan terbatas, pilihan yang harus sekolah terlebih dahulu adalah anak laki-laki dengan asumsi anak laki-laki yang akan menjadi pencari nafkah keluarga nantinya, walaupun anak perempuannya lebih pandai (Bab 2, h. 21).

Marjinalisasi terhadap perempuan dalam bidang pendidikan ditemukan di Kecamatan Majalaya semenjak dulu sampai dengan sekarang. Marjinalisasi dalam pendidikan merupakan suatu proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan ketidakadilan bagi perempuan. Faktor awal yang mendorong terjadinya marjinalisasi adalah stereotip yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Majalaya. Dalam konteks ini terlihat bahwa, marjinalisasi terjadi karena adanya kekeliruan dalam menggunakan asumsi gender. Anggapan bahwa perempuan adalah warga kelas dua dalam masyarakat di sana, telah menyebabkan anak-anak perempuan usia sekolah mendapatkan ketidaksetaraan dalam bidang pendidikan.

Marjinalisasi atau peminggiran terhadap kaum perempuan dalam pendidikan di Kecamatan Majalaya dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Pada masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, marjinalisasi terhadap perempuan tampak lebih menonjol. Pada masyarakat yang berpegang pada sistem kekerabatan ini, lebih mengutamakan hubungan keluarga dengan garis laki-laki (ayah) daripada hubungan keluarga dengan garis perempuan (ibu). Dengan demikian, cenderung lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan di dalam memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal. Pamarjinalan perempuan ini diberlakukan bukan berdasarkan atas kompetensi, aspirasi dan keinginan, tetapi lebih disebabkan karena perlakuan diskriminatif/berbeda yang diwariskan secara turun temurun.

Kebiasaan yang berkembang di masyarakat perdesaan seperti di Kecamatan Majalaya pada akhirnya menyebabkan peminggiran peran perempuan.

2. Stereotip bahwa perempuan adalah kaum yang lemah, ditambah dengan akses terhadap pendidikan yang masih terbatas dalam ketersediaan sekolah, jarak tempuh yang jauh dari rumah, biaya yang mahal, serta hambatan lain, semakin meminggirkan perempuan. Keterbatasan akses menyebabkan, siswa harus menempuh perjalanan yang jauh, sehingga anak perempuan dikhawatirkan akan terancam keselamatannya. Di lingkungan masyarakat yang masih tradisional, umumnya orang tua segan mengirim anak perempuannya ke sekolah yang jauh karena mengkhawatirkan keselamatannya. Pada penelitian ini juga terlihat, bahwa jika sebuah keluarga dihadapkan pada keterbatasan biaya, maka prioritas untuk melanjutkan sekolah adalah anak laki-laki. Di keluarga miskin, orang tua lebih memilih untuk menyekolahkan anak laki-laki daripada anak perempuan, karena pertimbangan bahwa anak laki-laki nantinya akan menjadi kepala keluarga, sehingga jika memiliki pendidikan tinggi, akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Sementara anak perempuan, nantinya akan menjadi milik suami setelah menikah, sehingga tidak perlu mendapatkan pendidikan tinggi.
3. Pada beberapa keluarga di Kecamatan Majalaya ternyata ada yang memperlakukan anak perempuan setara dengan anak laki-laki dalam pendidikan. Namun, karena faktor biaya, baik anak laki-laki maupun perempuan paling tinggi hanya mengenyam pendidikan setingkat SMP. Di sisi lain, ada keluarga yang memiliki kemampuan dalam membiayai pendidikan anak-anaknya, namun lebih memprioritaskan anak laki-laki sampai jenjang sarjana. Sementara anak perempuan hanya sampai dengan SMA, karena harus menjalani tradisi menikah muda. Partisipasi terhadap pendidikan merupakan keikutsertaan atau peran laki-laki dan perempuan dalam suatu kegiatan (Bab 2, h. 37) seperti pendidikan dan atau dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendidikan tersebut. Di Kecamatan Majalaya terlihat partisipasi perempuan termarginalkan karena pandangan yang keliru mengenai keterlibatan perempuan dalam pendidikan. Fakta-fakta yang menunjukkan kesenjangan gender berkaitan dengan banyak faktor, antara lain perilaku

masyarakat yang lebih mementingkan pendidikan anak laki-laki ketimbang anak perempuan. Namun, bagi sebagian orang tua, anak perempuan diberikan kesempatan yang sama untuk terus melanjutkan sekolah sampai dengan jenjang yang lebih tinggi. Pemikiran minoritas ini memberikan kesempatan bagi perempuan dan anak laki-laki untuk terus sekolah tanpa memperhitungkan tingkat balikan (*rate of return*) terhadap pendidikan.

4. Orang tua masih memegang peranan dominan dalam pengontrolan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendidikan anak di Kecamatan Majalaya. Untuk memacu partisipasi perempuan dalam pendidikan sangat ditentukan oleh faktor sosio-kultural masyarakat yang umumnya masih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan. Kontrol untuk memacu partisipasi perempuan dalam pendidikan masih sangat didominasi oleh laki-laki, terutama bapak sebagai kepala keluarga. Peranan orang tua laki-laki yang dominan dipengaruhi oleh pola relasi dan saling ketergantungan sesuai posisi perempuan dan laki-laki dalam masyarakat (Bab 2, h.18). Relasi gender dibentuk dalam hubungan kekuasaan dan dominasi struktur kesempatan hidup perempuan dan laki-laki. Marjinalisasi juga diperkuat oleh tradisi yakni keharusan anak perempuan di Kecamatan Majalaya untuk menikah muda, karena kalau menikah di usia tua dianggap sebagai aib keluarga, hal tersebut menyebabkan orang tua lebih memutuskan untuk menikahkan anak perempuannya daripada melanjutkan sekolah.
5. Dampak dari berhenti sekolah di masa lalu, baik SD, SMP maupun SMA seperti yang dialami oleh anak-anak perempuan di Kecamatan Majalaya menyebabkan mereka berada dalam posisi marjinal pada relasi sosial di masyarakat. Kaum perempuan tidak memiliki posisi yang dominan sebagaimana kaum laki-laki dalam menentukan kebijakan, baik di tingkat keluarga maupun masyarakat. Selain itu, karena keterbatasan pendidikan, menyebabkan mereka tidak memiliki akses terhadap dunia pekerjaan yang layak secara ekonomi. Pendidikan yang rendah pada perempuan sangat berpengaruh pada akses terhadap sumber-sumber produksi di mana mereka lebih banyak terkonsentrasi pada pekerjaan informal yang berupah rendah (Bab 2, h.26). Akibatnya sulit menciptakan kesetaraan gender yakni kesamaan

kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan lokal di wilayah tersebut (Bab 2, h.31).

Stereotip gender yang berkembang di masyarakat Majalaya telah mengkotak-kotakkan peran apa yang pantas bagi perempuan dan laki-laki. Pada akhirnya, penilaian berdasarkan stereotip inilah yang terus memarjinalkan kaum perempuan dalam konteks keberlanjutan dalam bidang pendidikan ditambah dengan minimnya akses terhadap pendidikan, partisipasi yang rendah, kontrol yang kurang menguntungkan bagi perempuan serta minimnya manfaat yang didapat dari pendidikan yang rendah. Hal ini menyebabkan anak perempuan di Majalaya termarjinalkan dalam pendidikan. Akumulasi dari faktor-faktor ini membuat anak perempuan banyak yang cepat meninggalkan bangku sekolah (Bab 2, h.37).

5.3. Hubungan Stereotip terhadap Pensubordinasian Perempuan dalam Pendidikan

Pandangan berlandaskan gender juga ternyata bisa mengakibatkan subordinasi terhadap perempuan. Anggapan bahwa perempuan itu irrasional atau emosional berakibat munculnya sikap menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting (Bab 2, h.21). Subordinasi karena gender tersebut terjadi dalam segala macam bentuk yang berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya. Salah satu konsekuensi dari posisi subordinat perempuan ini adalah perkembangan keutamaan atas anak laki-laki.

Demikianlah pendikotomian laki-laki dan perempuan berdasarkan hubungan gender nyata sekali telah mendatangkan ketidakadilan gender bagi perempuan yang termanifestasi dalam berbagai wujud dan bentuknya. Diskriminasi gender menyebabkan perempuan diharuskan untuk patuh pada “kodrat” –nya yang telah ditentukan oleh masyarakat untuknya. Diskriminasi pula yang menyebabkan perempuan harus menerima label yang dilekatkan pada dirinya yaitu perempuan adalah makhluk yang irasional, lemah, emosional dan sebagainya sehingga kedudukannya pun selalu subordinat terhadap laki-laki, tidak

dianggap penting bahkan tidak dianggap sejajar dengan laki-laki, sehingga perempuan diasumsikan harus selalu menggantungkan diri dan hidupnya kepada laki-laki.

Subordinasi terhadap perempuan merupakan suatu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh perempuan lebih rendah dari laki-laki. Dalam kerja reproduktif (pengasuhan dan perawatan keluarga) dan pekerjaan rumah tangga dianggap sebagai peran yang rendah dan laki-laki merasa tabu untuk melakukan pekerjaan tersebut. Selain itu dalam bidang pendidikan anak laki-laki didahulukan dari perempuan, karena anggapan perempuan setelah menikah tidak bekerja lagi dan lebih banyak menjadi ibu rumah tangga serta bertanggung jawab dalam kerja reproduktif (Bab 2, h.21).

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, nilai-nilai yang berlaku di masyarakat Majalaya, telah memisahkan dan memilah-milah peran-peran gender, laki-laki dan perempuan. Perempuan dianggap bertanggung jawab dan memiliki peran dalam urusan domestik atau reproduktif, sementara laki-laki dalam urusan publik atau mencari nafkah utama bagi keluarga. Pandangan berlandaskan gender juga ternyata bisa mengakibatkan subordinasi terhadap perempuan yang berakibat munculnya sikap menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dari posisi laki-laki.

Penilaian tersebut dipengaruhi oleh persepsi yang mensubordinasi perempuan. Subordinasi adalah sikap atau tindakan masyarakat yang menempatkan satu jenis kelamin lebih rendah dari jenis kelamin yang lain (Bab 2, h.21). Subordinasi ini didasari adanya keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Stereotip telah membentuk persepsi masyarakat tersebut semakin melemahkan posisi perempuan. Apalagi dalam bidang pendidikan, proses subordinasi ini didukung oleh faktor-faktor lain yakni sebagai berikut:

1. Dalam masyarakat, di mana terdapat sejumlah nilai budaya tradisional yang meletakkan tugas utama perempuan di arena domestik, seringkali anak perempuan agak terhambat untuk memperoleh kesempatan yang luas untuk menjalani pendidikan formal. Apalagi jika dikaitkan dengan akses ketersediaan sekolah yang tidak memadai di majalaya, serta pertimbangan

biaya pendidikan. Secara umum pensubordinasian tersebut menimbulkan ketidakadilan dalam kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi bagi perempuan. Masyarakat memiliki anggapan bahwa perempuan adalah kaum yang rentan terhadap berbagai gangguan, apalagi ketika menempuh jarak yang cukup jauh dan kondisi lingkungan yang sepi.

2. Dengan demikian, masyarakat cenderung lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan di dalam memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal. Ketidaksetaraan gender ini diberlakukan bukan berdasarkan atas kompetensi, aspirasi dan keinginan, tetapi lebih disebabkan karena perlakuan diskriminatif/berbeda yang diterima oleh perempuan. Kebiasaan yang berkembang di masyarakat perdesaan seperti di Kecamatan Majalaya menempatkan satu jenis kelamin lebih rendah dari jenis kelamin yang lain. Subordinasi ini didasari adanya keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Hal inilah yang secara turun temurun berkembang, sehingga anak perempuan selalu menjadi prioritas kedua setelah anak laki-laki. Sudah sering dikeluhkan bahwa jika sumber-sumber pendanaan keluarga terbatas, maka yang harus didahulukan untuk sekolah adalah anak-anak laki-laki. Hal ini umumnya dikaitkan dengan tugas pria kelak apabila sudah dewasa dan berumah-tangga, yaitu bahwa ia harus menjadi kepala rumah tangga dan pencari nafkah (Bab 2, h. 42) sedangkan perempuan setelah menikah tidak bekerja lagi dan bertanggung jawab dalam kerja reproduktif. Pada masyarakat di Kecamatan Majalaya terlihat bahwa dalam peran sosial yang terbentuk di masyarakat, laki-laki dan perempuan memainkan peranan yang berbeda.
3. Dalam kehidupan sehari-hari, kontrol dan peranan dominan kaum laki-laki menempatkannya sebagai pemegang kewenangan dalam pengambilan keputusan, termasuk di Kecamatan Majalaya. Kewenangan ini sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidaksetaraan gender. Namun pada kenyataannya, dominasi ini menyebabkan perbedaan gender yang melahirkan berbagai ketidakadilan, terutama terhadap kaum perempuan di Majalaya. Ketika dilakukan pengambilan keputusan, maka keputusan yang dihasilkan pun cenderung bias gender yakni lebih menguntungkan anak laki-

laki. Dampaknya adalah anak laki-laki mendapatkan prioritas untuk terus melanjutkan sekolah, dan anak perempuan sesuai dengan tradisi dikembalikan kepada peran sosialnya sebagai pihak yang akan mengurus rumah tangga dan anak-anak nantinya. Apalagi didukung oleh tradisi keharusan anak perempuan menikah di usia muda.

Dengan demikian terlihat bahwa pendikotomian laki-laki dan perempuan berdasarkan hubungan gender telah mendatangkan ketidakadilan gender bagi perempuan yang termanifestasi dalam berbagai wujud dan bentuknya. Masalah pembedaan gender atau pemilahan peran sosial laki-laki dan perempuan merupakan hasil dari konstruksi sosial dan budaya melalui pembiasaan, sosialisasi, budaya dan pewarisan budaya sejak anak dilahirkan ke dunia yang dipengaruhi oleh waktu dan tempat. Diskriminasi gender perempuan diharuskan untuk patuh pada kodrat yang telah ditentukan oleh masyarakat untuknya. Karena diskriminasi pula perempuan harus menerima stereotip yang dilekatkan pada dirinya yaitu bahwa perempuan itu irrasional, lemah, emosional dan sebagainya sehingga kedudukannya pun selalu subordinat terhadap laki-laki, tidak dianggap penting bahkan tidak dianggap sejajar dengan laki-laki, sehingga perempuan diasumsikan harus selalu menggantungkan diri dan hidupnya kepada laki-laki. Akibatnya, dalam bidang pendidikan pun, perempuan harus mendahulukan laki-laki dalam meraih kesempatan pendidikan semenjak dahulu sampai dengan saat ini. Pada masyarakat Majalaya hal ini diperkuat karena minimnya akses terhadap pendidikan, rendahnya partisipasi serta kontrol yang tidak menguntungkan bagi perempuan.

5.4. Hubungan Stereotip terhadap Beban Kerja bagi Perempuan

Dalam masyarakat berkembang anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga. Akibatnya adalah semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan (Bab 2, hal.23). Dampak lebih lanjut adalah, banyak kaum perempuan yang harus bekerja keras dalam waktu yang lama, untuk menjaga kebersihan dan kerapian rumah tangga, mulai dari membersihkan dan mengepel lantai, memasak, mencuci, mencari air untuk mandi hingga memelihara

anak. Di kalangan keluarga miskin, beban yang berat ini harus ditanggung oleh perempuan sendiri (Bab 2, h. 23).

Bias gender yang mengakibatkan beban kerja tersebut seringkali diperkuat dan disebabkan oleh adanya pandangan atau keyakinan di masyarakat, bahwa pekerjaan yang dianggap masyarakat sebagai jenis pekerjaan perempuan, dianggap lebih rendah dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan laki-laki, serta dikategorikan bukan sebagai pekerjaan yang produktif (Bab 2, h. 23). Kaum perempuan, karena anggapan gender, semenjak dini telah disosialisasikan untuk menekuni peran gender mereka. Di pihak lain, kaum laki-laki tidak diwajibkan secara kultural untuk menekuni berbagai jenis pekerjaan domestik tersebut. Perlakuan inilah yang secara kultural dan struktural melanggengkan beban kerja bagi kaum perempuan.

Pemapanan citra bahwa seorang perempuan itu lebih cocok berperan dengan segala macam tugas domestiknya yang selalu dikatakan sebagai urusan perempuan, seperti membersihkan rumah, mengurus suami dan anak, memasak, berdandan dan sebagainya. Sementara citra laki-laki, disosialisasikan secara lebih positif, dimana dikatakan bahwa laki-laki karena kelebihan yang dimilikinya maka lebih sesuai jika dibebani dengan urusan-urusan laki-laki pula dan lebih sering berhubungan dengan sektor publik, seperti mencari nafkah, dengan profesi yang lebih bervariasi daripada perempuan. Dampaknya adalah di bidang pendidikan, anak laki-laki lebih mendapat prioritas, karena dinilai akan mampu memberikan imbal balik biaya pendidikan yakni gaji atau pendapatan dari dunia kerja, dibandingkan dengan anak perempuan. Laki-laki di lingkungan publik cenderung untuk memperoleh posisi atau jabatan dan gaji yang lebih tinggi. Dengan demikian, orang tua menganggap lebih menjanjikan untuk menyekolahkan anak laki-laki daripada perempuan.

Penerapan beban kerja bagi perempuan juga dialami oleh anak perempuan di kalangan keluarga di Kecamatan Majalaya. Semenjak SD sampai dengan SMA telah diberikan kewajiban untuk mengurus urusan rumah tangga seperti mencuci, memasak, mengepel dan sebagainya. Sementara anak laki-laki tidak diberikan kewajiban untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Anak laki-laki hanya membantu orang tua di sawah, kebun, ladang atau bertukang. Beban kerja adalah

pembagian tugas/tanggung jawab yang memberatkan bagi kaum perempuan di Kecamatan Majalaya. Anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, mengakibatkan semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab perempuan. Akibatnya, anak-anak perempuan memperoleh beban ganda, yakni selain mengerjakan tugas-tugas sekolah, juga berkewajiban mengerjakan tugas-tugas rumah tangga bahkan membantu orang tua mencari nafkah.

Seorang perempuan yang bekerja sepanjang hari di dalam rumah, tidaklah dianggap “bekerja” karena pekerjaan yang dilakukannya, seberapapun banyaknya, dianggap tidak produktif secara ekonomis. Ketika seorang perempuan “bekerja” pun (dalam arti di sektor publik) maka penghasilannya hanya dapat dikategorikan sebagai penghasilan tambahan saja sebagai penghasilan seorang suami tetap yang utama, sehingga dari segi nominal pun perempuan lebih sering mendapatkan jumlah yang lebih kecil daripada kaum laki-laki. Apabila perempuan bekerja dalam sektor publik hal itu pun tidak mengurangi beban kerja yang diterimanya bahkan menambah bebannya menjadi *triple role (triple burden)* meliputi peran reproduktif, peran produktif, dan peran sosial (Bab 2, h. 24).

5.5. Hubungan Stereotip terhadap Kekerasan dalam Pendidikan

Kekerasan (*violence*) adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap perempuan, berasal dari anggapan gender yang salah. Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender ini disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat (Bab 2, h.22). Salah satu penyebab munculnya kekerasan adalah karena pandangan mengenai adanya perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan yang dianggap sebagai awal pembentukan budaya patriarki.

Masyarakat memandang perbedaan biologis antara keduanya merupakan status yang tidak setara. Perempuan yang tidak memiliki otot dipercayai sebagai alasan mengapa masyarakat meletakkan perempuan pada posisi lemah (*inferior*). Laki-laki masih dianggap memiliki kekuatan lebih dibandingkan perempuan. Di semua lini kehidupan, masyarakat memandang perempuan sebagai seorang yang lemah dan tidak berdaya. Laki-laki diposisikan sebagai pihak yang lebih kuat

(*superior*) dibandingkan perempuan baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun bernegara. Kultur patriarki ini secara turun-temurun membentuk perbedaan perilaku, status, dan otoritas antara laki-laki dan perempuan di masyarakat yang kemudian menjadi hirarki gender.

Meskipun perempuan mengalami marjinalisasi, subordinasi, pelabelan dan beban kerja ganda semenjak dahulu sampai dengan sekarang, namun secara keseluruhan tidak ditemukan adanya kekerasan atau serangan atau invasi atas fisik maupun integritas mental psikologis seseorang yang terjadi di Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang. Kekerasan terhadap perempuan yang meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikologis atau emosional, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi, tidak menjadi faktor penyebab munculnya ketidaksetaraan gender dalam pendidikan. Secara ekonomis dan psikologis anak perempuan dan perempuan tidak diperlukan secara kasar, namun secara tradisi memang diposisikan sebagai prioritas kedua, termasuk dalam bidang pendidikan.

Dalam sejarah perkembangan masyarakat Majalaya, posisi perempuan selalu termarginalkan dan tersubordinasi. Hak-haknya selalu berada dalam prioritas kedua di bawah kaum laki-laki. Dengan demikian, perempuan adalah pihak paling rentan mengalami kekerasan, di mana hal itu terkait dengan marjinalisasi, subordinasi maupun stereotip. Sikap yang ambivalen terhadap kekerasan yang diterima oleh perempuan, disadari atau tidak, didukung sendiri oleh perempuan. Keadaan ini terbentuk, dan terlestarikan dalam budaya dan ideologi patriarki yang menciptakan stereotip gender. Sejauh ini kekerasan terhadap perempuan, memang ada yang terjadi di masyarakat Majalaya, tetapi dipicu oleh persoalan non-pendidikan. Namun dalam penelitian ini, tidak terlalu mengungkap kekerasan dalam pendidikan karena hal tersebut merupakan sesuatu yang sensitif dan bukan fokus dalam penelitian ini.

Secara keseluruhan masih terdapat ketidaksetaraan gender dalam pendidikan di Kecamatan Majalaya yang disebabkan faktor utama tradisi menikah muda yang masih dipertahankan sampai dengan saat ini. Nilai sosial budaya yang berkembang di masyarakat semenjak dahulu sampai dengan saat ini, telah membentuk pola relasi dan peran yang masih belum setara antara perempuan dan laki-laki. Perempuan masih dipandang sebagai pihak yang memiliki peranan dan

tugas untuk melayani suami, sehingga pendidikan untuk perempuan dinomorduakan. Oleh sebab itulah, pendidikan masih diprioritaskan untuk anak laki-laki. Dampaknya adalah tetap ditemukan ketidakadilan yang berujung pada ketidaksetaraan gender dalam pendidikan. Padahal, adanya kesetaraan gender dalam bidang pendidikan dipandang sangat penting, karena sektor pendidikan merupakan sektor yang paling strategis untuk memperjuangkan kesetaraan gender

Kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender terutama dalam bidang pendidikan tidak hanya berfokus pada peranan perempuan saja, tapi juga pada peranan laki-laki, dan selalu melihat bagaimana keduanya saling terkait dan saling mengisi. Kesadaran gender yang tinggi menurutnya menunjukkan kemampuan analisis mengidentifikasi masalah-masalah ketimpangan gender dalam bidang pendidikan, yang tidak begitu jelas dari permukaan, sehingga memerlukan pengkajian dan analisis untuk mengungkapkan pola ketimpangan dan diskriminasi gender dalam pendidikan.

Institusi dasar dalam pembentukan ketidaksetaraan gender ini adalah keluarga, di mana ideologi patriarki terpelihara dengan baik dalam masyarakat tradisional maupun modern. Sebagai unit terkecil dari masyarakat, keluarga memberikan kontribusi besar dalam penguatan pola ketidaksetaraan gender. Keluarga mendorong setiap anggotanya untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan aturan masyarakat yang menganut patriarki. Oleh sebab itu, keluarga juga merupakan institusi dasar yang memiliki fungsi dan tugas untuk mengubah pandangan yaitu dari ketidaksetaraan menuju kesetaraan gender.

Selain itu perlu memberikan kesempatan kepada perempuan untuk terlibat secara langsung dalam kegiatan publik dan kemasyarakatan, secara perlahan dapat mengubah fenomena ini. Artinya, kaum perempuan di Majalaya diberikan kesempatan untuk bekerja di pabrik-pabrik ataupun usaha-usaha produktif lainnya. Saat ini, kaum perempuan di Majalaya selain mengurus urusan rumah tangga, juga terlibat dalam beberapa kegiatan sosial di desa masing-masing, seperti arisan, pengajian dan ikut perkreditan. Walaupun sudah menikah dan punya anak, ada beberapa orang perempuan yang tetap diperbolehkan oleh suami dan keluarganya untuk tetap bekerja di pabrik-pabrik yang terdapat di Karawang. Tujuannya adalah untuk membantu perekonomian keluarga. Meskipun jumlahnya

masih minoritas, namun terlihat sudah ada beberapa keluarga yang memberikan kesempatan kepada istri untuk bekerja di luar rumah, tanpa meninggalkan perannya mengurus anak dan rumah tangga. Bahkan, beberapa ibu-ibu telah aktif dalam kegiatan perkreditan bahan-bahan makanan dan sandang. Tujuan awalnya adalah untuk membantu perekonomian keluarga. Namun dalam perkembangannya, perempuan dapat terlibat lebih jauh dalam pemberdayaan ekonomi keluarga, dan menjadi tulang punggung ekonomi.

Perlu adanya pemberdayaan perempuan, sehingga mereka mampu untuk meningkatkan kualitas kehidupan, peranan dan kedudukannya. Pada akhirnya, perempuan akan mampu berdiri sejajar dengan laki-laki, sehingga cepat atau lambat juga mulai dilibatkan dalam pengambilan kebijakan karena kaum perempuan dinilai mampu. Namun untuk dapat mewujudkan pemberdayaan tersebut perlu adanya kerjasama antara semua pihak yang berkepentingan untuk mewujudkan kesetaraan gender, baik dari masyarakat, pemerintah, industri dan lembaga swadaya masyarakat.

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Pada sub bab ini dipaparkan kesimpulan mengenai ketidaksetaraan gender dalam pendidikan di Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang. Ketidaksetaraan pada sektor pendidikan telah menjadi faktor utama yang paling berpengaruh terhadap ketidaksetaraan gender secara menyeluruh. Hampir pada semua sektor, seperti lapangan pekerjaan, jabatan, peran di masyarakat, sampai pada masalah menyuarakan pendapat, antara laki-laki dan perempuan yang menjadi faktor penyebab terjadinya ketidaksetaraan gender adalah karena latar belakang pendidikan yang belum setara. Kondisi ini berdasarkan hasil penelitian juga ditemukan di Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang. Dari hasil observasi, telaah, analisis dan interpretasi yang dilakukan terhadap para informan diperoleh beberapa kesimpulan penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian.

Pertama, nilai dan tradisi yang berkembang dalam masyarakat di Kecamatan Majalaya sejak dulu sampai sekarang telah membentuk stereotip yang merugikan perempuan, terutama dalam bidang pendidikan. Nilai berkembang menjadi konsepsi (tersurat atau tersirat, yang sifatnya membedakan individu atau ciri-ciri kelompok) dari apa yang diinginkan, yang mempengaruhi tindakan pilihan terhadap cara, tujuan antara dan tujuan akhir yang berpengaruh terhadap pemaknaan nilai-nilai budaya, termasuk landasan-landasan budaya pendidikan. Stereotip tersebut menyebabkan terbentuknya persepsi secara turun temurun pada masyarakat mengenai posisi dan peranan perempuan.

Dalam bidang pendidikan, stereotip menimbulkan ketidaksetaraan. Data lapangan menunjukkan bahwa akses yang minim yakni ketersediaan sekolah, jarak yang harus ditempuh, serta hambatan di lapangan, menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi ketidaksetaraan walaupun bukan yang menonjol. Di Kecamatan Majalaya ditemukan fakta bahwa keterbatasan sarana dan prasarana sekolah menyebabkan anak perempuan banyak yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tingkat SMP. Sekolah hanya terdapat di desa tertentu, mengakibatkan

jarak tempuh menjadi lebih jauh, sehingga membutuhkan waktu tempuh yang lebih lama dan menimbulkan kelelahan.

Selain itu, faktor biaya juga menjadi kendala bagi mayoritas keluarga di Kecamatan Majalaya untuk pembiayaan pendidikan anak-anak mereka. Faktor ini mempengaruhi partisipasi anak dalam sekolah. Jika dalam satu keluarga ada anak perempuan dan anak laki-laki, maka yang mendapat prioritas pembiayaan adalah anak laki-laki. Pertimbangannya adalah berkaitan dengan pendidikan formal, ada dua nilai gender yang menonjol yang masih berlaku di masyarakat, terutama di masyarakat pedesaan. Kendala lain yang ditemui adalah berkaitan dengan kondisi geografis yakni faktor medan atau lokasi menuju sekolah yang becek di musim hujan, sehingga menyebabkan para siswa malas dan khawatir berangkat ke sekolah. Bahkan sebagian siswa malas melanjutkan sekolah, karena harus bangun lebih pagi, supaya tidak terlambat sampai di sekolah.

Pada penelitian ini ditemukan bahwa nilai yang mempengaruhi ketidaksetaraan gender dalam pendidikan di Kecamatan Majalaya adalah tradisi dan perlakuan orang tua terhadap anak perempuan. Adanya tradisi menikah di usia muda menyebabkan banyak anak perempuan yang tidak melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi. Kondisi ini secara tradisi dipicu oleh pola pengasuhan yang diterapkan oleh para orang tua, yang telah memperkenalkan ketidaksetaraan gender bagi anak perempuan. Orang tua mengajarkan bahwa anak perempuan bertanggung jawab untuk urusan dalam rumah tangga, sehingga membentuk persepsi dan berkembang menjadi tradisi bahwa setiap perempuan tempat beraktivitasnya adalah di rumah.

Kedua, kebiasaan yang berkembang di masyarakat pedesaan seperti di Kecamatan Majalaya menempatkan satu jenis kelamin lebih rendah dari jenis kelamin yang lain yang menimbulkan marginalisasi dan subordinasi terhadap perempuan. Subordinasi ini didasari adanya keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Hal inilah yang secara turun temurun berkembang, sehingga anak perempuan selalu menjadi prioritas kedua setelah anak laki-laki. Apalagi adanya keterbatasan akses terhadap pendidikan yang meliputi ketersediaan sarana, biaya, jarak sekolah dengan permukiman, serta hambatan lain, menjadi faktor pendorong munculnya

diskriminasi terhadap anak perempuan sampai dengan saat ini. Ketidaksetaraan gender ini diberlakukan bukan berdasarkan atas kompetensi, aspirasi dan keinginan, tetapi lebih disebabkan karena perlakuan diskriminatif/berbeda yang telah berlangsung secara turun-temurun di wilayah tersebut.

Dalam konteks ini adalah keikutsertaan perempuan dalam kegiatan pendidikan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendidikan. Perempuan selama ini hanya bergerak di arena domestik dan tugasnya adalah mendidik anak dan menjaga kesejahteraan keluarga. Stereotip gender yang berkembang di masyarakat kita yang telah mengkotak-kotakkan peran apa yang pantas bagi perempuan dan laki-laki, sehingga perempuan kurang dilibatkan untuk berpartisipasi dalam pendidikan. Kondisi ini terlihat dari partisipasi yang dominan dari laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Laki-laki dalam hal ini orang tua laki-laki berperan besar sebagai pihak yang mendorong atau menghambat anak perempuan untuk melanjutkan sekolah. Peranan orang tua laki-laki yang dominan juga terlihat dalam pengambilan keputusan ketika anak perempuan harus berhenti sekolah karena faktor biaya dan kebiasaan menikah muda. Anak laki-laki mendapatkan perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan anak perempuan, sehingga ketika ada kendala atau pertimbangan tertentu, maka anak perempuan mengalami ketidakadilan, yakni sebagai pihak pertama yang diminta berhenti sekolah.

Sejak dulu angka partisipasi sekolah anak perempuan lebih rendah daripada laki-laki dan terfokus pada jenis pendidikan tertentu. Memang dilihat dari latar belakang sejarah, sejak dulu dari masa ke masa atau dari generasi ke generasi, perempuan selalu lebih sulit mendapatkan akses ke dalam pendidikan formal. Hal ini umumnya dikaitkan dengan tugas pria kelak apabila sudah dewasa dan berumah-tangga, yaitu bahwa ia harus menjadi kepala rumah tangga dan pencari nafkah. Pada akhirnya, penilaian berdasarkan stereotip inilah yang terus memarjinalkan kaum perempuan dalam konteks keberlanjutan di bidang pendidikan. Orang tua laki-laki juga memegang kontrol yang dominan dalam pengambilan keputusan mengenai pendidikan anak-anak di desa-desa tersebut. Peranan orang tua laki-laki yang dominan mempengaruhi posisi perempuan dalam pendidikan.

Kondisi pendidikan mayoritas perempuan yang lebih rendah daripada laki-laki, menimbulkan ketidaksetaraan gender yang menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan struktural. Padahal hanya dengan proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki, maka tidak ada lagi pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marjinalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Apabila dalam bidang pendidikan sudah terjadi kesetaraan gender, pada gilirannya akan membuka peluang yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses peran-peran dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, seperti ditemukan di Kecamatan Majalaya, struktur sosial yang ada belum mengakomodasi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, sehingga perempuan tetap menjadi subordinasi dalam keluarga dan masyarakat.

Ketiga, beban kerja ganda telah disosialisasikan oleh orang tua kepada anak perempuan dan laki-laki semenjak kecil. Pengenalan pola pembagian kerja ini, membentuk persepsi yang keliru mengenai peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Nilai sosial budaya yang berkembang di masyarakat semenjak dahulu sampai dengan saat ini, telah membentuk pola relasi dan peran yang masih belum setara antara perempuan dan laki-laki. Perempuan masih dipandang sebagai pihak yang memiliki peranan dan tugas untuk melayani suami, sehingga pendidikan untuk perempuan belum menjadi kebutuhan dan pilihan utama dalam setiap keluarga. Selain itu, anak perempuan juga memiliki beban ganda, yakni harus membantu orang tua mengerjakan tugas-tugas rumah tangga di rumah masing-masing. Perlakuan ini tidak diwajibkan kepada anak laki-laki, karena diberikan kebebasan untuk bermain dengan teman-teman sebaya.

Pembagian gender merupakan suatu aspek dari pembagian kerja sosial yang lebih luas dan pada gilirannya berakar pada kondisi produksi dan reproduksi yang diperkuat oleh sistem budaya, agama dan ideologi yang berlaku dalam masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, peranan dominan kaum laki-laki menempatkannya sebagai pemegang kewenangan dalam pengambilan keputusan. Kewenangan ini sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidaksetaraan gender. Namun pada kenyataannya, dominasi ini menyebabkan perbedaan gender yang melahirkan berbagai ketidakadilan, yakni

seringkali keputusan yang diambil merugikan perempuan, antara lain lebih sering diminta untuk berhenti sekolah dibandingkan dengan anak laki-laki.

Keempat, pada penelitian ini tidak ditemukan hubungan antara kekerasan dengan ketidaksetaraan gender dalam pendidikan di Kecamatan Majalaya. Meskipun perempuan mengalami marjinalisasi, subordinasi, pelabelan dan beban kerja ganda semenjak dahulu sampai dengan sekarang, namun secara keseluruhan tidak ditemukan adanya kekerasan atau serangan atau invasi atas fisik maupun integritas mental psikologis seseorang yang terjadi di Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang. Kekerasan terhadap perempuan yang meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikologis atau emosional, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi, tidak menjadi faktor penyebab munculnya ketidaksetaraan gender dalam pendidikan. Secara ekonomis dan psikologis anak perempuan dan perempuan tidak diperlukan secara kasar, namun secara kultural dan struktural memang diposisikan sebagai prioritas kedua, termasuk dalam bidang pendidikan.

6.2. Saran

Tidak mudah untuk mengubah pola pikir atau nilai yang sudah terpatrit pada masyarakat Majalaya, yakni tradisi menikah muda dan pembagian peran yang tidak setara pada perempuan dan laki-laki, namun beberapa saran atau rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Dalam setiap keluarga perlunya diberikan peningkatan kesadaran, melalui kegiatan sosialisasi dari badan pemberdayaan perempuan yang bekerja sama dengan tokoh agama dan masyarakat dengan cara diskusi atau pengarahan. Kondisi saat ini sudah berbeda dengan masa lalu bahwa baik anak perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam pendidikan. Hanya dengan pendidikan yang tinggi, seorang anak perempuan akan dapat mengubah nasib diri sendiri dan nasib keluarganya, karena akan memperoleh posisi tawar kerja yang lebih baik di dunia kerja atau industri. Dengan demikian, perlakuan terhadap anak perempuan pun juga harus diterapkan dengan cara dan pola yang berbeda. Dengan semakin banyaknya industri di Karawang, maka akan membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak. Untuk

itu, supaya anak perempuan dapat diterima bekerja di sana, maka perlu mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Jika pendidikannya tinggi, maka posisi yang akan diperoleh dalam dunia kerja juga akan lebih baik. Dampaknya, gaji yang diterima lebih tinggi, sehingga pendapatan akan lebih banyak, dan pada akhirnya akan mengangkat taraf hidup keluarga.

2. Perlu meningkatkan kuota kesempatan kerja pada perempuan, hal ini diperlukan untuk menunjang sosialisasi yang sudah disampaikan kepada keluarga sehingga mendapat respon positif dari masyarakat. Oleh karena itu untuk meningkatkan kuota kesempatan kerja pada perempuan diperlukan kerja sama antara instansi terkait seperti dinas tenaga kerja, dinas perdagangan, dinas perindustrian, kantor pendidikan dan pelatihan serta industri yang ada di Kabupaten Karawang.
3. Dalam konteks sekolah, perlu memberikan beasiswa bagi keluarga yang tidak mampu, dengan prioritas untuk anak perempuan, karena anak perempuan perlu diberikan kesempatan yang sama dengan anak laki-laki dalam bidang pendidikan dibutuhkan peranan para guru dalam meningkatkan kepekaan mengenai pentingnya pendidikan bagi perempuan. Kurikulum perlu diperbaharui dan ditinjau ulang untuk menghilangkan pandangan negatif tentang perempuan. Perlu juga meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pendidikan bagi anak-anak perempuan, mengintegrasikan gender sebagai mata ajaran khusus dalam pelatihan untuk guru-guru di sekolah, memasukan kesadaran akan kesetaraan gender dalam pendidikan melalui sekolah, dan mendorong masyarakat mengirim anak-anak perempuan mereka ke sekolah secara teratur, untuk memberi rasa aman. Dengan demikian, hambatan-hambatan tradisional lambat laun akan hilang. Para guru sebagai pendidik di sekolah perlu memberikan pengalaman dan contoh langsung untuk menanamkan nilai-nilai baru dalam hubungan heteroseksual dalam pengasuhan anak di sekolah. Guru-guru harus mampu mendorong pergeseran pola berpikir bahwa laki-laki adalah pemimpin, sedangkan anak perempuan akan menjadi ibu rumah tangga. Pemahaman kesetaraan gender, kesadaran, dan sensitivitas gender oleh para penyelenggara pendidikan, kiranya perlu terus menerus diasah demi perubahan paradigma dan persepsi yang lebih adil

gender bagi anggota masyarakat. Hal ini dibutuhkan kerja sama antara dinas pendidikan, kantor pemberdayaan masyarakat, swasta serta lembaga swadaya masyarakat sebagai penyedia beasiswa.

4. Penyuluhan melalui dinas pendidikan, dinas sosial dan badan pemberdayaan perempuan mengenai hak-hak perempuan, selain itu dalam kegiatan kemasyarakatan, seperti pengajian atau perayaan hari-hari besar keagamaan, pihak aparat desa dapat memberikan porsi peranan yang lebih banyak kepada kaum ibu dan anak perempuan. Secara perlahan, kegiatan ini akan mengembangkan pola relasi yang setara antara perempuan dan laki-laki. Dengan demikian diharapkan nantinya, pembagian peran yang ada tidak selalu memberatkan perempuan namun bisa setara.
5. Badan pemberdayaan perempuan bekerja sama dengan dinas sosial, dinas perdagangan, dinas perindustrian, koperasi dan pemberdayaan masyarakat perlu menyusun program atau kegiatan yang melibatkan perempuan secara langsung di Masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup, peranan dan kedudukan perempuan, misalnya terlibat dalam program pemberdayaan usaha kecil khusus kaum perempuan, bimbingan dan pelatihan keterampilan kewirausahaan, akses modal dan akses pelayanan dasar. Dengan melibatkan secara langsung, maka perempuan akan diberdayakan, sehingga mendapatkan keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan kaum perempuan dapat diberikan penyadaran bahwa mereka secara hak memiliki kesempatan yang sama dalam proses pembangunan di masyarakat. Apalagi dengan berkembangnya konsep pembangunan yang berpusat pada rakyat, maka perempuan dapat memberikan kontribusi nyata melalui kegiatan-kegiatan ekonomi produktif. Dengan melibatkan perempuan secara langsung, diharapkan dapat mengubah pola pikir yang salah selama ini mengenai peran dan kedudukan perempuan dalam keluarga, masyarakat dan kehidupan yang lebih luas dan kompleks di tingkat yang lebih tinggi. Selain itu perlu adanya pendampingan dari pihak yang terlibat program pemberdayaan perempuan di lapangan agar terciptanya sinergi yang harmonis dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pemecahan masalah, meningkatnya partisipasi dan jaringan kerja.

6. Perlu adanya sosialisasi peningkatan kualitas hidup sehat, pentingnya kesehatan reproduksi dan menjaga jarak kehamilan. Usaha ini dilakukan agar mengurangi angka menikah muda pada perempuan di Kabupaten Karawang, untuk menyukseskan kegiatan ini kerja sama antara badan keluarga berencana, dinas kesehatan, dan dinas pendidikan.
7. Dari aspek akademis, peneliti menyarankan dalam penelitian selanjutnya untuk mengambil informan lain sebagai narasumber, supaya memperoleh informasi yang berbeda, berkaitan dengan ketidaksetaraan gender dalam pendidikan di Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang. Selain itu juga disarankan untuk melakukan penelitian di kecamatan lain di wilayah Kabupaten Karawang, sehingga dapat diperoleh informasi yang berbeda sebagai bahan komparasi dalam menganalisis fenomena ketidaksetaraan gender dalam pendidikan di wilayah tersebut. Dengan demikian nantinya dapat dihasilkan solusi dan rekomendasi yang lebih menyeluruh dan tepat untuk mengatasi permasalahan ketidaksetaraan gender dalam pendidikan yang telah berlangsung dari dahulu sampai dengan saat ini di Kabupaten Karawang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Alston, Margaret., & Bowles, Wendy. (2003). *Research For Social Workers An Introduction to Methods*. (2nd Edition). Canberra: Allen & Unwin.
- Babbie, Earl, R., & Rubin, Allen. (2008). *Research For Social Workers: An Introduction To Methods*. Canberra: Aleen & Unwin Ltd.
- Boserup, Esther. (1970). *Women's Role in Economic Development*. London: George Allen & Unwin.
- Bogdan, Robert., & Biklen, Sari Knop. (1975). *Qualitative Research For Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn & Bacon Inc
- Bradley, Harriet. (2007). *Gender*. Cambridge: Polity Press.
- Bungin, Burhan. (2001). *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Chafetz, Janet Saltzman. (1991). The Gender Division of Labor and The Reproduction of Female Disadvantage: Toward an Integrated Theory. Dalam Blumberg, R.L, (ed), *Gender, Family and Economy, The Triple Overlap*. (Page 233-256). Newbury Park: Sage Publication.
- Chant, Silvy., & Brydon, Lynne. (1989). *Women in The Third World Gender Issues in Rural and Urban Areas*. England: Edward Elgar Publishing.
- Creswell, John. W. (2003). *Desain Penelitian : Pendekatan Kualitatif dan Kuntitatif*. (Angkatan III & IV KIK-UI dan Nur Khabibah, Penerjemah). Jakarta: KIK Press.
- Faisal, Sanafiah. (1990). *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Malang: YA3.
- Faisal, Sanafiah. (1991). *Sosiologi Pendidikan*. Surabaya : Usaha Nasional
- Fakih, Mansour. (2008). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Jakarta: Insist Press.
- Grewal, Inderpal., & Kaplan, Caren. (2002). *An introduction Women's Studies* . New York: McGraw-Hill Companies Inc.
- Handayani, Trisakti. (2001). *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: Pusat Studi Wanita dan Kemasyarakatan UMM.

- Hikmat, Harry. (2001). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Ife, Jim., & Tesoriero, Frank. (2008). *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi* (Edisi Ke-3). (Sastrawan Manullang, Nurul Yakin, & M. Nursyahid, Penerjemah). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Joesoef, Soelaiman. (1979). *Pendidikan Luar Sekolah*. Surabaya : CV Usaha Nasional.
- Megawangi, Ratna. (1999). *Membiarkan Berbeda*. Bandung: Mizan.
- Midgley, James. (1995). *Social Development The Development Perspective in Social Welfare*. London: Sage Publications Ltd.
- Minichiello, Victor. (1995). *In-depth Interviewing* (2nd ed.). Australia: Longman.
- Moore, Henrietta. L. (1998). *Feminisme dan Antropolgi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Moser, Carolline. (1993). *Gender Planning and Development: Theory, Practice, and Training*. London : Routledge
- Mosse, Julia. Claves. (2007). *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Rifka Annisa WCC & Pustaka Pelajar.
- Murni, Rokna. (2010). *Pemberdayaan Perempuan Pasca Reformasi dalam Secercah Cahaya Menuju Kesejahteraan Perempuan*. Jakarta : Kemensos
- Mulyana, Rohmat. (2004). *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*. Bandung: Alfabeta.
- Nasution, S. (2010). *Sosiologi Pendidikan*. Bandung: Bumi Aksara.
- Newman, Lawrance. W. (2006). *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches*. USA: Allyn & Bacon.
- Noerdin, Edriana., Aripurnami, Sita., & Hodijah, Siti Nurwati. (2005). *Analisa Gender dan Anggaran Berkeadilan Gender*. Jakarta : Women Research Institute.
- Noerdin, Edriana., Agustini, Erni., Pakasi, Diana. Theresa., Aripurnami, Sita., & Hodijah, Siti Nurwati. (2006). *Potret Kemiskinan Perempuan*. Jakarta: Women Research Institute.
- Nurhaeni, Ismi Dwi Astuti. (2009a). *Kebijakan Publik Pro Gender*. Surakarta: UNS Press.

- Nurhaeni, Ismi Dwi Astuti (2009b). *Reformasi Kebijakan Pendidikan Menuju Kesetaraan dan Keadilan Gender*. Surakarta: UNS Press.
- Ostergaard, Lisa. (1997). *Gender and Development Apractical Guide*. New York: Routledge.
- Puspita, H., Herawati, Tin., & Harashani. (2007). *Kajian Budaya Pantura Kesenjangan Gender Bidang Pendidikan*. Jawa Barat : Dinas Jabar
- Puspitawati, Harien. (2007). *Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan Dalam Menyongsong Era Globalisasi*. Jakarta : IPB & KNPP
- Rahayu, Sri. Kusumastuti. (2008). *Studi Baseline Kualitatif PNPM Generasi dan PKH: Ketersediaan dan Penggunaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dan Pendidikan Dasar di Provinsi Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur*. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU.
- Ritchie, Jane & Lewis, Jane. (2003). *Qualitative Research Practice : A Guide For Social Science Students and Reseacher*. California: Sage Publication
- Ruwiyanto, Wahyudi. (1994). *Peranan Pendidikan dalam Pengentasan Kemiskinan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Said, M. (1985). *Ilmu Pendidikan*. Bandung : Penerbit Alumni.
- Sekular, R., & Blake, R. (1994). *Perception* (3rd edition). New York: McGraw-Hill Publishing Company.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Research & Development*. Bandung: Alfabeta.
- Suleeman, Evelyn. (1995). Pendidikan Wanita di Indonesia. Dalam T. O. Ihromi (Editor). *Kajian Wanita Dalam Pembangunan* (hal. 227-248). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Supiandi, Yusuf. (2001). *Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan Gender*. Jakarta: Kantor Meneg PP.
- Suryadi. Ace (1997). *Pendidikan, Investasi, & Pembangunan : Isu, Teori & Aplikasi*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Suryadi, Ace. (2001). *Analisis Gender dalam Pembangunan Pendidikan*. Jakarta: Bappenas & WSPII-CIDA.
- Suryadi, Ace., & Idris, E. (2004). *Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan*. Bandung: PT. Ganesindo.

- Suryasaputra, Ruswiati. (2007). *MDGs dan Kualitas SDM Perempuan dalam Perspektif HAM*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Syarif, I., & Murtadlo, D. (2000). *Pendidikan Untuk Masyarakat Indonesia Baru*. Jakarta: Grasindo.
- Tilaar, H. A. (2005). *Manifesto Pendidikan Nasional*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. (1996). *Pembangunan : Dilema dan Tantangan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Unger, R., & Crawford. (1992). *Women and Gender a Feminist Psychology*. New York: McGrawHill Inc.
- Van Bemmelen, Sita. (1995). Gender dan Pembangunan: Apakah yang Baru? Dalam T. Ihromi (Editor). *Kajian Wanita Dalam Pembangunan* (hal. 175-226). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Van Bemmelen, Sita. (2003). *Konsep Gender dan Isu Gender di Bidang Pendidikan*. Bali : Semiloka Gender Kabupaten/Kota Se Bali.

Serial

- Dzuhayatin, Siti. (2002). Komunitas Indonesia Untuk Demokrasi. *Rifka Media* No.18, Edisi Agustus 2002, h.40-50.
- Kintamani, Ida. (2008). Kesenjangan Gender dalam Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* , XIV (75), 1069-1091.
- Kintamani, Ida. (2009). Kinerja Pendidikan SD Berdasarkan Gender. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* , XV (6), 1035-1061.
- Krefting, Laura. (1991). Rigor in Qualitative Research: The Assessment of Trustworthiness. *The American Journal of Occupational Therapy*, 214-222.
- Moser, Carolline. (1989). Gender Planning in The Third World : Meeting Practical and Strategic Gender Needs. *World Development Pergamon Press* , XVII (11), 1799-1825.

Dokumen Lembaga

- Asian Development Bank (2005). *Daftar (check list) Gender Dalam Pendidikan*. Jakarta.

- Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Statistik Pendidikan . (2010). *Statistik dan Indikator Pendidikan Berwawasan Gender*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Badan Perencanaan Daerah dan Biro Pusat Statistik Kabupaten Karawang. (2009). *Analisa Pendidikan*. Karawang.
- Badan Perencanaan Daerah dan Biro Pusat Statistik Kabupaten Karawang. (2009). *Indeks Pembangunan Manusia*. Karawang
- Badan Perencanaan Daerah dan Biro Pusat Statistik Kabupaten Karawang. (2008). *APK dan APM*. Karawang
- Badan Perencanaan Nasional. (2009). *Laporan Akhir Evaluasi Program Perlindungan Sosial Program Keluarga Harapan : Deteksi Dini Dampak PKH Terhadap Kesehatan dan Pendidikan*. Laporan. Jakarta.
- Biro Pusat Statistik Kabupaten Karawang. (2010). *Karawang Dalam Angka 2009*. Karawang.
- Biro Pusat Statistik Kabupaten Karawang. (2010). *Hasil Sensus Penduduk 2010 Kabupaten Karawang. Data Agregat per Kecamatan*. Karawang.
- Biro Pusat Statistik, Badan Perencanaan Nasional dan United Nation Development Program. (2004). *Laporan Pembangunan Manusia 2004*. Jakarta: BPS, BAPPENAS & UNDP.
- Biro Pusat Statistik dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. (2007). *Pembangunan Manusia Berbasis Gender*. Jakarta.
- Convention Watch & Pusat Kajian Wanita dan Jender UI. (2007). *Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005a). *Panduan Pokja Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005b). *Tiga Tahun Gender Bidang Pendidikan Program Peningkatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Departemen Sosial. (2007). *Panduan Pendamping Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Keluarga.

Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat. (2007). *Profil Pendidikan Propinsi Jawa Barat Tahun 2007*. Jawa Barat: Dinas Pendidikan.

Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM Bappenas. (2011). *Prioritas nasional 4 penanggulangan kemiskinan*. Bahan paparan Pra-Musrenbangnas RKP Tahun 2012. Jakarta 18 April 2011.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan. (2009). *Beijing Platform For Action*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang (2009). *Informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (ILPPD) kabupaten karawang tahun 2009*. Karawang.

Peraturan

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah

Pencarian Internet

Pemerintah Daerah Kab Karawang (6 Juli 2010), *Perkembangan IPM Kabupaten Karawang tahun 2006 – 2009*. diakses 26 Maret 2011. http://karawangkab.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=612&Itemid=329

United Nation Development Program Nat. (2011, Februari). *Human Development Report 2009 Indonesia*. Diambil kembali dari <http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2009>

Karakteristik Informan

No	Inisial	Karakteristik Informan
1	Su	Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Jenis kelamin Perempuan, Usia 31 tahun
2	Zu	Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Jenis kelamin Perempuan, Usia 40 tahun
3	Ku	Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Jenis kelamin Perempuan, Usia 37 tahun
4	Sa	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Jenis kelamin Perempuan, Usia 33 tahun
5	As	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Jenis kelamin Perempuan, Usia 35 tahun
6	Oy	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Jenis kelamin Perempuan, Usia 30 tahun
7	Ya	Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Jenis kelamin Perempuan, Usia 30 tahun
8	Ri	Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Jenis kelamin Perempuan, Usia 34 tahun,
9	Rt	Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Jenis kelamin Perempuan, Usia 31 tahun
10	Ag	Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Jenis kelamin Laki-laki, Usia 37 tahun, Suami Su, Pekerjaan Tukang Bangunan
11	Ud	Pendidikan tidak lulus SD, Jenis kelamin Laki-laki, Usia 43 tahun, Suami Zub, Pekerjaan Montir Bengkel
12	Lom	Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Jenis kelamin Laki-laki, Usia 39 tahun, Suami Ku, Pekerjaan Pegawai Pabrik, Seniman
13	Sum	Pendidikan Strata 1, Jenis kelamin Laki-laki, Usia 41 tahun, Suami Sa, Pekerjaan Pegawai PT. Pindodeli
14	Us	Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Jenis kelamin Laki-laki, Usia 38 tahun, Suami As
15		Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Jenis kelamin Laki-laki, Usia 33 tahun, Suami Oy, Pekerjaan Pegawai Pabrik
16	Ed	Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Jenis kelamin Laki-laki, Usia 33 tahun, Suami Ya, Pekerjaan Pegawai Bank Sinar Mas
17	He	Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Jenis kelamin Laki-laki, Usia 35 tahun, Suami Ri, Pekerjaan Pegawai Pabrik
18	Sup	Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Jenis kelamin Laki-laki, Usia 40 tahun, Suami Rt, Pekerjaan Pegawai Pabrik

Pedoman Wawancara

Data Informan

1. Nama :
2. Usia :
3. Pendidikan :
4. Pekerjaan :
5. Status :
6. Jumlah anak :
7. Umur Menikah :
8. Anak ke : dari bersaudara
9. Urutan keluarga : Usia
Jenis kelamin
Pendidikan

Faktor Ketidaksetaraan Gender

1. Akses
 - Ketersediaan SD/SMP/SMA waktu sekolah
 - Jarak yang diperlukan untuk sampai sekolah (waktu, kilometer)
 - Biaya Sekolah
 - Hambatan yang dirasakan dengan jarak yang ada (diri sendiri/keluarga/orang tua)
2. Partisipasi
 - Dorongan/hambatan dalam melanjutkan sekolah
 - Penyebab terhentinya sekolah
 - Keluarga yang lain mengalami berhenti sekolah seperti yang dialami informan
 - Tanggung jawab yang diemban selain sekolah
 - Keluarga yang lain memiliki tanggung jawab yang sama selain sekolah
3. Kontrol
 - Pengambil keputusan untuk berhenti sekolah
 - Pengambil keputusan dalam pemilihan jurusan
 - Peran dalam rumah tangga
 - Pengambil keputusan untuk menikah muda
4. Manfaat
 - Hasil dari pendidikan yang ditempuh
 - Dampak berhenti sekolah
5. Nilai
 - Tradisi
 - Perbedaan peranan dalam keluarga
 - Peranan perempuan saat ini

Pedoman Wawancara Suami

Data Informan

1. Nama :
2. Usia :
3. Pendidikan :
4. Pekerjaan :
5. Jumlah anak :
6. Umur Menikah :

1. Nilai dalam Keluarga

- Peranan istri dalam rumah tangga
- Peranan suami dalam rumah tangga
- Tanggung jawab suami
- Tanggung jawab istri
- Pengambil keputusan mengenai keluarga
- Pengelolaan rumah tangga yang berkaitan dengan anak

2. Data mengenai istri

- Saudara istri
- Perlakuan yang diterima istri dalam keluarganya
- Pendidikan/pekerjaan istri
- Tanggapannya mengenai pendidikan/pekerjaan istri
- Kegiatan yang dilakukan istri

Matriks Taksonomi Penelitian

Variabel	Indikator	Kutipan Pernyataan Informan	Hasil Temuan	Kesimpulan
A.1. Akses	A.1.1. Ketersediaan Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • “Ada SD jauh juga kalau saya jalan kaki sekitar setengah jam mah ada, SMP nya jauh ya, beda desa SMA lebih jauh lagi itu mah.” (Zu, November 2011) • “Ada, SD ada, SMP ada tapi beda desa, kalau SMA ga ada, tapi sampai sekarang yang di kecamatan ini juga ga ada. Kalau dari rumah saya ke SD sekitar 15 menit kalau naik sepeda, kalau SMP sekitar setengah jam yah lumayan cape.” (Oy, November 2011). • “... Wah si ibu mah, nanya jaman dulu..ya,.di kampung, saya ada SD, trus SMP juga sudah ada tapi rada jauh beda desalah, tapi kalau SMA belum ada. Kampung sama mah pelosok banget ga...kalau sama sekarang sih sudah lumayan beda sekarang.” (Su, November 2011) • Sekolah mah ada, SD ada, deket itu mah, kalau untuk SMP lumayan jauh, tapi saya naik sepeda sekitar 15 menitlah Cuma kalau SMA emang beda kecamatan kali yah, di karawang, sampai sekarang juga ga ada SMA kalau disini mah. “ (Sa, November 2011). • “Kalau sekolah mah SD sudah ada, yah jalannya lumayan tapi tidak terlalu jauh, kalau SMP mah udah beda desa lumayan jauhlah. Kalau ga punya uang untuk naik angkutan saya jalan kaki, kalau SMA bukan beda kampung lagi itu mah beda kecamatan jauh. Ga ada biaya saya sampai SMA mah, mahal, udah sekolahnya mahal, ongkosnya mahal juga eta mah. “ (As, November 2011) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada ketersediaan sekolah tapi jauh dari tempat tinggal 2. Jarak jauh, harus ditempuh dengan jalan kaki 3. SD tersedia di desa, SMP di desa lain, SMA di kota kecamatan 4. Butuh waktu untuk mencapai lokasi sekolah tersebut 	Sekolah hanya tersedia di desa tertentu, sehingga sebagian siswa perempuan tidak diizinkan melanjutkan sekolah karena pertimbangan keamanan, sebab jarak tempuh yang cukup jauh dari tempat tinggal

		<ul style="list-style-type: none"> • “SD ada dekat rumahlah, satu desa, kalau untuk SMP.. Ehm lumayan setengah jamlah, kalau untuk SMA di Kerawang SMA mah jauh. Kalau ke SMA mah naik mobil angkot maksudnya. “ (Ri, November 2011) 		
	A.1.2. Jarak	<ul style="list-style-type: none"> • Dari rumah saya ke sekolah SD rada jauh, wah lewat sawah, lewat hutan deh.. ada kalinya ga dibuat jembatan kalau musim hujan bisa becek malah banjir pokoknya kalo anak SD mau sekolah mah jauh....mungkin kayak dari sini ke mana yah..wah si ibu juga ga tau yah....Saya kan jalan kaki ke sekolah yah, kira-kira setengah jam..apalagi SMP tambah jauh banget...ga tau deh berapa kilonya....saya ga sampe SMP..pengen sih sekolah SMP tapi ga mampu mo gimana lagi....” (Su, November 2011) • “Ya, karena hambatan itu, karena jauh ya, itu karena faktor kalo hujan gitu, itu yang gak punya kendaraan jadi saya suka cape kalau sekolah SMP akhirnya saya berhenti aja deh.” (Zub, November 2011). • “Ngga ada sih hambatannya, yang paling kerasanya mah cape sama sekolah mahal soalnya sering ga punya uang buat ongkos gitu. “ (As, November 2011) • “Deket sih kayak ke SD, 15 menit ya bu. Kalo untuk ke SMP 2 kilo kalau SMA lebih jauh lagi sih, tapi itu naik sepeda dulu mah. Tapi kalau ke SMA sudah naik motor.”(Ri, November 2011) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jarak dari tempat tinggal ke SD dapat ditempuh dengan jalan kaki atau bersepeda 2. Jarak dari rumah ke SMP dan SMA semakin jauh, sehingga perlu sarana transportasi lain 3. Jarak yang jauh tersebut membutuhkan biaya harian yang lebih besar untuk ongkos 	Faktor jarak menjadi kendala, terutama jarak ke SMP dan SMA, sehingga siswa perempuan sulit untuk melanjutkan sekolah karena pertimbangan keamanan
	A.1.3. Biaya	<ul style="list-style-type: none"> • “Orang tua sih ngijinin aja lah...setengah jam aja kok... ga papa lah bu buat sekolah...Kalo dulu orang tua saya mampu juga boleh kali ya...cuma karena ga mampu lagi, biaya sekolah kan mahal jadi ga ngelanjutin deh.” (Su, November 2011) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian besar informan tidak melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi, karena faktor tidak memiliki biaya 2. Orang tua merupakan pihak utama sumber pembiayaan sekolah 	Semakin tinggi jenjang sekolah, maka semakin banyak biaya yang dibutuhkan, sehingga semakin sedikit kesempatan untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi tersebut

		<ul style="list-style-type: none"> • “Yaa ngga ada uangnya. Ngga ada biayanya, apalagi pas kelas dua SMP juga bapak meninggal terus mang jaja pindah ke Jakarta ikut kerja sama orang ga ada lagi yang dukung biaya gitu. “ (As, November 2011) • “Ya..., itu mah biaya sih, kayaknya kalau kuliah mah mahal, ga sanggup mungkin orang tua. Kakak saya juga yang laki-laki aja, kayak saya lulusan SMA gitu. Kalau untuk lanjut mah kayaknya ga ada biaya. “ (Ri, November 2011) 		
	A.1.4. Hambatan Lain	<ul style="list-style-type: none"> • “Jarak yang ada, kayaknya ga jadi hambatan kok, yah seneng aja jalan-jalan sama temen-temen namanya juga anak-anak....Anak SMP juga jalan kaki yang lebih jauh, Cuma yah itu kalau hujan susah, yah becek, belok sampe banjir...sama cape juga kalau sekolah mesti berangkat pagi, kalau kesiangan yah telat....” (Su, November 2011) • “Kotor, ya... perkampungan sih sawah soalnya, Sawah ya, jadi kotor, basah lewat apa, kalau hujan banjir becek, orang tua suka khawatir, Kadang – kadang suka dijemput, kadang suka dianterin kalau hujan gede . “(Oy, November 2011) • “Ngga ada hambatan. Jalannya lancar aja, yah paling belok dikit kalau hujan yah...tapi lancar lah. Gak ada sih, gak ada hambatannya mungin jauh aja kali yah, jadi cape sama kalau sekolah ga boleh telat bangun mesti pagi. Kalau dari orang tua sendiri mah dukung aja sih kayaknya.” (Ri, November 2011) • “1 jam yah, ada hambatan gak sampai sekolah. Gak ada, naik sepeda rame-rame seneng-senang aja.” (Ya, November 2011) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi jalan yang becek di musim hujan menjadi kendala menuju sekolah 2. Bangun di pagi hari supaya tidak terlambat ke sekolah menjadi kendala bagi siswa 	Hambatan selain ketersediaan, jarak dan biaya adalah kondisi cuaca dan perilaku siswa yang malas bangun pagi
A.2. Partisipasi	A.2.1. Faktor yang Mendorong	<ul style="list-style-type: none"> • “Ya, mau sendiri sih, pengen sekolah kayak temen-temen yang lain. Ya iya sih, ini yang mendorong. “ (Ri, November 2011) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keinginan pribadi untuk melanjutkan sekolah supaya bisa seperti teman-teman yang lain 	Faktor pendorong melanjutkan sekolah adalah keinginan diri sendiri serta faktor semua

	Melanjutkan Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • “Ya gimana ya, kalo lulus SMA kan rata-rata minimal. Kalo di saya itu udah lulus SMA gitu”. (Ya, November 2011). 	2. Di keluarga, semua berpendidikan SMA	anggota keluarga yang berpendidikan SMA
	A.2.2. Alasan Lain Penyebab Berhenti Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • “Sebenarnya sempet pernah pengen ngelanjutin, cuman sayanya kurang ini gitu. Pernah pengen di Bandung cuman saya ngga, udah ngga pengen ini. Terus saya kan sudah punya pacar dari dulu masih sekolah, kata orang tua juga di suruh nikah aja lah. Ga enak udah pacaran lama-lama kesana kemari. Yah di nikahin deh. Jadi saya akhirnya mutusin ga lanjut kuliah, orang tua juga kayaknya ngedukung aja kalau saya nikah. Yah mungkin ga enak ama tetangga kali ya haahaaaa.” (Ri, November 2011). • “Oh iya, bareng-bareng sih, kan ada sodara, kan cewek, ada yang nyuci, bagi-bagi kerjanya. Dari kecil mungkin karena saya perempuan saya udah diajarin urus rumah, beda sama saudara laki-laki saya.” (Ku, November 2011) • “Kalo kakak-kakak yang laki-laki mah sempet lanjut ya. Kan masih ada bapak.” (Ya, November 2011) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menikah karena disuruh orang tua 2. Sebagai perempuan lebih diarahkan untuk mengurus rumah daripada sekolah 	Keharusan menikah muda serta prioritas pendidikan untuk anak laki-laki merupakan alasan lain penyebab berhenti sekolah
	A.2.3. Perlakuan Orang Tua terhadap Saudara Lain	<ul style="list-style-type: none"> • “Sama aja bu sama saya, namanya juga orang tua ga mampu yah...Cuma kakak diatas saya aja yang SMP itu juga satu orang. Semuanya juga pengen kali yah lanjut sekolah sih...namanya ga ada lah bu.” (Su, November 2011) • “SMP semua, adik sama kakak saya, beda umurnya sama kakak 1 tahun kalau sama adik 5 tahun kali yah. Iya sama lah faktor biaya, sekolah ke SMA kan mahal sudah gitu ongkosnya juga kan mahal” (Oy, November 2011) • “Usia adik, saya beda 3 tahun, 2 tahun gitu mungkin sekarang, 30, sama 28 yang terakhir kembar. Kalau pendidikan SMA mereka, laki-laki semua malah kalau yang 	1. Anak laki-laki lebih diprioritaskan untuk sekolah dibandingkan anak perempuan	Anak laki-laki mendapatkan perlakuan lebih dibandingkan anak perempuan dalam kesempatan bersekolah

		<p>nomor empat kuliah sekarang guru TK.“ (Sa, November 2011).</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Yah, kalau kaka mah lanjut terus. Enaknya sekarang udah jadi PNS kalau saya mau sekolah juga udah jadi orang kantoran kali yah. “ (Ri, November 2011) • “Semua S1 yang laki-laki ya.”(Ya, November 2011) 		
	A.2.4. Tanggung Jawab Selain Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • “Apa yah tugas saya, yah tanilah kalau sekarang tapi dulu mah bantuin ibu nyuci piring, nyapu, bantuin masak, kalau ibu ke sawah saya nyusul deh ka sawah, Kalau saudara saya mah lebih nyangkul, trus paling ngasih makan kambing, kambing orang trus nanti kalo kambingnya beranak 2, yang satu buat yang punya yang satu lagi buat yang ngurus kalo ga ngambil kayu buat masak, laki-laki mah kerjanya diluar semua deh tani tani, kalau di rumah mah yang bantuin ibu mah saya....” (Su, November 2011) • “Di SMP yah, waktu jaman sekolah itu selain ehm sekolah ni ya, sekolah, belajar ya gitu emmmm ada kewajiban lain gak?. Saudara yanga lain sih sama aja yang lain juga nyuci sendiri dibiasain sama ibu.” (Oy, November 2011) • “Ya, biasa kita anak pertama harus ini, itu masak ini, ini bantuin iya kan tau anak pertama. Kalau adik-adik yang laki-laki main paling. Ha ha ha.....” (Sa. November 2011) • Ya nyuci, banyak kerjaan dirumah, nyapu gitu, namanya juga saya satu-satunya perempuan, sayalah yang ngerjain bantuin ibu. Kalau saudara saya yang lain kan laki-laki jarang kalau untuk ngerjain pekerjaan di rumah. Tanggung jawabnya perempuan (As, November 2011) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anak perempuan diberikan tanggung jawab membantu ibu mengerjakan tugas-tugas rumah tangga 2. Anak laki-laki tidak diberikan tanggung jawab tertentu, lebih bebas bermain 	Tanggung jawab selain sekolah hanya diberikan kepada anak perempuan yakni membantu ibu mengerjakan tugas-tugas rumah tangga

		<ul style="list-style-type: none"> • “Tanggung jawab untuk biaya sekolah mah ga ada, semua dari orang tua, paling kalau di rumah karena saya satu-satunya perempuan yah paling nyuci, nyapu mah begitu bantuin ibu lah.” (Rt, November 2011) • “Ya paling biasa, pekerjaan apa ya, beres beres rumah, sesapu gitu. Bantuin ibu saya masak. Kalau untuk kakak saya, kalau di rumah engga soalnya dia juga kan jarang ada di rumah paling pulang kalau liburan semesterannya gitu. Paling dia cuma main sama teman-temannya dulu. Jaranglah kalau tanggung jawab urusan rumah.” (Ri, November 2011) 		
A.3. Kontrol	A.3.1. Pengambil Keputusan mengenai Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • “Kalau untuk masalah itu mah, ibu saya...dulu mungkin bapak tapi bapak saya meninggal waktu saya SD kelas 5 terus kakak udah pada beristri semua siapa yang mau bantuin.” (Su, November 2011) • “Ya, orang tua. Ibu sama bapak. Yah faktor utama berhenti sekolah kan karena biaya sekolah mahal ditambah ongkosnya juga mahal. “ (Oy, November 2011) • “Ya saya, ibu saya. Iya soalnya ya ngga ada uangnya. Ngga ada biayanya, ga punya bapak. Wah kalau bapak masih hidup yah pasti bapak, ibu mah ikut bapak aja. Sampai sekarang akhirnya ibu ikut aja. “ (As, November 2011) • “Wah kalau yang mutusin segala sesuatu yang paling dominan bapak kayaknya, ibu sama anak-anaknya tinggal ikutin aja. Kalau ibu lebih dominannya di rumah urus anak-anak gitu (Ri, November 2011) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bapak sebagai kepala keluarga merupakan pihak yang mengambil keputusan mengenai kelanjutan pendidikan anak 2. Ibu dapat membeirkan keputusna, tetapi tetap berkoordinasi dengan bapak 	Pengambil keputusan utama mengenai pendidikan anak adalah Bapak sebagai kepala keluarga

		<ul style="list-style-type: none"> • “Saya yang mutusin. Ya gak, ya gak gimana sih, ya udah lah, kalo itu mah gak ini kata dia, tar jangan nyesel aja gitu (Ku, November 2011) • “Ya, orang tua orang gak ada biaya, suruh cari duit. Makanya saya jadi TKI ke Singapura dan Saudi waktu itu peran bapak yang paling besar. Bapak saya yang mutusin segala sesuatu, kalau ibu mah manut aja, kayak waktu saya jadi TKI itu bapak yang ngurus. “ (Sa, November 2011) • “Kalau untuk masalah sekolah mah ibu, yang putusin tapi dari kampung mana-mana juga SD nya di situ bahkan ada yang lebih jauh. Yang mutusin untuk berhenti sekolah ibu dan kakak juga siapa yang mau bantuin orang tinggal ibu doank. Aku sendiri, aku kan pernah kerja di Jakarta. “ (Su, November 2011) 		
	A.3.2. Pemilihan Jurusan	<ul style="list-style-type: none"> • “Bukan Bapak, tapi saya sendiri. Cuma saat itu bapak saya setuju, makanya didukung sekolah. Padahal jauh juga.” (Ya, November 2011) • “Ya gimana ya, kalo lulus SMA kan rata-rata minimal kalo di saya itu udah lulus sma gitu., kalau jurusan sekolah saya IPS yang mutusin ya dapatnya IPS. Kalau orang tua sih ga terlalu milih IPA atau IPS nya. “ (Rt, November 2011) 	Pemilihan jurusan di SMA ditentukan oleh siswa sendiri	Pemilihan jurusan dilakukan oleh siswa sendiri, bukan oleh orang tua
A.4. Manfaat	A.4.1. Hasil dari Pendidikan yang Ditempuh	<ul style="list-style-type: none"> • “Manfaat ada sih, Manfaat apa yah, yah namanya sekolah Cuma SD berarti lah.. dari pada ga SD ga sekolah...apa ye hahaaa seneng aja, iya bisa baca, nulis, bisa ngitung uang haha....” (Su, November 2011) • “Manfaatnya ada sih, langsung kerja. Mungkin karena ijazah SMP kali ya, saya langsung kerja di pabrik. “ (Oy, November 2011). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manfaat sekolah minimal bisa membaca, menulis dan berhitung 2. Bisa mengajrakan anak membaca, menulis dan berhitung 3. Lebih mudah diterima bekerja di pabrik garmen 	Hasil dari pendidikan yang ditempuh adalah memberikan manfaat untuk diri sendiri dan untuk keluarga dalam hal kemampuan membaca dan menulis

		<ul style="list-style-type: none"> • “Ya ada. Bisa kerja di garment gitu lumayan tadi saya bilang bisa nambah penghasilan suami. Kalo ijasahnya SMP mah kan bisa. Kalo SD mah susah. Lumayanlah.” (As, November 2011) • “Ya, bisa kerja sih bisa kerja di pabrik, dulu saya dari sebelum nikah saya kerja pas anak saya lahir umur 3 tahun saya berhenti kerja disuruh suami untuk jagain anak. Jadi saya sekarang di rumah aja. Dulu berhenti kerja soalnya ga ada yang megang anak saya, biasanya yang jagain ibu saya terus ibu saya ga ada. Jadi siapa lagi yang megang anak saya, suami nyuruh saya berhenti kerja deh jagain anak (Ri, November 2011) • “Ya, kita jadi tahu baca, tulis bisa ngajarin buat anak.” (Sa, November 2011) • “Ya SMA ya, minimal mah paling ngga inilah, ngajarin anak apa gitu kan jadi lebih ini gitu. Misalnya anak nanya, gini gini gitu. Bisa ada jawaban gitu. Minimal gitu lah.” (Ri, November 2011) • “Apa ya, gak ada hasilnya cuma mungkin kalau untuk ngajarin anak sekolah bisalah. Tapi sekarang pelajarannya juga udah beda, anak SD juga udah susah deh. Anak saya yang pertama sekarang kan kelas 5, wah sudah bikin pusing deh beda ga kayak jaman dulu. Manfaatnya apa yah, kalau kerja yang bagus mah susah juga, tapi yah Alhamdulillah warung kayak gini lumayan bantu nambah penghasilan keluarga.” (Ya, November 2011) 		
	<p>A.4.2. Dampak dari Berhenti Sekolah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • “Nyeselnya sekarang ya, mau lanjut sekolah ga ada. “ (Ku, November 2011). • “Yah berhenti sekolah ga bisa apa-apa namanya juga SD doang, kalau SMP bisa apa...tau gimana... pasti ada 	<p>Sulit mendapatkan pekerjaan yang layak untuk membantu perekonomian keluarga</p>	<p>Dampak utama dari berhenti sekolah adalah tidak bisa membantu perekonomian keluarga saat ini</p>

		<p>pendidikan yang lebih tinggi.” (Zu, November 2011)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yang keras banget ya masalah inilah kalo perekonomian suami lagi ini ya gitu, kita kan jadi gak bisa ini sendiri gitu, yah yang utamakan penghasilan dari suami. Saya mah di rumah.” (Zu, November 2011) 		
A.5. Nilai	A.5.1. Tradisi	<ul style="list-style-type: none"> • “Waktu itu saya dijodohin orang tua, disuruh nikah, saya juga baru ketemu 2 kali disuruh nikah biar ga kemana-mana mungkin yah, mau sekolah ga ada biaya...dari pada saya ga ngapain-ngapain tiap hari ke sawah yah nanam jagung nanam padi, orang tua pikir mungkin anak udah ga sekolah yah udah nikahin aja.” (Su, November 2011)’ • “Nikah, 16 ya, itu juga saya yang mau nikah liat temen-temen udah nikah yah jadi ikutan deh...” (Ku, November 2011) • “Nikah, Umur berapa ya, 15 Kelas 2 SMP sih, gak lulus.” (Zu, November 2011) • “Nikah umur berapa yah 19 tahun, seingat saya, abis keluar SMP saya sempet kerja terus nikah deh. Waktu nikah juga masih kerja tapi pas anak udah dua tahun saya berhenti kerja. Saya juga ketemu sama suami saya karena sama-sama kerja di pabrik (Oy, November 2011) • “Saya menikah dulu umur dua puluhan, jadi setelah lulus SMP saya kerja ikut orang gitu terus ketemu sama suami saya. Tapi setelah menikah saya ga kerja tapi sekitar 2 tahun ini saya ditawarkan kerja jait yah lumayanlah buat nambah-nambah.” (As, November 2011) • “25 tahun, saya telat menikah soalnya saya pernah kerja di Saudi dulu 4 tahun terus di Singapore 2 tahun (Sa, November 2011) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hampir semua anak perempuan menikah muda karena disuruh orang tua dan mengikuti teman-teman yang telah menikah 2. Setelah menikah tidak melanjutkan sekolah 3. Telat menikah karena bekerja di luar wilayah Kecamatan Majalaya 	<p>Tradisi menikah muda menyebabkan anak perempuan berhenti sekolah, meskipun ada keinginan untuk sekolah sampai jenjang yang lebih tinggi</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • “Waktu itu yang mutusin ibu sama bapak saya, kebetulan suami saya itu masih saudara gitu. Umurnya juga ga beda terlalu jauh sama saya. Entah gimana deh, saya juga lupa saya akhirnya disuruh nikah gitu padahal saya juga lagi enak-enak kerja. Yah dijodohinlah, takut kali anaknya sudah kerja tapi belum punya pacar hehehe...terus saya nikah deh kosong 3 tahun kalau ga salah terus hamil, berhenti kerja deh (Rt, November 2011) 		
	A.5.2. Perbedaan Peranan dalam Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> • “Ya ada sih, ya semacam cuci baju gitu ya, bersih-bersih di rumah, ya itu aja lah. Kalo sodara laki-lakinya jarang bantu, sering main.” (Zu, November 2011) • “Wah, itu nggak kali ya, dulu paling waktu adik saya masih kecil bisa disuruh udah gedean dikit juga lebih suka main keluar rumah deh.” (Ri, November 2011) • “Gak ada, namanya juga laki-laki, masa disuruh masak atau ngasuh adik. Kan ga mungkin, kalau dulu sih kakak laki-laki seringnya keluar rumah. Kalau saya, sama teh uju biasanya bantuin ibu yah mulai dari masak, nyuci terus siapin yang mau di jual sama ibu.” (Ya, November 2011) 	Anak perempuan lebih banyak bekerja di rumah membantu orang tua jika dibandingkan dengan anak laki-laki	Perbedaan peranan telah diperkenalkan semenjak usia dini oleh orang tua kepada anak-anak
	A.5.3. Peranan Perempuan Saat Ini	<ul style="list-style-type: none"> • “Ada kegiatannya yah arisan sam ngobrol, udah ga ada yang diurusin lagi paling cucu yah mau ngapain lagi, kalau ada pengajian yah pengajian kalau ada yah ikutan deh yah arisan apa aja kali yah.” (Zu, November 2011) • “Tadi saya bilang ibu rumah tangga aja, ngurus anak, yah kalau keluar mah pengajian sama arisan aja. Tapi itu juga ga tentu. suami mah kerja, kadang pulang kerja terima orderan service atau aga ngapainlah. Kadang suka kumpul sama teman-teman kantornya ga tentulah, kalau lelaki mah kan langkahnya panjang ga kayak kita perempuan mau kemana- 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu-ibu ikut dalam berbagai kegiatan sosial 2. Ibu merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam urusan pengelolaan rumah tangga dan pendidikan anak 3. Mayoritas menjadi ibu rumah tangga, hanya sebagian kecil yang tetap bekerja setelah menikah 4. Pencari nafkah utama adalah suami 5. Pengambil keputusan dominan dalam keluarga adalah suami sebagai kepala keluarga 	Saat ini peranan perempuan tidak berubah banyak jika dibandingkan dengan 10 atau 20 tahun lalu yakni masih belum setara dengan laki-laki dalam bidang kehidupan sehari-hari, baik di lingkup keluarga maupun masyarakat. Pendidikan belum mampu mendorong perempuan berada pada posisi yang setara dengan kaum laki-laki di wilayah tersebut

		<p>mana inget rumah, ingat anak. “ (Sa, November 2011)</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Aktif maksudnya terlibat, wah apa yah. Saya mah jarang ikut kegiatan. Paling saya urus kreditan saya aja. Yang aktif mah suami saya deh suka kumpul-kumpul sama warga di sini (Ri, November 2011). • “Kegiatan saya, yah paling kerja di konveksi itu juga dari pagi sampai sore, sampai rumah kan banyak aja yang harus diberesin dan diurusin yah rumahlah, anak-anak. Sebelum berangkat saya harus urus makan buat di rumah. Saya kan perempuan satu-satunya jadi ibu ikut saya, mungkin lebih enak kali yah kalau ikut anak perempuannya. Jadi saya mah jarang kemana-mana, kalau ada undangan pengajian baru saya ikut itu juga kalau bisa lagi ga masuk kerja, kalau pengajian mingguan saya mah ga ikut.” (As, November 2011) • Wah kalau itu kayaknya paling banyak saya deh mulai dari yang jagain, mandiin, ngurusin bapaknya mah tau beres, pulang kantor anaknya sudah rapi, PR nya yang ngajarin saya. Dari awal juga saya, mulai hamil sampe imunisasi itu mah tugas saya deh, nah kalau minta uang yang besar-besar buat sekolah biasanya anak-anak ke bapaknya deh. Kalau untuk ambil rapot juga saya, kadang kalau pergi yang jauh-jauh mau kemana ama bapaknya deh. Saya mah ga terlalu hafal jalan.” (Ya, November 2011) • Kalau untuk yang paling berperan sama mungkin yah, atau saya kali yah. Saya yang tanggung jawab di rumah. Mulai dari beres-beres rumah, urusan anak dan lain-lain. Untuk 		
--	--	---	--	--

		<p>pengelolaan keuangan juga saya. Jadi suami saya kan kerja gajinya satu bulan sekali gitu, kalau gaji biasanya uangnya langsung dikasih sama saya, setelah dipotong untuk ongkosnya suami. Setelah itu saya rencanain deh untuk biaya listrik, makan, sekolah anak. Dari kreditan saya juga lumayan buat bantu rumah tangga. Yah buat jajan dan keperluan lain. Kalau peran suami mah pasti setuju aja sama keputusan saya. Karena dia mah sudah sibuk kerja kali yah. Kalau untuk kesehatan anak, saya yang bawa ke dokter atau puskesmas kalau anak sakit gitu. Saya juga yang nemenin anak-anak kalau belajar. Kalau untuk urusan rumah yah saya paling sama anak saya yang perempuan, dian bantu saya, kalau anak saya yang laki-laki lagi seneng-senengnya main. “ (Sa, November 2011)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peran istri untuk pendidikan, yah semuanya istri yang atur kan dia juga saya suruh berhenti kerja biar jagain anak soalnya ga ada lagi yang jagain anak setelah mertua meninggal, yah udah saya suruh berhenti kerja aja. Uang gaji saya dicukup-cukupinlah untuk bayar kebutuhan mulai dari masak, sekolah dan lainnya (Rt, November 2011). • “ Kalo keputusan, kebanyakan sih suami. Saya mah kebanyakan ikut aja, nanti kalau ga sreg saya, ya paling saya suka marah-marah. Paling saya bisa ambil keputusan banyak yang berhubungan dengan rumah. Ya maksudnya kalau untuk urusan rumah saya yang bertanggung jawab mulai dari masak, bersih-bersih makan ama urusan belajar anak. Kalau bapaknya yang ngambil keputusan kalau mau beli barang apa itu dia yang mutusin mungkin karena dia kerja kan uangnya 		
--	--	--	--	--

		<p>lebih jelas.”(Ri, November 2011).</p> <ul style="list-style-type: none">• “Kalau urusan rumah itu saya, suami saya amah taunya beres aja yah kadang suka bantu sih kalau saya udah cape kan marah-marah tuh, anak saya juga laki-laki susah deh kalau disuruh urusan rumah. Semua urusan rumah mah tanggung jawab saya, mulai dari beresin rumah, masak, nyuci, belanja, kalau suami mah kasih uang gaji trus saya yang atur. Kalau rencanain mah selalu, tapi kurang terus jadi suka malas hehee (Rt, November 2011)• “Saya biasanya, bapaknya Nugi kan jauh terus kerjanya. Tapi tetep didiskusiin sih. Atau saya kasih tau gitu setelahnya.” (As, November 2011).		
--	--	--	--	--

DOKUMENTASI



DATA PENDUDUK KECAMATAN MAJALAYA TH.2011
POSISI AKHIR DESEMBER

D E S A	LUAS WIL.			WAJIB KTP			HAK PILIH			T K I			KEWARGA NEGARA	
	LUAS MO.	SWHK MO.	JML MO.	L	P	L-P	L	P	L-P	L	P	L-P	WNI	WNA
MAJALAYA	78	246	324	1.393	1420	2.809	1442	1448	2890	3	189	192	1.016	-
PURWANGGON	65	341	406	1.673	1.704	3.385	1.616	1.726	3.342	6	221	237	4.108	-
WARIJAYA	60	319	379	1.421	1.505	2.926	1.430	1.547	2.977	16	267	283	3.801	-
SIRJIENGKOL	80	291	371	2.329	2.397	4.721	2.354	2.401	4.755	5	122	137	4.511	-
INGLIS	155	377	532	4.286	4.784	8.470	4.513	4.411	8.924	-	57	57	10.891	-
MAHMULYA	141	279	420	2.161	2.709	4.570	2.189	2.180	4.375	6	125	131	5.115	-
SIRMULYA	155	430	585	1.878	1.501	3.379	1.726	1.755	3.481	1	43	44	4.841	-
M L A H	734	2.233	2.967	15.138	14.920	30.058	15.270	15.474	30.744	37	1.029	1.066	35.511	-

